



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2023



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 050/268/II/Bapplitbang Tanggal 13 Maret 2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Seruyan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
21. Tujuan adalah arah pembangunan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
25. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPD adalah untuk memberikan arah pembangunan daerah dan sinergisitas program dan kegiatan di daerah, juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW Provinsi, RTRW Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.
- (2) Tujuan dari penyusunan RPD adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk memberikan arah Pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
 - b. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan daerah Tahun 2024-2026;
 - c. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024-2026;
 - d. sebagai tolak ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) RPD memuat permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang menjadi dasar dalam perumusan penyempurnaan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2024-2026.

Pasal 4

(1) Sistematika Penyusunan RPD disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM;
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) Sistematika Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPD menjadi pedoman bagi Bupati untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 7

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 maret 2023

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR¹⁰

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-2
2.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Seruyan	II-73
2.3 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	II-97
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-33
3.3 Kerangka Pendanaan	III-41
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2 Isu Strategis	IV-15
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Tujuan dan Sasaran	V-2
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1 Strategi	VI-2
6.2 Arah Kebijakan	VI-10
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-17
6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-30
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-3
Tabel II.2	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-14
Tabel II.3	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-19
Tabel II.4	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-20
Tabel II.5	Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-21
Tabel II.6	Hasil Komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-21
Tabel II.7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Sesuai dengan Jenis Komoditi Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-22
Tabel II.8	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Sesuai dengan Jenis Komoditi Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-23
Tabel II.9	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-29
Tabel II.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-31
Tabel II.11	Indikator Kemiskinan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-33
Tabel II.12	Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-44
Tabel II.13	Indikator Capaian Fasilitas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-47
Tabel II.14	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-49
Tabel II.15	Status Gizi Balita Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-50
Tabel II.16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-52
Tabel II.17	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-53
Tabel II.18	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-56
Tabel II.19	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-56
Tabel II.20	Capaian Air Minum Layak Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022	II-58
Tabel II.21	Irigasi, Ruang Terbuka Hijau, dan Rasio Bangunan ber-IMB Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-58

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tabel II.22	Monitoring Progress RDTR Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022	II-59
Tabel II.23	Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-61
Tabel II.24	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-62
Tabel II.25	Rasio Jumlah LKSA dan PMKS Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-62
Tabel II.26	Capaian Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-64
Tabel II.27	Penanganan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-65
Tabel II.28	Produksi Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-66
Tabel II.29	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Dengan Jenis Produk Olahan Kabupaten Seruyan Tahun 2022	II-67
Tabel II.30	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (dalam arti luas) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-67
Tabel II.31	Produktivitas Pertanian dan Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-68
Tabel II.32	Cakupan Pembangunan Ekonomi Sektor Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-69
Tabel II.33	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-71
Tabel II.34	Angka kriminalitas Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-72
Tabel II.35	Rasio Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021	II-73
Tabel II.36	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022	II-74
Tabel II.37	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-97
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-4
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Seruyan, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-12
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-17
Tabel III.5	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-20

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-23
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-29
Tabel III.8	Rasio Hutang Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)	III-30
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-31
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-32
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Seruyan Tahun 2017– 2021 (Juta Rupiah)	III-33
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-35
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-37
Tabel III.14	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-39
Tabel III.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-40
Tabel III.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-40
Tabel III.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-40
Tabel III.18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (dalam jutaan rupiah)	III-47
Tabel III.19	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)	III-52
Tabel III.20	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 (Juta Rupiah)	III-55
Tabel III.21	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)	III-58
Tabel III.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)	III-60
Tabel III.23	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)	III-61
Tabel IV.1	Permasalahan Pokok dan Permasalahan Kabupaten Seruyan	IV-14

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tabel V.1	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026	V-3
Tabel V.2	Perbandingan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional	V-4
Tabel V.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024 – 2026	V-8
Tabel V.4	Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026	V-10
Tabel VI.1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VI-2
Tabel VI.2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VI-14
Tabel VI.3	Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta Target dan Pagu Tahun 2024 – 2026	VI-17
Tabel VII.1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel VII.2	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	VII-4
Tabel VII.3	Total Pagu Indikatif OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026	VII-5
Tabel VII.4	Program Pembangunan Daerah beserta Kerangka Pendanaan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VII-8
Tabel VIII.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VIII-1
Tabel VIII.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VIII-2
Tabel VIII.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Kabupaten Seruyan	II-4
Gambar II.2	Peta Status Ketersediaan Air dan Pangan	II-7
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-8
Gambar III.2	Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-10
Gambar III.3	Realisasi Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	III-15
Gambar IV.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Seruyan	IV-4
Gambar IV.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-5
Gambar IV.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-6
Gambar IV.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-7
Gambar IV.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-8
Gambar IV.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-10
Gambar IV.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-11
Gambar IV.8	Peta Pengembangan Pulau Kalimantan	IV-35
Gambar V.1	Kerangka Logis Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan	V-2
Gambar VI.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	VI-10
Gambar VI.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan	VI-32



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seruyan, 2018-2022 (Milyar Rupiah)	II-28
Grafik II.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Seruyan, 2018-2022 (Juta Rupiah)	II-32
Grafik II.3	Indeks Gini Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-35
Grafik II.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-37
Grafik II.5	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-38
Grafik II.6	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-39
Grafik II.7	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-40
Grafik II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-41
Grafik II.9	Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Seruyan, 2018-2021	II-51
Grafik II.10	Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kabupaten Seruyan, 2022	II-55
Grafik II.11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Seruyan, 2018-2022	II-57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.



Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2023, sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024–2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023.



Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 harus memperhatikan :

- a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan tahun 2025;
- c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2018–2023;
- d. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
- e. Isu – isu strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan nasional;
- g. Regulasi yang berlaku.

Penentuan Program/Kegiatan/SubKegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah agar memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing – masing melalui evaluasi capaian RKPD dan renja PD sampai dengan Tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu – isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Seruyan harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026



serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional. RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025 dengan Visi : ***“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”***. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024–2026.

Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Seruyan dan Renstra Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”***. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan juga harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020–2024 untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang



ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang akan berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan. Untuk menjaga sinergitas tujuan pembangunan, maka Rencana Pembangunan Daerah Seruyan Tahun 2024–2026 harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Seruyan. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2024–2026 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah



(RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 juga berpedoman pada dokumen kewilayahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019–2039. Keselarasan RPD dengan RTRW Kabupaten Seruyan telah melalui proses penelaahan dan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW Kabupaten Seruyan sebagai perencanaan spasial diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Seruyan, sehingga pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Seruyan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan, serta implementasi dari misi tahap terakhir dari RPJPD untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan pasca Pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian indikator serta target pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan hingga tahun 2026 dan sebagai jembatan bagi Kabupaten Seruyan yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di Tahun 2023 untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam rencana pembangunan tahunan. RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2024–2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Seruyan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di Kabupaten/Kota, dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional). Pada Bab IV ini paling sedikit memuat permasalahan pembangunan daerah (berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk SPM) dan isu strategis.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah, yang penentuannya didasarkan pada :

- a. Visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan;
- b. Analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan tahap keempat;
- c. Isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditentukan mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup. Dalam penulisan Bab V, casecading kinerja disusun mulai dari tujuan hingga *outcome* beserta masing – masing indikatornya.



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Penentuan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan 2024 – 2026 sesuai mekanisme *casecading* di BAB V.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan serta pagu anggaran setiap tahunnya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan terus berlanjut dengan berbagai capaian positif yang telah diraihnya. Estafet pembangunan menjadi momen dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk berbagai evaluasi pembangunan, khususnya program pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024-2026 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025. Pada pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026 ini diupayakan untuk mengimplementasikan tahapan terakhir pada perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Dalam upaya menyukseskan pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan kebijakan pembangunan di tahun 2024-2026 yang berpedoman pada perencanaan jangka panjang Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025.

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi melimpah sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kabupaten Seruyan berupaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Potensi yang dimiliki Kabupaten Seruyan akan dioptimalkan penggunaannya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026, maka perlu ditelaah kembali berbagai potensi daerah, termasuk capaian pembangunan yang telah



dilaksanakan pada tahun atau periode sebelumnya sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian akan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 ini memiliki hierarki dalam implementasi setiap kebijakan yang diturunkan sehingga setiap program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan menjadi spesifik untuk mencapai target tertentu. Namun secara keseluruhannya, kebijakan yang ditetapkan secara terintegrasi berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimana harapan akhir yang ingin dituju dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Seruyan adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**.

Perencanaan pembangunan pada masa transisi di tahun 2024-2026 yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 akan disusun untuk merealisasikan visi pembangunan jangka panjang. Kabupaten Seruyan berupaya untuk merumuskan RPD periode pembangunan 2024-2026 sebagai pelaksanaan pembangunan tahap terakhir dalam perencanaan jangka panjang daerah. Pada perencanaan pembangunan tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan. Oleh karena itu, selain dibutuhkan gambaran umum kondisi daerah, juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan RPJMD Seruyan, permasalahan hingga isu strategis pembangunan daerah.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Seruyan. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Dalam menganalisis gambaran umum untuk peningkatan kualitas perencanaan RPD Seruyan, maka indikator yang dianalisis merupakan indikator yang



relevan dalam membentuk permasalahan dan kebijakan pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan tersebut, berikut gambaran umum Kabupaten Seruyan dari berbagai aspek.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi merupakan informasi spasial dan mendasar dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Seruyan. Penjabaran aspek geografi dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Seruyan berperan pada pembangunan daerah baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah $\pm 15.211,62 \text{ Km}^2$ atau $\pm 11,6\%$ dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan jumlah dan nama serta luas kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

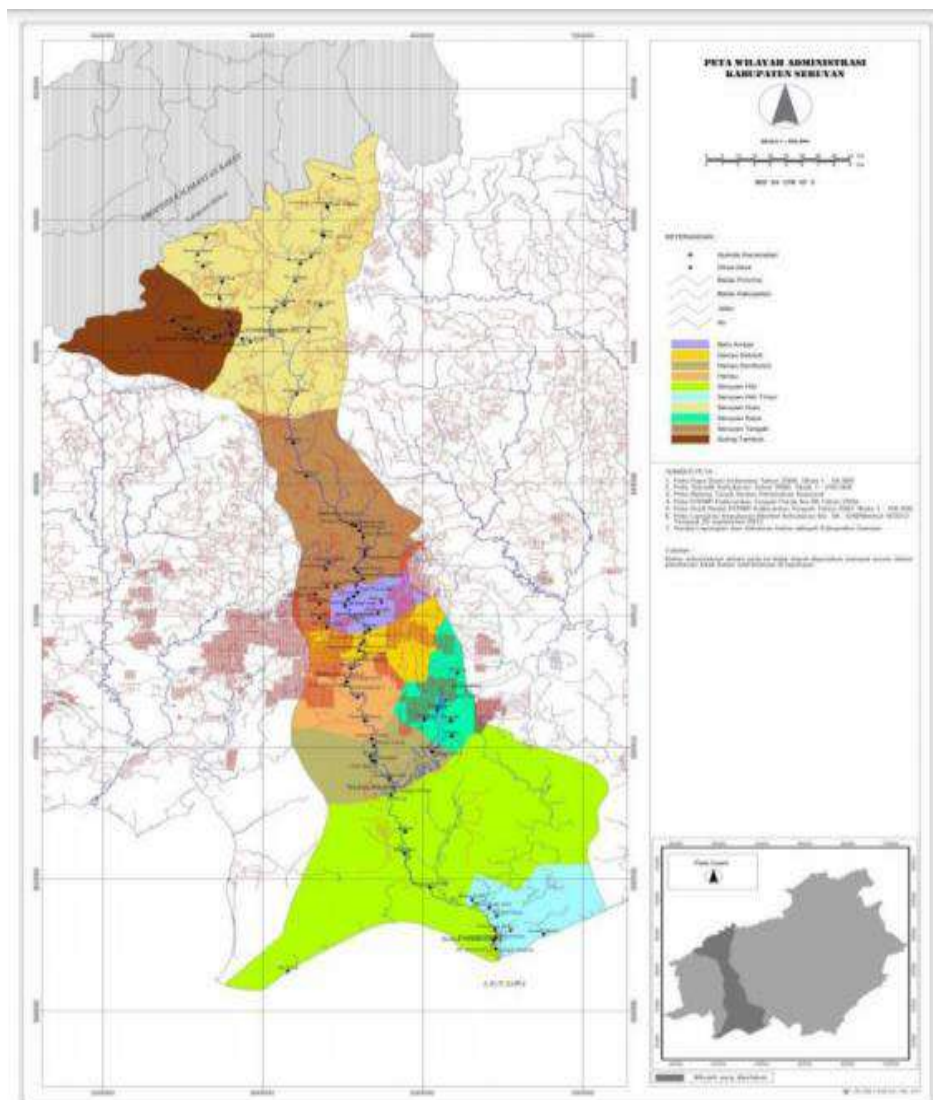
Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1.	Seruyan Hilir	10	4.320,10	28,40
2.	Seruyan Hilir Timur	6	1.323,41	8,70
3.	Danau Sembuluh	8	1.442,06	9,48
4.	Seruyan Raya	5	806,22	5,30
5.	Hanau	7	509,59	3,35
6.	Danau Seluluk	6	543,05	3,57
7.	Seruyan Tengah	20	1.245,83	8,19
8.	Batu Ampar	9	620,63	4,08
9.	Seruyan Hulu	20	3.024,07	19,88
10.	Suling Tambun	9	1.376,65	9,05
	Seruyan	100	15.211,62	100

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039



Gambar II.1



Peta Wilayah Kabupaten Seruyan

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039

b. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Kabupaten Seruyan terletak antara 0°47' - 3°32' Lintang Selatan dan 111°19' - 112°51' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; dan



4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau

Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan terletak di tengah-tengah sehingga hal ini merupakan posisi geostrategis. Dengan posisi Kabupaten Seruyan yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif pelabuhan laut Segintung yang dimiliki Kabupaten Seruyan, terutama akan menarik perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Seruyan.

c. Topografi

Kabupaten Seruyan memiliki topografi bervariasi membujur secara vertikal dari selatan ke utara. Wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan sampai bagian tengah, dan melebar dari arah Timur ke Barat meliputi kawasan pantai dan dataran rendah dari selatan ke tengah dengan kemiringan 0–1% terletak antara 0–4 m dari permukaan laut. Sedangkan wilayah bagian tengah sampai utara merupakan dataran tinggi yang berbukit.

Berdasarkan peta Geologi 1:250.000 oleh Pusat Penelitian Pengembangan Geologi, Kabupaten Seruyan memiliki 12 (duabelas) formasi Geologi, yaitu:

1. Endapan Aluvial (Qa) berumur holosen
2. Endapan Rawa (Qar) berumur holosen
3. Endapan Rawa (Qs) berumur holosen
4. Endapan Sungai (Qas) berumur holosen
5. Formasi Dahor (TQd) berumur pliosen-miosen
6. Intrusi Sintang (Toms) berumur oligosen akhir
7. Batuan Gunung api kerabai (Kuk) berumur kapur atas
8. Granit Mandahan (Kgm) berumur kapur
9. Formasi Granit Sukadana (Kus) berumur kapur atas
10. Tonait Sepauk (Kls) berumur kapur atas
11. Formasi Kuayan (TRvk) berumur trias
12. Batuan Malihan Pinoh (PzTRp) berumur permian awal



Dari 12 formasi batuan diatas terdapat 4 formasi batuan yang rawan erosi dan tanah longsor. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik unsur batuan penyusun formasi tersebut, dalam hal ini jenis batuan, tingkat permeabilitas, kekompakan, ukuran butir, dan mineral penyusunnya. Formasi atau satuan batuan tersebut adalah Endapan Aluvial (Qa), Endapan Rawa (Qar), Endapan Sungai (Qs) dan Formasi Dahor (TQd). Selain hal tersebut perlu diperhatikan struktur geologi yang mempengaruhi formasi batuan di Kabupaten Seruyan. Ada beberapa formasi dibagian utara Kabupaten Seruyan yang didominasi oleh struktur lipatan dan sesar yang berpengaruh kuat terhadap tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir.

d. Hidrologi

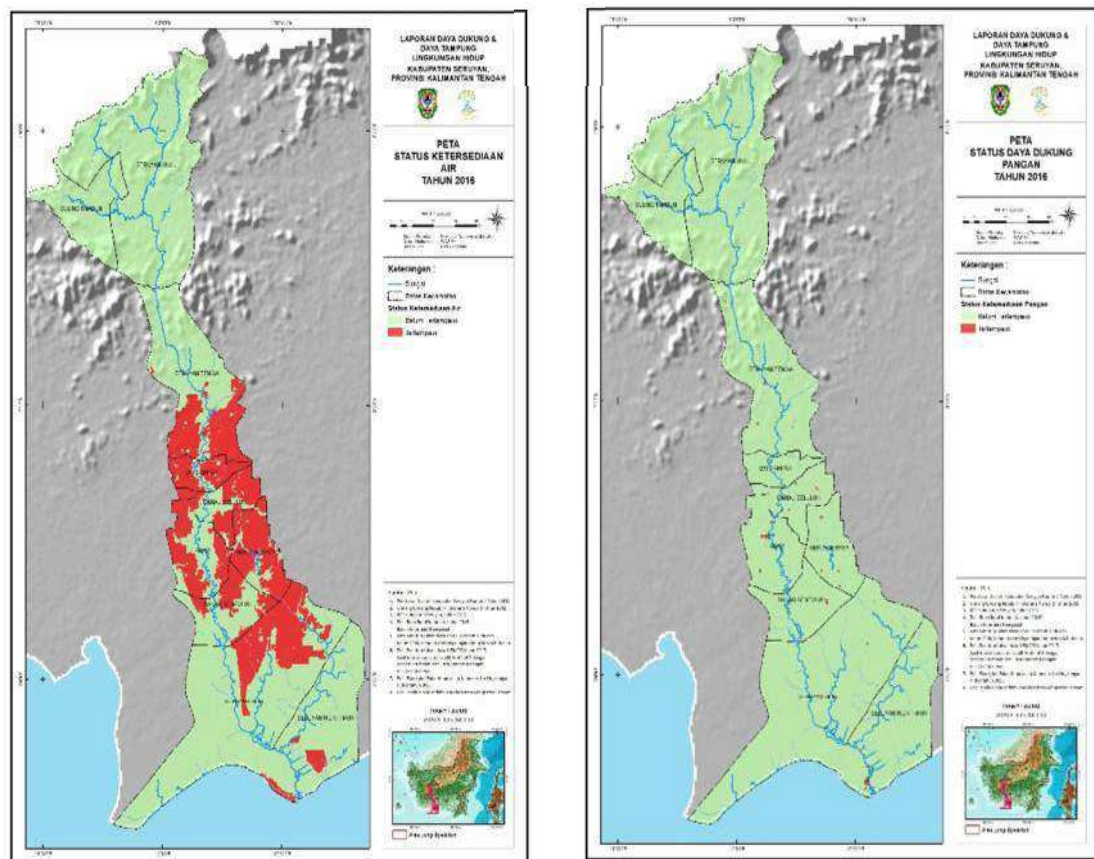
Secara umum pola sungai di Kabupaten Seruyan adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Seruyan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala Besar, Manjul, Salau, Pukun, dan Kale. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran seperti di Kecamatan Seruyan Hilir.

Sistem jaringan sumber daya air salah satunya terdiri atas Sumber air yang meliputi Danau yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu Danau Sembuluh, Danau Bayuku, Danau Rangas, Danau Bahaya, Danau Batu Hirang, Danau Seribu, Danau Alam, Danau Segintung, Danau Tanjung Baru, Danau Baung, Danau Laki Bini, Danau Tengkorak, Danau Hantasan



Samut, Danau Sari, Danau Kumis, Danau Bogam, Danau Rasau Bungkok, Danau Empat Belas, Danau Tongkang, Danau Gajah Mina, Danau A'as, Danau Seluluk, Danau Panjang, Danau Pinggir Padang, Danau Burung, Danau Bakung, Danau Marma, Danau Kepala Buaya, Danau Batakan, Danau Pondok Paikat, Danau Tampudau, Danau Jajangkit, Danau Mukat, Danau Bangaluan, Danau Kumpai Panjang, Danau Silip, Danau Simpang Pipih, Danau Belanti, Danau Baru, Danau Parang Batang, Danau Gelanggang, Danau Jahitan dan Danau Papudak.

Gambar II.2
Peta Status Ketersediaan Air dan Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023, secara keseluruhan kemampuan ekosistem menyediakan air di Kabupaten Seruyan per tahun adalah 27.035 juta m³. Jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan air per tahun untuk rumah tangga (4juta m³) dan irigasi pertanian dan perkebunan (8.013 juta m³). Namun,



distribusi secara spasial menunjukkan beberapa wilayah memiliki kebutuhan air untuk irigasi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ketersediaan air di daerah tersebut. Hal ini secara spesifik dapat ditemui di wilayah-wilayah dengan tutupan lahan perkebunan, pertanian dan tambak. Diperlukan infrastruktur irigasi yang baik untuk meningkatkan penyediaan air di bagian tengah Kabupaten Seruyan yang didominasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, bagian utara harus tetap dijaga tutupan hutannya sehingga dapat terus berfungsi sebagai area resapan air wilayah Kabupaten Seruyan.

e. Klimatologi

Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A yaitu Sangat Basah. Hal itu tergambar dari hasil perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan basah setiap tahun kemudian dirata-ratakan, yang hasil nilainya yaitu sebesar 0,124 ($Q = 0,124$). Menurut RePPProT Curah di Kabupaten Seruyan cukup tinggi dengan curah hujan tahunan terendah 2.300 mm/tahun dan tertinggi mencapai 4.300 mm/tahun. Jumlah bulan basah terendah berkisar dari 0-5 bulan dalam setahun dan jumlah bulan basah tertinggi berkisar antara 6-11 bulan. Sedangkan jumlah bulan kering relatif kecil yaitu 0-1 bulan dalam setahun dan jumlah bulan kering tertinggi berkisar 5-6 bulan dalam setahun. Rata-rata suhu di Kabupaten Seruyan yaitu 20°–32°C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75 persen.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Seruyan meliputi:

1. Pertanian

Tahun 2022 luas lahan pertanian secara keseluruhan adalah 16.280 Ha, yang terdiri dari lahan pasang surut seluas 1.156 ha, lahan rawa/lebak 913 ha, lahan ladang /huma 9.045 ha dan lahan tadah hujan 5.166 ha, dengan total produksi 13.327,08 ton. Potensi padi sawah dengan luas panen 2.852,5 Ha dan produksi 11.013,08 ton. Potensi padi lahan kering dengan luas panen 54 Ha, dan produksi 2.314 ton. Tanaman jagung dengan luas panen 118 Ha, produksi



196,61 ton. Luas panen kacang tanah 3 Ha dan produksi 8,83 ton. Luas panen ubi kayu 29 Ha, produksi 613,40 ton, dan luas panen ubi jalar 30 Ha dan produksi 321,66 ton.

2. Perkebunan

Lahan perkebunan tahun 2022 terutama karet yang luas arealnya mencapai 13.929,50 Ha, kelapa sawit seluas 638.959,37 Ha, kelapa dalam seluas 1.559 Ha, kopi robusta seluas 28 Ha, jambu mete seluas 139,50 Ha, aren 84 Ha, dan lada seluas 14,80 Ha. Untuk perkebunan besar swasta berupa perkebunan kelapa sawit sebanyak 40 unit dari jumlah tersebut 31 unit sudah operasional, dengan rincian 30 unit di Kabupaten Seruyan, 10 unit di lintas kabupaten dan 6 unit belum operasional.

3. Hutan

Luas hutan di Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 terbagi dalam hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove dan hutan rawa primer seluas 745.021,88 Ha atau 48,96 % dari luas Kabupaten Seruyan yang terdapat pada semua kecamatan. Komposisi status hutan berdasarkan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 antara lain:

- Hutan Lindung tersebar di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 30.788,42 hektar.
- Hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Seruyan Hulu dengan luas kurang lebih 357,722,32 hektar.
- Hutan produksi terbatas (HPT) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan



Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 417,924,09 hektar.

- Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 259.384,25 hektar
- Kawasan sempadan pantai berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 1.263,51 Km.
- Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 24.248,55 hektar
- Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas kurang lebih 235.988,40 hektar, Terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau;
- Kawasan mangrove dengan luas kurang lebih 9.195,95 hektar terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- Kawasan Reservat Danau Sembuluh dengan luas kurang lebih 2.385,65.

4. Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari hasil perikanan budidaya sebesar 17.458,41 ton/tahun yang terdiri dari budidaya air tawar dan budidaya air payau, serta hasil dari perikanan tangkap sebesar 21.521,66 ton/tahun terdiri dari penangkapan perairan laut dan perairan umum daratan pada Tahun 2022.



5. Peternakan

Pada tahun 2022 peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah sapi potong sebanyak 8.057 ekor, ternak kambing sebanyak 4.424 ekor, ternak babi sebanyak 4.396 ekor dan kerbau 52 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 95.413 ekor, dan itik 12.383 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

6. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, yang telah memproduksi adalah bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah utara Kabupaten Seruyan.

7. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Seruyan terdapat wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alamnya yang ada di Kabupaten Seruyan berjumlah 74 lokasi diantaranya Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Siamuk, Pantai Sandurian di Kecamatan Seruyan Hilir, Kawasan wisata Pantai Sungai Bakau di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan



Kecamatan Suling Tambun yang memiliki 160 riam. Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh. Wisata Budaya berada di empat lokasi/desa meliputi Pesta Tiwah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), makam keramat Datu Wali Sungai Pujung, Batu Doho Desa Pangke dan Situs Tiang Pantar di Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah. Dan wisata sejarah ditampilkan di lima lokasi yaitu meriam pengantin di Desa Sembuluh, makam Keramat Rangkang di Desa Terawan, Situs Tangga Batu, dan tugu perjuangan Sepan Biha di Kecamatan Seruyan Hulu.

8. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Seruyan yang tergabung dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjumlah 20.934 unit, terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 20.934 unit, untuk Usaha Kecil dan Menengah masih disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana Peraturan Pemerintah tersebut menaikkan klasifikasi jumlah modal usaha skala mikro yang sebelumnya 50 Juta menjadi maksimal 1 Milyar, dan jenis usaha meliputi jasa, industri pengolahan, perdagangan, perkebunan, peternakan, dan simpan pinjam. Adapun koperasi yang terdaftar di Kabupaten Seruyan berjumlah 290 koperasi. Jumlah koperasi yang aktif 254, jumlah koperasi yang tidak aktif 36. Adapun jumlah koperasi yang sudah melakukan RAT pada Tahun 2021 sebanyak 21 koperasi dan jumlah koperasi yang belum melakukan RAT yakni 269 atau hanya sekitar 8 persen dari jumlah koperasi yang ada. Koperasi terbentuk dalam berbagai kelompok koperasi, diantaranya adalah Koperasi Perkebunan 72 unit, Koperasi Serba Usaha 80 unit, Koperasi Karyawan 25 unit, KUD 19 unit, dan KPRI 14 unit.



9. Fasilitas Umum dan Sosial

Pembangunan fasilitas umum dan sosial berada di pusat desa/kelurahan, ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Di Kota Kuala Pembuang diproyeksikan sesuai dengan standar sebuah kota modern lengkap dengan:

- a. Pembangunan fasilitas umum seperti: *Sport Centre*, Terminal Angkutan Umum, Taman
- b. Rumah Ibadah
- c. Rumah Sakit
- d. Kawasan Pendidikan
- e. Kawasan Bisnis (*Business Center*) seperti Kawasan perkantoran, pasar, Lembaga Perbankan (BRI, BPD, BNI, Bank Mandiri).

g. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Seruyan, meliputi:

1. Potensi Bencana

Untuk wilayah Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Seruyan, potensi rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, bencana banjir dan kebakaran hutan, lahan dan gambut. Berdasarkan karakteristik penyebab bencana, dapat diidentifikasi kawasan rawan bencana tersebut sebagai berikut:

a. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Pada bagian utara dan tengah Kabupaten Seruyan tersebar di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Hanau; berupa potensi bencana longsor lereng dan longsor tebing sungai yang pada umumnya sudah dihuni sebagai kawasan pemukiman (terbangun).

b. Kawasan kebakaran hutan, lahan dan gambut

Bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut kerap terjadi di Kabupaten Seruyan, terdapat sejumlah titik kebakaran hutan lahan dan gambut yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan adalah kawasan yang sebelumnya telah



terjadi kebakaran (bekas kebakaran) dan lokasi spot-nya tersebar pada kawasan bergambut yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Hanau, Batu Ampar dan Seruyan Tengah. Oleh karena itu usaha pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan gambut perlu diwaspadai.

c. Kawasan rawan bencana banjir

Kawasan rawan bencana banjir berupa banjir genangan dan banjir bandang (flash flood). Potensi banjir bandang hanya dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, khususnya daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Seruyan. Sedangkan banjir genangan berpotensi terjadi di semua wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Seruyan Hulu.

d. Kawasan gelombang pasang dan abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Seruyan. Sedangkan kawasan rawan abrasi berpotensi terjadi pada garis pantai di pesisir pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Seruyan terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur khususnya sekitar pesisir pantai.

Tabel II.2
Kawasan Rawan Bencana
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi/Kecamatan	Luas (Ha)/ Panjang (km)
I.	Longsor		
1.	Zona A	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	195.231,50 Ha
2.	Zona B	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	44.157,03 Ha
3.	Zona C	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	341.912,77 Ha
II.	A. Banjir		
	Bandang	Seruyan Hulu	172.472,37 Ha
	B.Genangan/Luapan		
	1. Pasang Surut A1	Seruyan Hilir	120.952,09 Ha
	2. genangan A2	Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah	27.885,90 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 – 2039



2. Tingkat Ancaman

- a. Kabupaten Seruyan memiliki indeks ancaman bencana banjir tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga memiliki tingkat ancaman bencana banjir TINGGI.
- b. Indeks ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga tingkat ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut adalah TINGGI.
- c. Indeks ancaman kebakaran tinggi dan penduduk terpapar sedang sehingga tingkat ancaman bahaya kebakaran gedung dan rumah adalah TINGGI.
- d. Indeks ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) tinggi dan penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) adalah TINGGI.
- e. Indeks ancaman kekeringan tinggi dan indeks penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bahaya kekeringan adalah TINGGI.
- f. Indeks ancaman bahaya tanah longsor rendah dan indeks penduduk terpapar rendah, sehingga tingkat bahaya ancaman tanah longsor adalah RENDAH.
- g. Indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi, penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahaya bencananya SEDANG.
- h. Indeks ancaman wabah penyakit rendah dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya RENDAH.
- i. Indeks ancaman konflik sosial tinggi, dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya SEDANG

3. Tingkat Kerentanan

- a. Pengkajian risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan hutan dan lahan serta kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut adalah:



- i. 107.123 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas disekitar wilayah pesisir dengan penduduk terpapar sebesar 3.180 jiwa.
 - ii. 25.356 Ha lingkungan akan rusak
 - iii. 716 milyar kerugian ekonomi kerugian daerah
- b. Pengkajian resiko bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan lahan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tersebut adalah:
- i. 151.065 jiwa penduduk yang tinggal /beraktifitas wilayah Kabupaten Seruyan
 - ii. 8,056 Ha lingkungan akan rusak
 - iii. 14 milyar kerugian ekonomi
- c. Pengkajian resiko bencana kebakaran gedung dan rumah di wilayah Kabupaten Seruyan miliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
- i. 196 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. 49 unit rumah rusak berat
 - iii. Kerugian daerah rendah
- d. Pengkajian resiko bencana cuaca buruk (ekstrim) di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan ringan terhadap gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
- i. 2.536 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. Kerugian daerah rendah
- e. Pengkajian resiko bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitarnya,



kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kekeringan adalah:

- i. 12.455 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. 492 Ha kerusakan lingkungan
 - iii. 376 milyar kerugian daerah
- f. Pengkajian resiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil, baik terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor adalah:
- i. Sangat kecil penduduk terkena dampak
 - ii. 4.009 Ha kerusakan lingkungan
 - iii. 175 juta kerugian daerah
- g. Pengkajian resiko bencana kegagalan teknologi di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil baik terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kegagalan teknologi adalah:
- i. Sangat kecil penduduk terkena dampak
 - ii. Sungai Seruyan dan Danau Sembuluh
 - iii. Penduduk disekitar pabrik
- h. Pengkajian resiko bencana wabah penyakit di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar terhadap penduduk, terkait munculnya Pandemi Covid-19 sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 kasus, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang dan meninggal sejumlah 4 orang, termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana wabah penyakit adalah:
- i. Sangat kecil penduduk terkena dampak



- ii. Terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi
 - i. Pengkajian resiko bencana konflik sosial di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sedang baik terhadap penduduk, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana konflik sosial adalah:
 - i. Sangat kecil penduduk terkena dampak
 - ii. Lahan yang kena konflik
 - iii. Penduduk/pemilik lahan
4. Tingkat Kapasitas
- Berdasarkan capaian-capaian penanggulangan bencana selama ini, indeks ketahanan daerah berada pada level 2, yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan resiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/ atau kebijakan sistematis.
5. Berdasarkan analisis terhadap indeks tingkat ancaman, indeks kerugian, indeks penduduk terpapar dan indeks kapasitas, dapat diperoleh tingkat resiko bencana di Kabupaten Seruyan, yaitu:
- i. bencana banjir tingkat resikonya tinggi
 - ii. bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tingkat resikonya tinggi
 - iii. bencana kekeringan tingkat resikonya tinggi
 - iv. bencana cuaca buruk tingkat resikonya sedang
 - v. bencana kebakaran gedung dan rumah tingkat resikonya rendah
 - vi. bencana tanah longsor tingkat resikonya rendah
 - vii. bencana konflik sosial tingkat resikonya tinggi



- viii. bencana wabah penyakit tingkat resikonya tinggi
- ix. bencana kegagalan teknologi tingkat resikonya rendah
- x. bencana prioritas yang terdapat di Kabupaten Seruyan adalah banjir, kebakaran hutan, lahan dan gambut, kekeringan dan konflik sosial.

2.1.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebanyak 166.072 jiwa. Penduduk di Kabupaten Seruyan terdiri dari 87.776 orang laki-laki dan 78.296 orang perempuan, atau dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, dengan nilai sex rasionya mencapai 112. Jika dibandingkan dari sepuluh kecamatan yang berada di Kabupaten Seruyan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Seruyan Hilir yaitu sebanyak 38.530 orang, sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Suling Tambun, yaitu hanya sekitar 2.707 orang.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	LPP 2020-2022	Rasio Jenis Kelamin
1. Seruyan Hilir	38.530	1,74	
2. Seruyan Hilir Timur	9.486	1,81	
3. Danau Sembuluh	14.006	1,71	
4. Seruyan Raya	19.438	0,28	
5. Hanau	21.037	0,56	
6. Danau Seluluk	17.708	0,49	
7. Seruyan Tengah	24.251	1,28	
8. Batu Ampar	9.727	1,82	
9. Seruyan Hulu	9.182	0,17	
10. Suling Tambun	2.707	0,08	
Kabupaten Seruyan	166.072	1,11	112

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Tahun 2023

Ditinjau dari kepadatan penduduk, paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Hanau yaitu 38,32 orang/km² dan Kecamatan Danau Seluluk yaitu 30,22 orang/km². Kepadatan penduduk di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel II.4
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut di 10 (sepuluh) Kecamatan
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1.	Seruyan Hilir	4.320,10	28,40	38.530	23,20	8,27
2.	Seruyan Hilir Timur	1.323,42	8,70	9.486	5,71	6,64
3.	Danau Sembuluh	1.442,06	9,48	14.006	8,43	9,01
4.	Seruyan Raya	806,22	5,30	19.438	11,70	22,37
5.	Hanau	509,59	3,35	21.037	12,67	38,32
6.	Danau Seluluk	543,05	3,57	17.708	10,66	30,22
7.	Seruyan Tengah	1.245,83	8,19	24.251	14,60	18,05
8.	Batu Ampar	620,63	4,08	9.727	5,86	14,55
9.	Seruyan Hulu	3.024,07	19,88	9.182	5,53	2,81
10.	Suling Tambun	1.376,65	9,05	2.707	1,63	1,82
JUMLAH		15.211,62	100,00	166.072	100,00	10,12

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Tahun 2023

2.1.1.3. Potensi Sumber Daya

Kabupaten Seruyan memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertambangan dalam beberapa tahun ke belakang memiliki potensi yang besar, seperti batubara, zircon, biji besi, dan galena. Sejak moratorium Gubernur Kalimantan Tengah diterbitkan, seluruh perusahaan pertambangan, baik itu perusahaan yang saat ini sedang melangsungkan tahapan operasi produksi maupun eksplorasi, seluruhnya menghentikan aktivitas produksinya. Moratorium Gubernur tersebut menjadikan peranan sub sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Seruyan mengalami pertumbuhan negatif.

Potensi sumber daya Kabupaten Seruyan meliputi:

a. Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan Tahun 2022 terdiri dari lahan sawah 16.280 Ha dan bukan lahan sawah 989.128 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- Lahan Sawah:
 - Tadah Hujan : 5.166 Ha
 - Rawa Pasang Surut : 1.156 Ha



- Rawa Lebak : 913 Ha
- Ladang/Huma : 9.045 Ha
- Lahan Pertanian Bukan Sawah:
 - Tegal/Kebun : 54.923 Ha
 - Perkebunan : 376.516 Ha
 - Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 19.859 Ha
 - Padang Penggembalaan/Padang Rumput : 10.249 Ha
 - Hutan Negara : 15.679 Ha
 - Sementara Tidak Diusahakan : 470.147 Ha
 - Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll) : 41.755 Ha

Tabel II.5
Hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi sawah	2.849,50	11.013,08
2	Padi lahan kering / ladang	890	2.314,00
3	Jagung	76	196,61
4	Kacang tanah	8	8,83
5	Ubi kayu	38	613,40
6	Ubi jalar	29,25	321,66
Jumlah		3.890,75	14.467,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan

b. Perkebunan

Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 13.929,50 Ha, kelapa sawit seluas 705.418,46 Ha, kelapa dalam seluas 1.559 Ha, kopi robusta seluas 28 Ha, jambu mete seluas 139,50 Ha, aren 84 Ha, dan lada seluas 14,80 Ha sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.6
Hasil Komoditi Perkebunan
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Hektar)	Luas Panen (Hektar)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
1	Kelapa sawit	705.418,46	467.844,05	1.656.167,94	3,54
2	Karet	13.929,50	13.091,92	6.676,88	0,51
3	Kelapa dalam	1.559,00	1.165,50	1.422,42	1,22



No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Hektar)	Luas Panen (Hektar)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
4	Kopi robusta	28,00	1,28	2,75	3,15
5	Jambu mete	139,50	2,68	1,50	0,56
6	Aren	84,00	30,50	7,32	0,24
7	Lada	14,80	7,26	1,67	0,23
Jumlah		721.173,26	482.143,19	1.664.280,48	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan

Dari sisi produksi yang paling besar adalah kelapa sawit sebanyak 1.656.167,94 Ton, karet sebanyak 6.676,88 Ton, kelapa dalam sebanyak 1.422,42 Ton, kopi robusta 2,75 Ton, aren 7,32 Ton, jambu mete 1,50 Ton dan lada sebanyak 1,67 Ton. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama di Kabupaten Seruyan, hal tersebut tergambarkan dari jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak baik yang sudah berproduksi maupun pada tahap beroperasi, yaitu sebanyak 41 Perusahaan.

c. Perikanan

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Adapun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.7
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Sesuai dengan Jenis Komoditi Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	31,25
2	Nila	1.900,17
3	Patin	4.337,29
4	Lele	52,00
5	Betutu	10,42
6	Jelawat	552,22
7	Belida	20,80
8	Bandeng	7.246,61
9	Gabus	55,39
10	Belanak	932,41
11	Udang Api-Api	2.308,31
12	Udang Windu	11,54
Jumlah		17.458,41

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan



Tabel II.8
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Dengan Jenis Komoditi
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
	Perairan Laut	
1	Kerapu	-
2	Kakap Merah	260,785
3	Kakap Putih	316,111
4	Kurisi	-
5	Gulamah	472,685
6	Cucut	314,411
7	Pari	188,518
8	Bawal Hitam	176,882
9	Bawal Putih	206,700
10	Alu-alu/Pucul	223,874
11	Layang	70,272
12	Selar	136,968
13	Kuwe	-
14	Tetengkek	61,966
15	Daun Bambu	
16	Belanak	370,350
17	Kuro/Senangin	476,821
18	Julung-Julung	23,922
19	Teri	-
20	Japung	-
21	Tembang	-
22	Lemuru	-
23	Golok-golok	265,788
24	Terubuk	0,006
25	Kembung	179,796
26	Tenggiri Papan	188,591
27	Tengiri	212,598
28	Tongkol	376,453
29	Sebelah	146,271
30	Peperek	65,042
31	Biji Nangka	-
32	Gerot-gerot	-
33	Bambangan	-
34	Manyung	736,058
35	Talang-talang	450,951
36	Banyar	213,401
37	Selanget	193,342
38	Ikan Lainnya	1.157,187



No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
Perairan Laut Lainnya		
1	Rajungan	25,230
2	Kepiting	229,009
3	Udang Windu	978,410
4	Udang Putih	405,208
5	Udang Dogol	412,099
6	Udang Lainnya	1.106,194
7	Kerang Dara	-
8	Cumu-cumi	1.235,696
9	Sotong	50,114
10	Lainnya	-
Perairan Umum Daratan		
1	Jelawat	359,01
2	Lempan	-
3	Tawes	235,27
4	Patin/Jambal	834,05
5	Gabus	1.126,94
6	Lais	549,10
7	Toman	1.104,15
8	Sepat Rawa	227,01
9	Sepat Siam	172,79
10	Tambakan	237,12
11	Belida	120,83
12	Betutu	127,37
13	Nila	-
14	Gurame	313,30
15	Baung	823,14
16	Salab	495,43
17	Betok	270,13
18	Ikan Lainnya	2.172,68
19	Udang Galah	425,63
20	Udang Tawar	-
21	Udang Lainnya	-
JUMLAH		21.521,66

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

d. Peternakan

Pada tahun 2022 peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah sapi potong sebanyak 8.057 ekor, ternak kambing sebanyak 4.424 ekor, ternak babi sebanyak 4.396 ekor dan kerbau 52 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan



Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 95.413 ekor, dan itik 12.383 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

e. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, yang telah memproduksi adalah bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah utara Kabupaten Seruyan.

f. Pariwisata

Ada beberapa ragam jenis wisata potensial yang dapat dikembangkan secara terpadu antara lain meliputi:

i. Wisata Alam

- Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Seruyan Hilir yang dikenal dengan keindahan alam, flora dan faunanya yang mana salah satu flora yang ada di wilayah tersebut adalah orang utan.
- Kawasan wisata Pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir (Kelurahan Kuala Pembuang) dan wisata Sungai Bakau yang terletak Kecamatan Seruyan Hilir Timur (Desa Sungai Bakau).
- Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu.
- Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.



- Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki \pm 160 riam.
 - Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh
- ii. Wisata Budaya
- Pesta Tiwah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun
- iii. Wisata Sejarah
- Wisata ini yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Seruyan antara lain :
- Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
 - Sepundu (patung) timbal bagi arwah orang yang sudah meninggal dari suku dayak yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Seruyan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak



langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Seruyan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Seruyan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

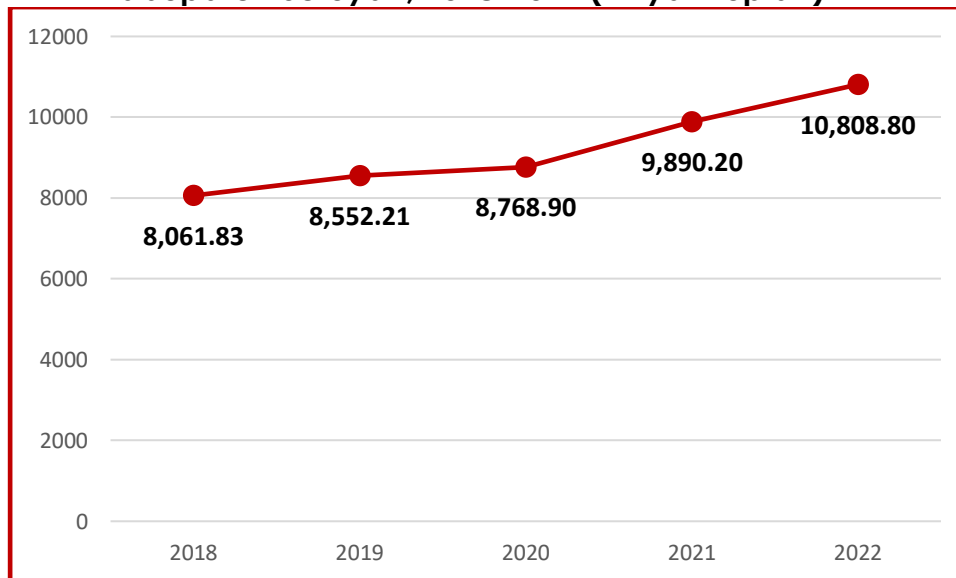
Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan lebih terarah. Angka PDRB dapat



digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pada umumnya, semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Grafik II.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Seruyan, 2018-2022 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Nilai tambah produksi yang mengindikasikan perekonomian Seruyan terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai tambah yang dapat dilihat melalui indikator PDRB ini mengalami progress positif dimana tahun 2018 memiliki nilai 8,06 trilyun rupiah dan meningkat signifikan hingga hampir mencapai 10,81 trilyun rupiah di tahun 2022.

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Seruyan tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan secara signifikan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Seruyan. Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Seruyan pada



tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi sebesar 38,13 persen di tahun 2022. sektor lain yang mendominasi perekonomian Seruyan adalah sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi dengan kontribusi masing-masing 31,92 persen dan 8,22 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,02%), jasa perusahaan (0,01%), dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,01%).

Tabel II.9
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,08	34,94	36,11	37,39	38,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,68	0,64	0,57	0,56
C	Industri Pengolahan	32,30	31,88	30,91	32,20	31,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	8,97	8,97	8,55	8,45	8,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,67	6,83	6,45	5,85	5,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2,22	2,27	2,42	2,19	2,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	1,21	1,21	1,10	1,07
J	Informasi dan Komunikasi	0,66	0,68	0,76	0,72	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,94	1,01	0,97	0,97
L	Real Estate	1,56	1,58	1,61	1,50	1,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,00	4,16	4,23	3,40	3,40
P	Jasa Pendidikan	3,41	3,51	3,70	3,41	3,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,49	1,55	1,49	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,84	0,81	0,73	0,73
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023



Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.

Laju pertumbuhan ekonomi di Seruyan mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hingga 2019. Namun sebagai dampak Pandemi COVID-19 maka perekonomian Seruyan mengalami kontraksi hingga sebesar -2,23 persen. Upaya pemulihan ekonomi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi COVID-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan hasil adanya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 2,12 persen pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 4,01 persen pada tahun 2022.

Pada tahun 2021 dan 2022, penanganan dan pemulihan dampak Pandemi terhadap perekonomian Seruyan terus dilaksanakan. Progres positif dialami hampir seluruh kategori lapangan usaha dalam pergerakan bidang di sektor pembangunan masing-masing. Sebagai sektor yang terdampak cukup berat pada tahun 2020, kategori industri pengolahan mampu bangkit dari keterpurukan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2022 mencapai 3,99 persen. Adapun pada sektor dominan



yakni pertanian memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 4,13 persen dimana pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,69 persen.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	5,56	-1,68	1,47	4,13
B	Pertambangan dan Penggalian	2,75	5,09	-1,23	-0,38	3,00
C	Industri Pengolahan	6,94	5,44	-4,58	2,44	3,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	3,32	5,88	2,67	1,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,44	2,76	-5,75	9,48	-7,28
F	Konstruksi	0,24	1,23	-6,40	7,47	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	4,74	-0,35	1,31	6,46
H	Transportasi dan Pergudangan	8,69	5,00	4,50	1,14	2,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	3,47	-0,28	0,98	4,07
J	Informasi dan Komunikasi	4,14	3,79	6,13	6,41	2,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	7,04	8,27	3,83	1,44
L	Real Estate	4,63	4,81	3,26	2,28	3,55
M,N	Jasa Perusahaan	4,14	4,43	-5,43	0,20	4,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	6,72	-0,92	-4,72	3,59
P	Jasa Pendidikan	5,07	6,77	6,30	1,77	0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,83	3,85	2,53	7,02	3,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,80	2,44	-2,05	0,05	4,74
Produk Domestik Regional Bruto		5,21	5,09	-2,23	2,12	4,01

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

b. PDRB per Kapita

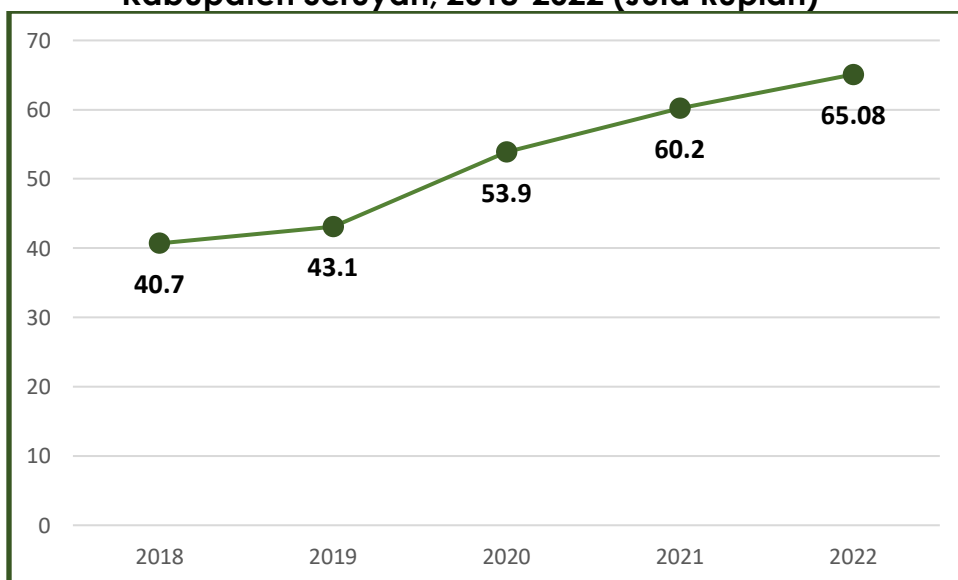
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah di capai suatu daerah adalah dengan menghitung pendapatan Per Kapitanya. Pendapatan Per Kapitanya



dihitung dengan membagi nilai nominal pendapatan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat.

Akan tetapi untuk menghitung nilai pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Seruyan (*Net Income Factor Abroad*). Dalam penghitungannya data ini sulit untuk didapatkan, oleh karenanya untuk gambaran kasar pendapatan Per Kapita digunakan PDRB Per Kapita sebagai pendekatan dalam mengukur rata-rata pendapatan penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB Per Kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita Seruyan mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 PDRB per kapita Seruyan sebesar 40,7 juta rupiah dan meningkat hingga mencapai 65,08 juta rupiah pada tahun 2022.

Grafik II.2
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Seruyan, 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023



c. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Indikator kemiskinan di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 disajikan berikut ini:

Tabel II.11
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	14,56	14,66	14,53	15,07	15,96
2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	428.539	454.971	504.264	529.892	571.049
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,43	7,19	6,85	7,22	7,43
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,09	1,26	0,87	1,12	1,25
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,27	0,31	0,16	0,25	0,36

Sumber: BPS RI, 2022

Data diatas menunjukkan peningkatan garis kemiskinan sampai mencapai Rp 571.049 per kapita per bulan. Kenaikan Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh harga-harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Dengan tingkat harga yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, garis kemiskinan pun ikut meningkat.

Berbeda dengan Garis Kemiskinan, kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan 2022 penduduk miskin di Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi dibanding tahun 2020 yaitu berada pada posisi 7,22 persen. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi



oleh dampak krisis dari pandemic Covid-19 yang masih belum sepenuhnya terpulihkan, beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya diantaranya yaitu perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan registrasi sosial ekonomi dan digitalisasi monografi desa/kelurahan khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrim.

Indikator kemiskinan lainnya yang dapat diukur dengan Garis Kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Pada Tahun 2022 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan sebesar 1,25, naik dari tahun 2021 yang berada pada angka 1,12.

Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan sebesar 0,36, mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang sebesar 0,25.

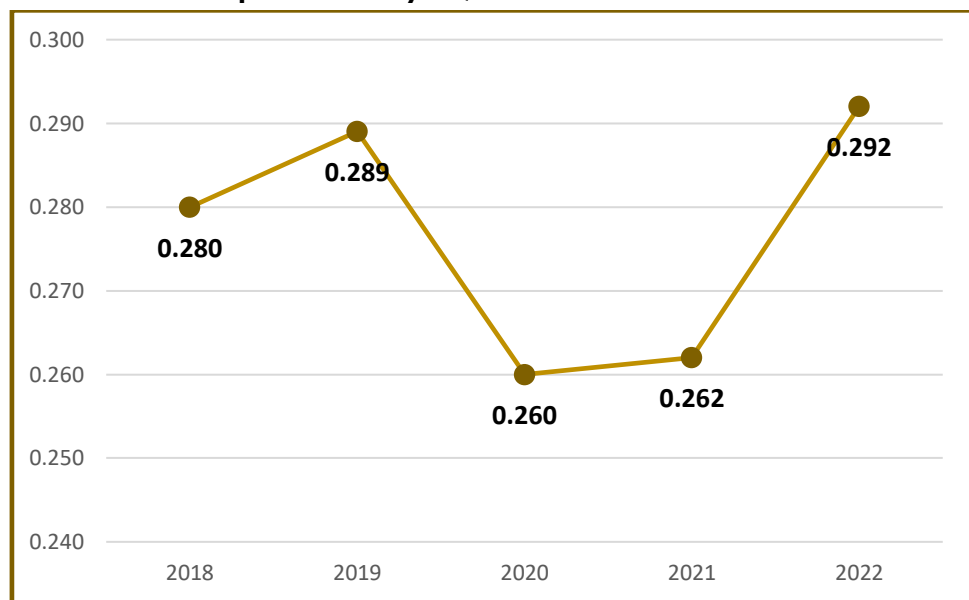
d. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat



secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini”, rasio ini menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Grafik II.3
Indeks Gini
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

Tingkat ketimpangan pendapatan (indeks gini) Kabupaten Seruyan setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi, yaitu pada Tahun 2018 nilai indeks gini Kabupaten Seruyan berada pada 0,280 dan pada Tahun 2019 naik menjadi 0,289 sementara pada tahun 2020 menjadi 0,260 dan 0,262 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 ini, angka indeks gini kembali meningkat menjadi sebesar 0,292. Meskipun mengalami fluktuasi, indeks gini tersebut masuk dalam kategori ketimpangan sedang, karena di bawah batas ketimpangan ($\leq 0,5$).



2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Seruyan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Seruyan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

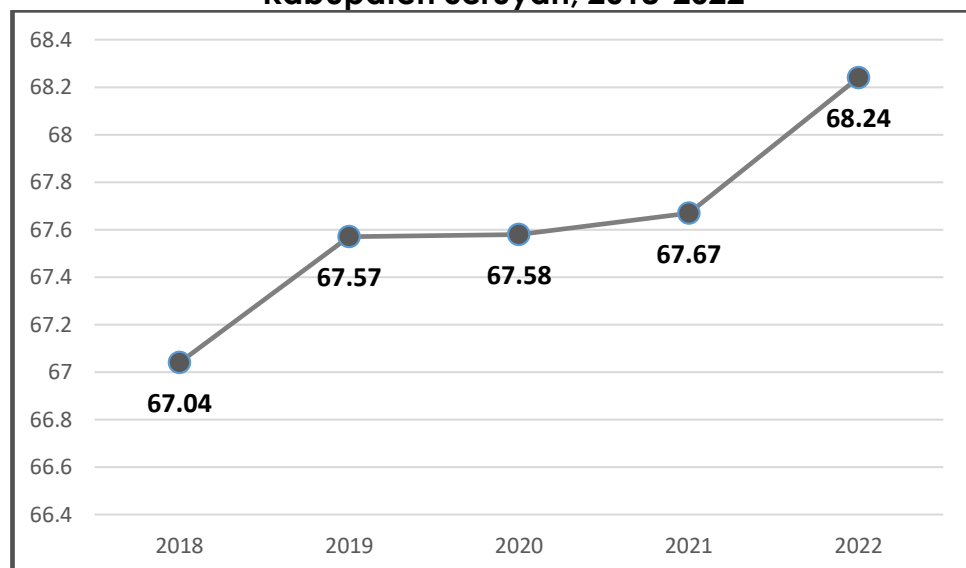
Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes* (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta



pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Data beberapa tahun menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 sebesar 67,04 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 68,24 pada Tahun 2022. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, IPM Kabupaten Seruyan masih dibawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional.

Grafik II.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

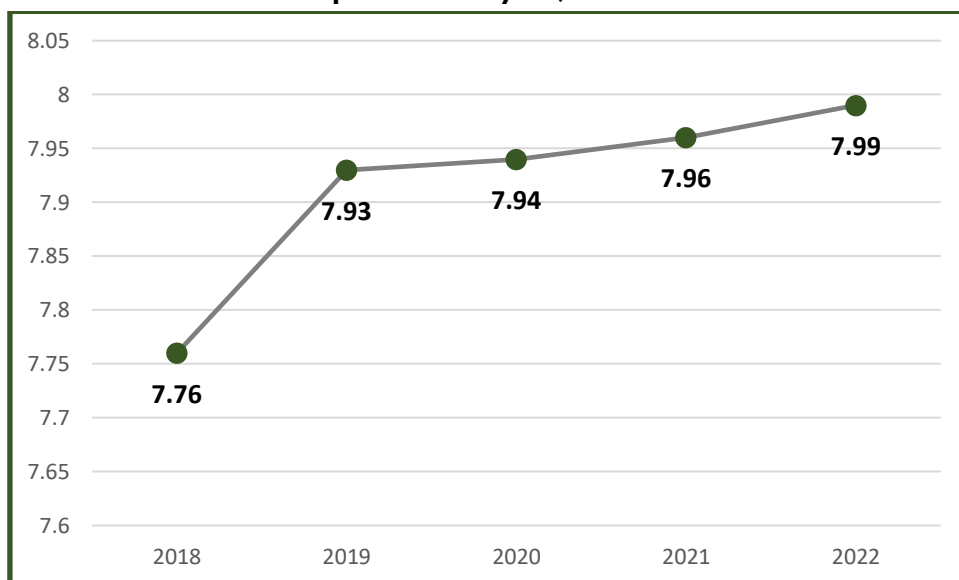
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang



dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kualitas pendidikan dari 7,76 tahun menjadi 7,99 tahun di tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Seruyan yang berumur 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 7,99 tahun atau telah menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2.

Grafik II.5
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



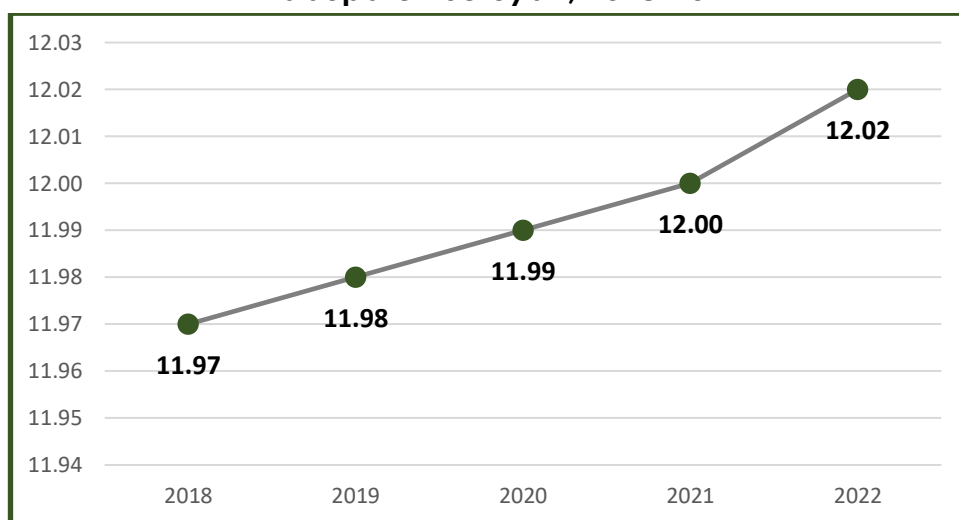
Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah



tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Grafik II.6
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

Peningkatan HLS terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2018 HLS sebesar 11,97 tahun dan pada 2022 meningkat hingga mencapai 12,02 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan masuk awal pendidikan perguruan tinggi.

Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sarana dan prasarana maupun infrastruktur sarana pendidikan di Kabupaten Seruyan sehingga perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik.



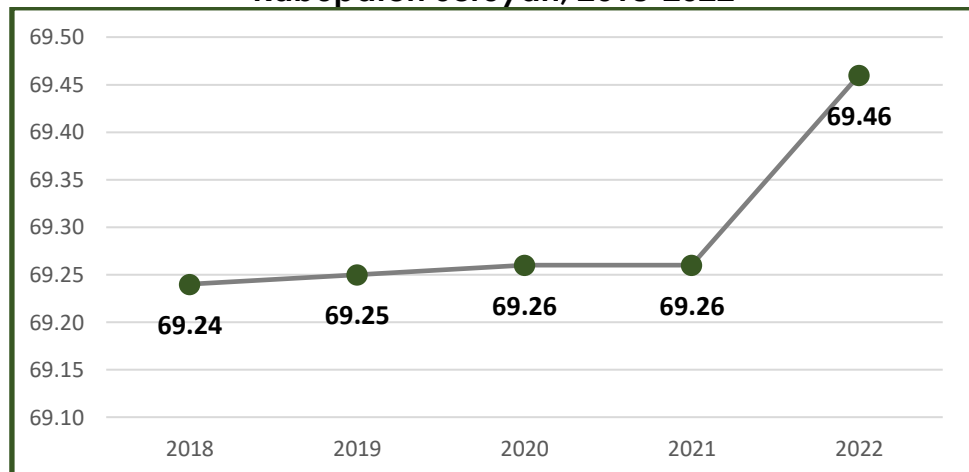
c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari sebesar 69,24 tahun pada tahun 2018 menjadi selama 69,46 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga mencapai kisaran usia 69-70 tahun.

Peran sektor kesehatan dalam pembangunan sangat mempengaruhi masyarakat sehingga perlu adanya upaya pemerintah secara serius untuk menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Grafik II.7
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

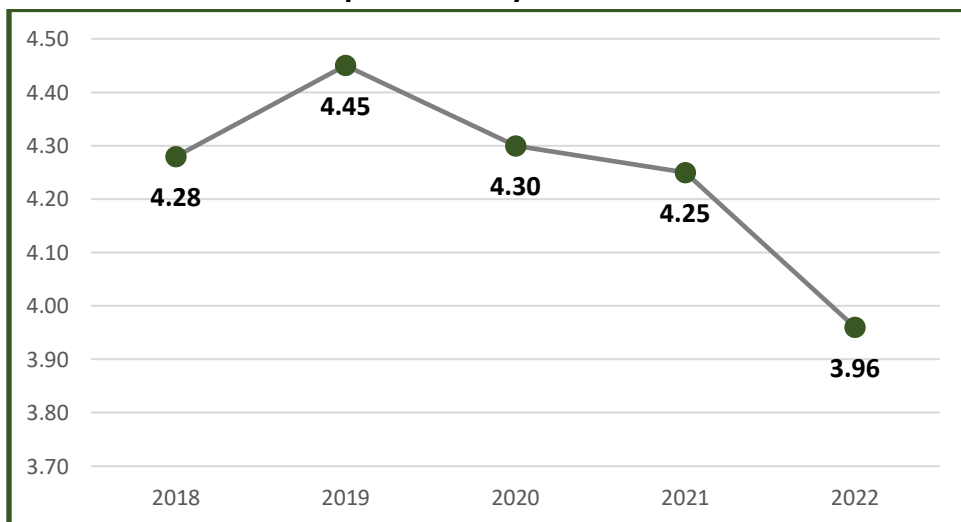


d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka menurut BPS terdiri dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan penduduk yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada Tahun 2018 sebesar 4,28 persen, namun pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 4,45 persen dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 kembali turun menjadi 4,30 persen dan 4,25 persen. Hingga pada tahun 2022 mengalami pengangguran terendah yang mencapai 3,96 persen. TPT Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional berada dibawah, dimana TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 sebesar 4,26 persen dan Nasional sebesar 5,86 persen.

Grafik II.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022



2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah ini mencakup bidang urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan indikator kinerja utama pembangunan 2024-2026 atau yang memiliki daya ungkit tinggi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut.

2.1.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100 persen.

Berdasarkan statistik, dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Angka melek huruf pada tahun 2018 sebesar 98,89 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 98,90 persen.



b. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Sejak tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Berdasarkan data, diketahui bahwa APK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 111,11 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,39 persen dan pada tahun 2020 naik kembali menjadi 116,48 persen, dan pada tahun 2022 sebesar 115,35 persen. Kondisi APK SD yang diatas 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk Kabupaten Seruyan yang bersekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Sedangkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa APK SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 101,39 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 70,54 persen, namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan hingga menjadi 95,03 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 13 sampai 15 tahun belum maksimal. Masih ada anak usia 13 sampai 15 tahun yang belum bersekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa



Kabupaten Seruyan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel II.12
Angka Partisipasi Pendidikan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Indikator Angka Partisipasi	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar					
APK SD/MI	111,11	93,39	116,48	114,94	115,35
APK SMP/MTs	101,39	70,54	87,42	93,68	95,03
Angka Partisipasi Murni					
APM SD/MI	95,60	92,39	97,99	98,24	98,74
APM SMP/MTs	74,75	64,91	81,28	89,53	89,57
Angka Partisipasi Sekolah					
APS SD	95,46	92,39	97,99	99,43	99,81
APS SMP	59,96	64,91	81,28	82,53	82,94

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 95,60 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,39 persen, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 98,74 persen. Melihat data tersebut dapat diartikan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2019 namun Kondisi tersebut bermakna bahwa anak usia sekolah SD/MI secara keseluruhan bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI.



Selanjutnya, untuk data APM SMP/MTs selama kurun waktu 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2018 sebesar 74,75 persen, meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 64,91 persen, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan hingga menjadi 89,53 persen dan 89,57 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan masih dijumpai anak putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar. Berikut APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022.

APS Sekolah Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, dimana APS Sekolah Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 95,46 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,23 persen, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 99,81 persen.

Selanjutnya data beberapa tahun terakhir diketahui bahwa APS untuk jenjang SMP di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 59,96 persen, dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus terjadi peningkatan hingga menjadi 82,94 persen.

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 Angka putus sekolah sebesar 0,03 persen, mengalami peningkatan pada



tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 0,40 persen dan 0,89 persen, namun pada tahun 2022 turun menjadi 0,44 persen.

Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2018 sampai dengan 2022 juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 0,80 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,93 persen, namun pada tahun 2022 turun menjadi 0,79 persen.

d. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 99,3 persen, namun pada tahun 2019 turun menjadi 96,98 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 98,53 persen, dan untuk tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 97 persen.

Selanjutnya untuk jenjang SMP/MTs angka kelulusan pada tahun 2018 sebesar 98,17 persen akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan 97,53 persen, namun pada tahun 2020 kembali naik 99,35 persen, dan untuk tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 97,55 persen.

e. Angka Melanjutkan

Dari data yang ada diketahui bahwa angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 angkanya sebesar 86,44 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 96,46 persen, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 95,97 persen, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 97,53 persen.

f. Fasilitas Pendidikan

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2021 terus mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 berjumlah 238 sekolah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 742 sekolah,



namun pada tahun 2021 terjadi penurunan kondisi bangunan baik sekolah menjadi 725 sekolah.

Indikator rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar mempunyai rumus jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun ditambah 13 s.d 15 tahun dikali dengan 10.000. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah pada tingkat pendidikan SMP dan sederajat. Selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan kondisi akhir tahun 2021 sebanyak 186.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Aadinya peningkatan jumlah peserta didik baik SD maupun SMP menyebabkan rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan dibanding tahun 2020.

Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijazah S1/D4 di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2021 menunjukan trend peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 83,56 persen, meningkat pada tahun 2019 menjadi 85,74 persen, dan kembali meningkat hingga tahun 2021 menjadi 100 persen.

Tabel II.13
Indikator Capaian Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

Indikator	2018	2019	2020	2021
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	173	421	519	475
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	65	97	223	250
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	127,05	124	122,56	186
SD/MI				
Jumlah Guru	1.418	1.471	1.467	1.471
Jumlah Murid	23.691	20.589	20.624	21.097
Rasio	59,85	71,44	71,13	69,73



Indikator	2018	2019	2020	2021
SMP/MTs				
Jumlah Guru	566	652	657	625
Jumlah Murid	7.722	7.596	7.251	8.497
Rasio	73,29	85,83	90,61	76,73
Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijazah S1/D4	83,56	85,74	87,68	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

2.1.3.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Seruyan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Kesehatan Bayi dan Balita

Bayi Berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Menurut WHO, BBLR dikelompokkan menjadi tiga group yaitu prematuritas, *intra uterine growth restriction* (IUGR) dan karena keduanya. BBLR sering digunakan sebagai indikator dari IUGR di negara berkembang karena tidak tersedianya penilaian usia kehamilan yang valid. BBLR ini berbeda dengan prematur karena BBLR diukur dari berat, sedangkan prematur diukur dari umur bayi dalam kandungan. BBLR belum tentu prematur, sementara prematur belum tentu BBLR kalau berat lahirnya diatas 2500 gram. Namun banyak kasus dengan kedua kondisi ini muncul bersamaan karena penyebabnya saling berhubungan.



Tabel II.14
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR
Dirujuk dan Bergizi Buruk Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Tahun	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk/Ditangani	
2018	3257	72	27	3
2019	3344	66	39	3
2020	3179	37	14	2
2021	3046	54	54	1
2022	3133	38	38	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2023

Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai status gizi balita biasanya dilakukan dengan Indek Massa Tubuh (IMT) yaitu pengukuran tubuh dibandingkan umur (BB/U atau TB/U). Hasil perhitungan ada 4 kategori yaitu gizi lebih (z-score $>+2$ SD); gizi baik (z-score $-SD$ sampai $+2$ SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai -3 SD); dan gizi buruk (z-score < -3 SD).

Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun pada usia berikutnya kebutuhan gizi terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering terluputan dari pengamatan.

Dalam hal kasus balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan yang ditemukan terjadi penurunan kasus, pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 3 balita gizi buruk sedangkan tahun 2020 ditemukan serta ditangani sebanyak 2 balita gizi buruk dan 1 balita gizi buruk pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 tidak ada lagi balita gizi buruk. Kasus gizi buruk tersebut mendapatkan perawatan oleh masing-masing Puskesmas dengan cakupan 100 persen.

Status Gizi terdiri dari Stunting, Wasting dan Underweight yang dapat dilihat dari jumlah dan persentasenya, pada tahun 2019 jumlah Stunting sebanyak 1250 anak dengan persentase 24,36



persen, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 831 anak atau 10,69 persen selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 779 anak atau 17,51 persen. Sedangkan untuk Wasting pada tahun 2019 sebanyak 644 anak atau 12,55 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 418 anak atau 5,38 persen dan tahun 2021 turun lagi menjadi 363 atau 8,16 persen, dan untuk Underweight pada tahun 2019 sebanyak 900 anak atau 17,54 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 543 anak atau 6,69 persen dan tahun 2021 naik menjadi 900 atau 20,23 persen. Adapun pada tahun 2022, jumlah Balita Stunting menurun menjadi 547 anak, Balita Wasting turun menjadi 168 anak dan Balita Underweight turun menjadi 345 anak.

Tabel II.15
Status Gizi Balita Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Stunting	1235	1250	831	779	547
Wasting	752	644	418	363	168
Underweight	810	900	543	900	345

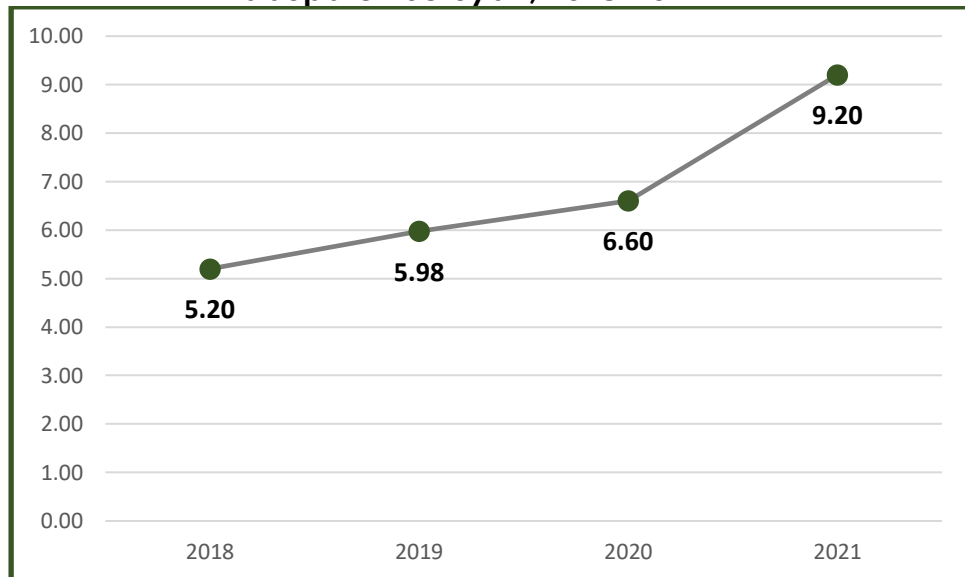
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

AKB Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 5,2 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga menjadi 5,98 per 1.000 kelahiran hidup kemudian pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan AKB yang dilaporkan 9,2 per 1.000 kelahiran hidup.



Grafik II.9
Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Seruyan, 2018-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Formulasi Angka kelangsungan hidup bayi = $(1 - \text{angka kematian bayi (AKB)})$. Pencapaian AKB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi) menunjukkan tren fluktuatif, dimana pada tahun 2018 AKB sebesar (993,73), 2019 (994,22) dan capaian tahun 2021 (990,08).

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan perempuan. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi



yang lazim muncul seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidak setaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018 sebesar 5 dengan AKI sebesar 2.643 per 100.000 kelahiran hidup, akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga menjadi 8 dengan AKI sebesar 3.332 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 menunjukkan perbaikan, ditandai dengan adanya penurunan AKI menjadi 2 dengan AKI sebesar 3.075 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan pada periode sebelumnya, namun pada tahun 2022 naik kembali menjadi 5 dengan AKI sebesar 3.133 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada Tahun 2022 Angka Kematian Ibu bila dilihat dari persentasenya sebesar 159,59 persen atau 5 Kasus Kematian Ibu. Penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Seruyan diantaranya yaitu Ekslamsia, HPP, HPP ec, Retensio Plasenta, Syok hipovolemik ec Replas dan Gangguan Peredaran darah.

Tabel II.16
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Absolut	5	8	2	8	5
Jumlah kelahiran Hidup	2.643	3.332	3.075	3.247	3.133
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	133,87	257,1	131,2	246,4	159,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2023

c. Fasilitas Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan



tingkatan pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan Pemerintahan Daerah setempat.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebanyak 12 unit, dengan rincian jumlah Puskesmas perawatan 7 unit dan Puskesmas non perawatan 5 unit. Selain itu, Kabupaten Seruyan memiliki 16 unit Puskesmas keliling dan 82 unit Puskesmas pembantu (Pustu). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas adalah rasio Puskesmas per 10.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 10.000 penduduk pada tahun 2022 di Kabupaten Seruyan sebesar 0,78 (dibulatkan 1). Cukup ideal sesuai dengan Standar Nasional 1 Puskesmas melayani 10.000 penduduk. Selain itu, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,60 dan 0,57 per 1.000 penduduk dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,54 dan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,62 dan 0,78 per 1.000 penduduk.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas untuk wilayah Kabupaten Seruyan, beberapa Puskesmas non perawatan diupayakan tahun ke depan ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas perawatan.

Tabel II.17
Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 Penduduk	0,60	0,57	0,54	0,62	0,78
• Puskesmas per 1.000 Peduduk	0,06	0,06	0,058	0,073	0,080



Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
• Poliklinik per 1.000 Penduduk	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07
• Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk	0,43	0,46	0,38	0,46	0,53
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	50	75	200	163	201
Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Penduduk	158.231	147.712	151.065	154.583	166.072
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	0,32	0,51	1,32	1,05	1,34
Rasio dokter per satuan penduduk (Per 1.000 penduduk)	0,26	0,17	0,20	0,43	0,49
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	3,55	3,46	6,62	4,16	4,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2023

Data menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 ke tahun 2022, disertai dengan adanya peningkatan tempat tidur rumah sakit yang jumlahnya tiap tahun meningkat. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan rasio tempat tidur dari 0,32 meningkat menjadi 1,34 per 1.000 penduduk.

Pada indikator yang lain, Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 0,26 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,17 per 1.000 penduduk, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga menjadi 0,49 per 1.000 penduduk. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 3,55 per 100.000 penduduk, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada Tahun 2022 mencapai 4,48 per 100.000 penduduk.



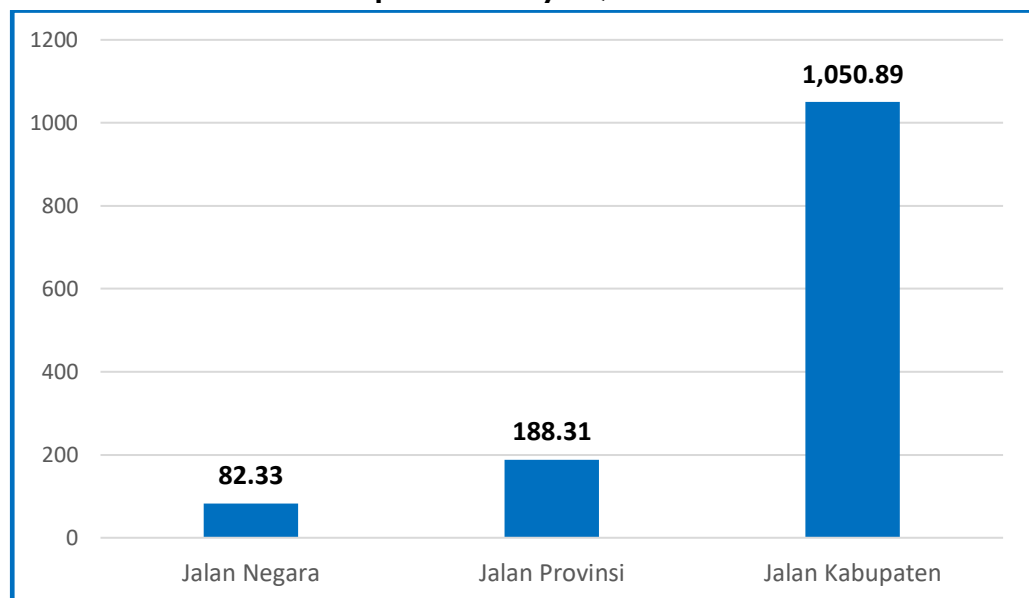
2.1.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat Seruyan. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Seruyan masih memerlukan perbaikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan. Adapun panjang jalan negara sepanjang 82,33 km, jalan provinsi mencapai 188,31 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.050,89 km.

Grafik II.10
Panjang Jalan Menurut Status Jalan
Kabupaten Seruyan, 2022



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2023



Tabel II.18
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	175,86	188,92	213,03	224,58	239,95
2.	Panjang Jalan Kondisi Sedang (Km)	106,08	55,57	141,15	186,40	181,02
3.	Panjang Jalan Kondisi Rusak (Km)	769,02	803,81	696,71	639,91	629,82
4.	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik (%)	16,73	17,98	20,27	21,37	22,83

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, dimana Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 16,73 persen, dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 menjadi 22,83 persen.

Terlihat panjang jalan terpanjang berada di Kecamatan Seruyan Hilir yang mencapai 260,83 km dan Kecamatan Seruyan Tengah dengan panjang 225,45 km. Sedangkan panjang jalan terpendek berada di Kecamatan Suling Tambun dengan panjang jalan sepanjang 20,00 km.

Tabel II.19
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1.	Seruyan Hilir	73,71	25,75	161,37	260,83
2.	Seruyan Hilir Timur	26,76	60,80	33,70	121,26
3.	Danau Sembuluh	17,30	2,50	12,44	32,24
4.	Seruyan Raya	31,85	-	33,15	65,00
5.	Hanau	11,90	5,40	17,70	35,00
6.	Danau Seluluk	15,24	8,32	46,30	69,86
7.	Seruyan Tengah	49,99	54,10	121,36	225,45
8.	Batu Ampar	13,20	24,05	18,55	55,80
9.	Seruyan Hulu	-	0,20	165,25	165,45
10.	Suling Tambun	-	-	20,00	20,00
Jumlah		239,95	181,12	629,82	1.050,89

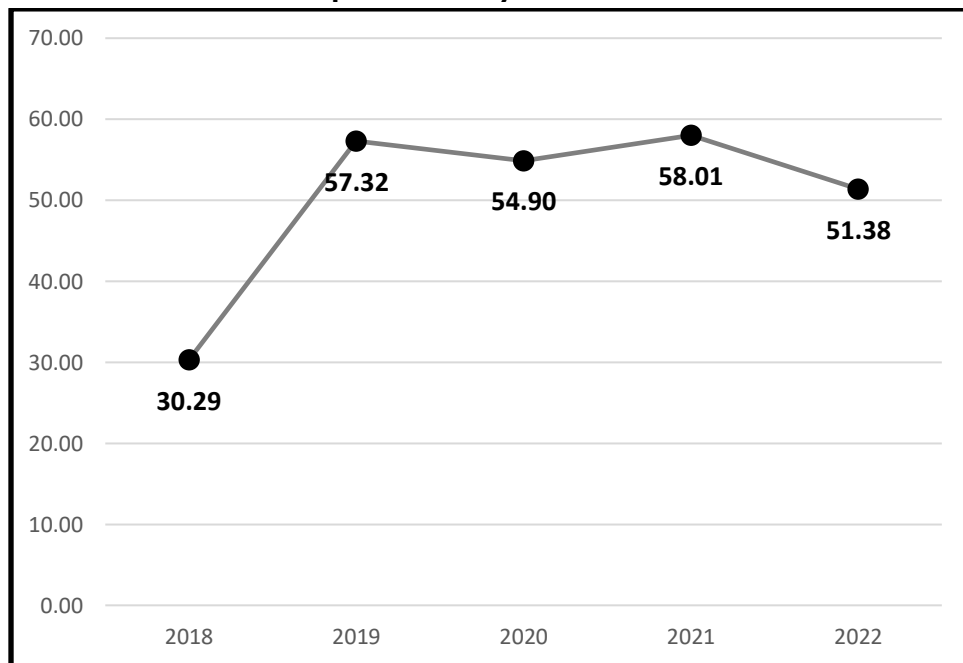
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2023



b. Sanitasi Rumah Tangga dan Capaian Air Minum Layak

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 30,29 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 57,32 persen, dan tahun 2021 persentase rumah tinggal bersanitasi menjadi 58,01 persen. Namun pada tahun 2022, rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan menjadi 51,38 persen. Ini dikarenakan adanya penambahan jumlah rumah tangga setiap tahunnya sebesar 4-5 persen, sedangkan anggaran untuk bantuan akses sanitasi setiap tahun menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan rata-rata hanya mampu kurang dari 1 persen pertahunnya dari jumlah rumah tangga pertahunnya.

Grafik II.11
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Seruyan, 2018-2022



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan, 2023

Sedangkan capaian air minum layak pada tahun 2022 mencapai 36,35 persen baik itu melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel II.20
Capaian Air Minum Layak
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Jaringan Perpipaian	3.699	3.699	4.457	9.011
2.	Bukan Jaringan Perpipaian	1.500	1.950	1.950	8.669
3.	Jumlah	5.199	5.649	6.407	17.680
4.	Target	48.640	48.640	48.640	48.640
5.	Persentase	10,69%	11,61%	13,17%	36,35%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2023

c. Irigasi dan Penataan Ruang

Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2018 sebesar 19,32 persen dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 30,2 persen pada tahun 2021.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 0,2 persen dan tahun 2019 menjadi 2,33 persen, pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,4 persen. Sedangkan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 12,05 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 13,23 persen dan tahun 2021 sebesar 14,44.

Tabel II.21
Irigasi, Ruang Terbuka Hijau, dan Rasio Bangunan ber-IMB
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Jaringan Irigasi	19,32	22,5	22,8	30,2
2.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,2	2,33	2,33	2,4
3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	12,05	13,23	14,05	14,44

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2022

Sedangkan progress penyusunan RDTR Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.22
Monitoring Progress RDTR
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022

No. PERDA RTRWK	RTRWK DAN RENCANA RDTR DALAM RTRWK	RDTR YANG DISUSUN	KECAMATAN	TAHUN	PROGRESS	SUMBER DANA
-	Kota Kuala Pembuang di Kecamatan Seruyan Hilir	RDTR BWP Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur	Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2019	1. Telah memperoleh Validasi KLHS 2. Asistensi ke 11 dengan BIG terkait Peta Dasar 3. Proses Asistensi Muatan Teknis dengan Kementerian ATR/BPN	APBD Kab. Seruyan
-	Kota Rantau Pulut di Kecamatan Seruyan Tengah	RDTR BWP Kecamatan Seruyan Tengah	Kecamatan Seruyan Tengah	2020	1. Telah memperoleh Validasi KLHS 2. Asistensi ke 5 dengan BIG terkait Peta Dasar 3. Proses Asistensi Muatan Teknis dengan Kementerian ATR/BPN	APBD Kab. Seruyan
-	Kota Pembuang Hulu di	RDTR Kawasan Perkotaan	Kecamatan Hanau	2021	1. Telah memperoleh	Bantek Kementerian



No. PERDA RTRWK	RTRWK DAN RENCANA RDTR DALAM RTRWK	RDTR YANG DISUSUN	KECAMATAN	TAHUN	PROGRESS	SUMBER DANA
	Kecamatan Hanau	Kecamatan Hanau			Validasi KLHS 2. Telah Memperoleh BA Rekom BIG terkait Peta Dasar 3. Telah keluar Persub tgl 11 Oktober 2022	ATR/BPN
-	Kota Asam baru di Kecamatan Danau Seluluk	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Danau Seluluk	Kecamatan Danau Seluluk	2022	1. Penyusunan Materi Teknis	APBD Kab. Seruyan
5 TAHUN 2019	Penyusunan Revisi (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan					



2.1.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Seruyan adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, dimana Rasio rumah layak huni pada tahun 2018 sebesar 47,92 persen, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 54,56 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 52,57 persen, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 63,00 persen. Sedangkan Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 46,07 persen, meningkat pada tahun 2019 menjadi 49,91 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 48,21 persen, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 57,10 persen.

Tabel II.23
Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio rumah layak huni	47,92	54,56	52,57	53,90	63,00
2.	Rasio permukiman layak huni	46,07	49,91	48,21	54,68	57,10

Sumber: Disperkimtan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

2.1.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Secara umum rasio jumlah linmas mengalami peningkatan yang mengindikasikan peningkatan proteksi masyarakat dari tindak pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Seruyan.



Tabel II.24
Rasio Jumlah Linmas
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Linmas	702	708	730	863	970
2.	Jumlah penduduk	158.231	147.712	151.065	154.583	166.072
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	44,37	47,93	48,32	55,86	58,41

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Dari segi kebencanaan daerah, Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki kategori risiko bencana Tinggi dengan skor Indeks Risiko Bencana sebesar 144,40. Kondisi ini dipicu oleh risiko kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 36,0 dengan kelas risiko Tinggi. Selain itu, Seruyan memiliki risiko berupa gelombang ekstrem dan abrasi dengan skor 24,00 dan berstatus kelas risiko Tinggi dan juga risiko bencana Tinggi cuaca ekstrim dengan skor 13,60.

2.1.3.6. Sosial

Sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sebanyak 8 Unit (LKSA Hj. Maskacil, Al mustaghfirin, Pesantren Asseruyaniyah, Darul Mukmin, Pa Aladin Seruyan Hilir, Hidayatul Amin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul tolibin Seruyan Raya) dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menurun, LKSA berkurang karena sudah tidak aktif lagi sebanyak 4 unit yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al mustaghfirin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul tolibin Seruyan Raya.

Tabel II.25
Rasio Jumlah LKSA dan PMKS
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	8	4	4	4	4
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	26.876	5.401	6.558	29.147	79.673

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang memperoleh bantuan pada tahun 2018 yang diserahkan untuk bencana banjir sebanyak 26.876 Jiwa, tahun 2019 bantuan diserahkan untuk 5.401 Jiwa di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh, dan untuk tahun 2020 bantuan diserahkan kepada 6.558 Jiwa, dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 79.673 jiwa, hal ini dikarenakan adanya musibah Bencana Banjir dan Covid-19.

2.1.3.7. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun (kasus) pada tahun 2018 tercatat 14 kasus dan tahun 2019 tercatat 339 kasus, dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 133 kasus dan 103 kasus. Masih adanya cukup banyak kasus sengketa ini menunjukkan bahwa masih perlu pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha di Kabupaten Seruyan.

Lowongan kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 Mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar 121 turun menjadi 8 pada tahun 2019 dan naik kembali menjadi 70 lowongan di Tahun 2020 kemudian semakin naik pada Tahun 2022 menjadi 3542 lowongan terdaftar, Begitupun dengan pencari Kerja Terdaftar mengalami flutuasi dari 277



tahun 2018 naik menjadi 747 tahun 2019 dan turun menjadi 50 orang Tahun 2020, dan pencari kerja terdaftar Tahun 2022 menjadi 176.

Hal yang sama terjadi pada pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022, yaitu 6 orang pada tahun 2018, naik jadi 16 orang tahun 2019 dan turun kembali menjadi 13 orang pada tahun 2020, pada tahun 2022 pencari kerja yang ditempatkan menjadi 252 orang.

Tabel II.26
Capaian Pembangunan Ketenagakerjaan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	14	339	133	133	103
2.	Pencari Kerja					
	Lowongan kerja terdaftar	121	8	70	1445	3542
	Pencari kerja terdaftar	277	747	50	554	176
	Pencari kerja ditempatkan	6	16	13	2	252
	Bursa kerja swasta	0	0	0	0	0
	Jumlah pengantar kerja	0	0	0	0	0
3	Hubungan Industrial					
	Jumlah Mediator	0	0	0	1	2
	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	13	2	12	21	25
	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5	2	2	6	10
	Jumlah SP / SB	11	9	40	40	41
	Jumlah Lembaga Bipartit	21	23	24	30	26

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Perangkat hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2018 hingga 2020 dengan jumlah mediator yang masih kosong dikarenakan belum inpassing sebagai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, pada tahun 2022 ada dua jumlah mediator industrial. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2018 ada 13 peraturan dan pada tahun 2019 turun menjadi 2 peraturan dan kembali naik menjadi 12 peraturan Tahun 2020 dan naik lagi menjadi 25 Peraturan pada Tahun 2022. Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) pada Tahun 2018 sebanyak 5 perjanjian, Tahun 2020 sebanyak 2 Perjanjian dan Tahun 2022 sebanyak 10 Perjanjian.



Jumlah Serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2018 sebanyak 11 perusahaan, dan pada tahun 2019 menjadi 9 perusahaan, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 menjadi 40 dan 41 Perusahaan. Jumlah lembaga bipartit di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebanyak 21 lembaga naik pada tahun 2019 sebanyak 23 lembaga dan naik menjadi 26 pada Tahun 2022.

2.1.3.8. Lingkungan Hidup

Berdasarkan data penanganan sampah yang tertangani masih fluktuatif dan pada tahun 2022 penanganan sampah meningkat menjadi 71 persen. Hal ini harus menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Meskipun begitu, peningkatan penanganan sampah ini merupakan progress positif dimana hal ini terlihat juga dari peningkatan persentase TPA per satuan penduduk yang meningkat menjadi 71.

Tabel II.27
Penanganan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penanganan Sampah	16,53	51	51	70	71
2.	Persentase Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	82	98	62	71	71
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	54,98	96,70	69,34	68,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlihat pada tahun 2022, angka indeks kualitas lingkungan hidup masih berada pada angka 68,86 (sedang) hal ini disebabkan oleh keterbatasan data IKL yaitu data tentang ruang terbuka hijau dan data tutupan lahan serta ada 2 (dua) sampel yang parameternya tidak terbaca yaitu parameter Nitrat.



2.1.3.9. Kelautan dan Perikanan

Statistik produksi perikanan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah produksi perikanan mencapai 30.917,71 ton dan pada tahun 2019 naik mencapai 32.158,67 ton, pada tahun 2020 naik menjadi 35.276,92 ton dan tahun 2021 naik menjadi 40.786,75 ton dan tahun 2022 menjadi sebesar 43.544,96 ton. Oleh karena itu, terlihat laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 4 persen, pada tahun 2019 menjadi 4,6 persen Tahun 2020 sebesar 6,70 Persen, dan terakhir pada Tahun 2021 dan 2022 dengan besaran sama mencapai 8,80 persen.

Tabel II.28
Produksi Perikanan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton):	36.604,09	37.845,05	39.395,91	41.586,75	43.544,96
	- Produksi Perikanan Budidaya	11.148,03	12.165,69	14.457,88	15.849,15	17.458,41
	- Produksi Perikanan Tangkap	19.769,68	19.992,98	20.819,04	21.596,39	21.521,66
	- Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5.686,38	5.686,38	4.118,99	4.141,21	4.564,89
2.	Laju Pertumbuhan Produksi perikanan (%)	4	4,6	6,7	8,8	8,8
3.	Jumlah Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	46,95	52,24	52,50	57,46	58,31

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Dari sisi konsumsi ikan, diketahui bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan, dimana konsumsi ikan pada tahun 2018 sebesar 46,95 kg/kap/tahun, dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2022 mencapai 58,31 kg/kap/tahun. Selain itu, terdapat jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dengan total 4.564,89 ton dengan capaian tertinggi pada produk olahan ikan kering yang mencapai 2.562,01 ton.



Tabel II.29
Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Dengan Jenis Produk Olahan Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Jenis Produk Olahan	Jumlah (Ton)
1	Udang Ebi	491,21
2	Ikan Kering	2.562,01
3	Kerupuk Ikan Pipih	83,41
4	Kerupuk Ikan Tengiri	156,63
5	Kerupuk Ikan Gabus	75,52
6	Terasi	87,13
7	Udang Laut Segar (Udang Putih, Brown, Kapur dll)	973,58
8	Udang Galah	135,40
Jumlah		4.564,89

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

2.1.3.10. Pertanian

Dari sisi ekonomi makro, pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan sebagainya memiliki andil yang sangat signifikan pada pembangunan ekonomi Seruyan. Hal ini terlihat dari dominasi struktur ekonomi pertanian pada nilai tambah produk Seruyan hingga mencapai 37,28 persen pada tahun 2021 yang menggambarkan perekonomian daerah secara umum. Meskipun begitu, pertumbuhan sektor pertanian masih belum optimal dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -1,67 persen dan pada masa pemulihan tahun 2021 baru mencapai 1,09 persen.

Tabel II.30
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (dalam arti luas) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,08	34,94	36,11	37,28
2.	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,44	5,56	-1,67	1,09

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan Tahun 2022

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018-2022 menunjukkan trend peningkatan. Dimana pada tahun 2018 Produktivitas padi atau bahan



pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 142,06 persen, dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 menjadi 155,57 persen. Pada cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 100 persen, dan pada tahun 2022 menjadi 85,50 persen. Penurunan ini disebabkan oleh bencana banjir yang mengakibatkan gagal tanam dan juga hama penyakit tanaman yang menyebabkan gagal panen serta pandemi covid-19, sehingga memerlukan perlakuan khusus mengingat pertanian merupakan komoditas unggulan Seruyan. Beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk membina kelompok tani yakni melalui pengembangan SDM, pengembangan modal, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha.

Tabel II.31
Produktivitas Pertanian dan Cakupan Bina Kelompok Tani
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produktivitas padi atau Bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	142,06	144,56	145,07	155,02	155,57
2.	Cakupan bina kelompok petani	100	85	85	85,50	85,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2023

2.1.3.11. Perindustrian

Sebagai upaya peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor primer yang ada di Kabupaten Seruyan, termasuk didalamnya peningkatan kualitas usaha mikro kecil khususnya industri mikro kecil, maka Kabupaten Seruyan memiliki program kebijakan khusus dalam pengembangan perindustrian daerah. Upaya peningkatan kapasitas perindustrian juga terlihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam mengelola barang dan jasanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai tinggi. Terlihat cukup tingginya dominasi industri pengolahan terhadap struktur ekonomi Seruyan hingga mencapai 32,04 persen di tahun 2021. Terlebih dengan adanya pemulihan dampak Pandemi COVID-19, maka pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya (tahun 2020) mengalami



kontraksi mengalami pertumbuhan ekonomi kembali hingga mencapai 2,43 persen. Meski belum berada pada kondisi normal, namun upaya pemulihan perekonomian daerah ini cukup memiliki progress positif.

Tabel II.32
Cakupan Pembangunan Ekonomi Sektor Perindustrian
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan	32,30	31,88	30,91	32,04
2.	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,94	5,44	-4,57	2,43

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan Tahun 2022

2.1.3.12. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan beserta seluruh elemen yang tergabung di dalamnya memiliki peran utama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, setiap unsur pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan baik dari segi capaian teknis maupun administrasi.

Beberapa capaian positif yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan pembangunan dapat terlihat dari beberapa poin penting pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah. Terlihat pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan berada pada kategori B dengan nilai 62,25 pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2020 dengan nilai 60,19 dengan kategori yang sama yakni B.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP (Nilai SAKIP) Pemerintah Kabupaten Seruyan beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2018 mendapatkan predikat B



dengan nilai 60,47 Poin dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi B dengan nilai 63,81 Poin.

Pada pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka terlihat tingginya capaian indeks kepuasan masyarakat Seruyan terhadap layanan publik oleh pemerintah. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Seruyan yang mencapai 87,59 pada tahun 2021 menjadi bukti meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat meskipun masih perlu adanya pembenahan di beberapa layanan, khususnya yang bisa dioptimalkan melalui teknologi informasi.

Dari sisi pengawasan penggunaan keuangan daerah, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mendapatkan opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan peningkatan temuan BPK yang ditindaklanjuti. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas Seruyan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai peraturan yang berlaku.

Pada sisi perencanaan pembangunan, maka setiap tahapan pembangunan Kabupaten Seruyan telah merumuskan berbagai dokumen perencanaan yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan dari level visi, misi pembangunan daerah hingga indikator kinerja daerah, khususnya sebagai indikator program pembangunan daerah. Dokumen perencanaan jangka panjang RPJPD Seruyan telah disusun termasuk juga turunannya yakni dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Selain itu juga setiap perangkat daerah telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja di setiap tahunnya.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah akan menunjukkan potensi,



kekhasan, dan unggulan daerah dalam rangka akselerasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Seruyan.

2.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi Rumah Tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel II.33
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Konsumsi Makanan	52,72	51,33	52,72	57,05
2.	Konsumsi Non Makanan	47,28	48,67	47,28	42,95

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2022

2.1.4.2. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Salah satu indikator penting yang banyak digunakan untuk memberi gambaran mengenai aman atau kondusifnya sebuah daerah, yaitu angka kriminalitas. Semakin kecil angka kriminalitas, maka dapat diasumsikan bahwa daerah tersebut aman dan dapat menarik berbagai aktifitas masyarakat, terutama dalam melakukan investasi.

Angka kriminalitas di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Bila ditinjau dari jumlah maupun angka kriminalitas, keduanya menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020 angka kriminalitas mencapai 5,33 persen dan jumlah kriminalitas sebanyak 79 kasus.



Tabel II.34
Angka kriminalitas
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kriminalitas (kasus)	58	61	69	79
2.	Angka Kriminalitas yang Tertangani (%)	3,96	4,12	4,65	5,33

Sumber: Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.4.3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2018 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Seruyan sebesar 46,00 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46,10 orang, pada tahun 2020 sebesar 44,24 persen dengan tanggungan orang sebanyak 46,33 orang. Hingga pada tahun 2021 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Seruyan menjadi sebesar 43,60 persen artinya adalah Kabupaten Seruyan mempunyai tanggungan sebanyak 50,60 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.



Tabel II.35
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	42.050	41.255	41.551	44.978
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	4.055	3.988	4.780	5.622
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	46.105	45.243	46.331	50.600
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	100.231	102.469	104.734	107.648
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	46,00	44,15	44,24	43,60

Sumber: Disdukapil dan Disnakertrans Kabupaten Seruyan

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.



Tabel II.36
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Persentase penduduk miskin	Persen	7,19	6,85	7,22	5,28
2	Angka Melek Huruf	Persen	98,87	98,87	98,9	98,92
3	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,75	7,79	8,68	8,94
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,62	12,33	12,32	12,51
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,25	69,26	69,26	69,26
6	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	71,09	65,04	71	85,74
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	89,46	89,44	89,16	89,16
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	70,07	70,07	63,2	63,2
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,92	6,95	7,46	7,41
10	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Skor pola pangan harapan	Poin	92,5	84,70	85,40	80,10
12	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen	n.a	n.a	80,34	80
13	Kontribusi sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	37,04	37,55	0,8	0,9
14	Produksi sektor pertanian	Ton	n.a	n.a	87,31	90,86
15	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	37,04	37,04	36,3	37,6
16	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	31,38	32,8	33,18	32,04
17	Kontribusi Agroindustri terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1,31	1,62	0,89	0,75
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,14	0,14	0,15	0,25



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
19	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,48	6,82	6,82	6,82
20	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	32,56	31,88	30,92	32,04
21	Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	Persen	2,29	2,89	-4,49	1,76
22	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jiwa	5.401	6.558	29.147	79.673
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78,64	81,85	82,97	83,85
24	Nilai SAKIP	Predikat	B 61,55	B 62,60	B 63,37	B 63,81
25	Persentase Koperasi Aktif	Persen	86,81	86,81	n.a	n.a
26	Persentase UMKM yang berdaya saing	Persen	1,94	1,94	n.a	n.a
27	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	17,98	n.a	n.a	n.a
28	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	4,351	0,279	n.a	n.a
29	Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	Persen	17,98	20,78	n.a	n.a
30	Rasio elektrifikasi	Persen	49,78	57	83,2	88,96
31	Rasio rumah layak huni	Persen	54,56	52,57	66,03	63
32	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	Persen	5	n.a	5	5
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menurut PDRB	Rupiah	3.698.760	n.a	4.007.390	n.a
2	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	8.564	n.a	9.420	9.821
3	Angka Kriminalitas	Poin (Angka)	4,12	4,65	5,33	5,33
4	Rasio ketergantungan	Persen	44,15	44,24	43,60	43,43
5	Persentase ASN yang berkompeten	Persen	60,83	n.a	0,33	70



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
6	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa	Persen	9,29	1,03	5,15	5,15
7	Nilai Tukar Petani	Persen	n.a	n.a	76,92	79,42
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Layanan Urusan Wajib Dasar					
A	Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar					
1.1	APK SD /MI	Persen	93,39	116,48	114,94	115,35
1.2	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	71,44	71,13	69,73	71,72
1.3	APK SMP/MTs	Persen	70,54	87,42	93,68	95,03
1.4	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	85,83	90,61	76,73	91,72
2	Pendidikan Menengah					
2.1	APK SMA/SMK/MA	Persen	57,04	50,26	57,21	57,97
2.2	Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Rasio	85,83	90,61	93,14	93,14
3	APM					
3.1	APM SD/MI	Persen	92,39	97,99	98,24	98,74
3.2	APM SMP/MTs	Persen	64,91	81,28	89,53	89,57
3.3	APM SMA/MA/SMK	Persen	51,39	47,87	47,49	48
4	Angka Partisipasi Sekolah					
4.1	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	92,39	97,99	99,43	99,81
4.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	64,91	81,28	82,53	82,94
4.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	51,39	47,87	47,49	48,34
5	Angka Putus Sekolah					
5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,4	0,89	0,44	0,44
5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,8	3,93	0,8	0,79
5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	Persen	1,37	6	1,37	1,34
5	Angka Kelulusan					
5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	96,98	98,53	96,98	97
5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	97,53	99,35	97,53	97,55
5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	Persen	95,56	91,31	94,75	94,87



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
6	Angka Melanjutkan					
6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	96,46	95,97	96,46	97,53
6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	Persen	75,8	67,52	75,8	79,34
7	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	421	519	475	475
8	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	97	223	250	250
9	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	21	21	24	24
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	124	122,56	186	186
11	Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijazah S1/D4	Persen	85,74	87,68	99,8	99,8
12	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	Persen		49,16	63,55	68,55
B	Kesehatan					
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000	5,78	6,6	9,2	10,5
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	257,15	131,2	246,4	159,59
3	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 100 balita	7,86	6,57	8,27	1,27
4	Rasio Puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per 1.000	0,63	0,54	0,62	0,69
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	Per 1.000	0,06	0,06	0,07	0,08
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	Per 1.000	0,09	0,10	0,08	0,07
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	Per 1.000	0,46	0,39	0,47	0,53
8	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000	0,63	0,97	1,05	1,35
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,112	0,20	0,43	0,49
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	3,6	6,62	0,43	4,48



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	18	29,9	51	35
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	67	28,45	84	71
13	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	Persen	50	62,46	75,59	79,8
14	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	53,29	15,81	23,67	27,3
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	16,5	20,23	20,20	24,50
18	Cakupan kunjungan bayi	Persen	61	29,48	91	80
19	Cakupan puskesmas	Persen	120	120	120	120
20	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	82	80	84	80
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	75,31	62,55	83,81	79
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	48,27	50,8	62,93	37
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	74,02	74,65	81,15	69
24	Persentase pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	41,31	57,79	70,5	56



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	25,5	28,15	96,66	12
26	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	12,59	23,16	49,31	39,4
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	23,21	28,89	45,23	18,5
28	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	36,47	100	22,67	17,4
29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	39,67	100	98,34	70,9
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	44,88	100	95,38	51,5
31	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	25,67	12,64	17,03	39,74
32	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	22	9,99	44,54
33	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	Per.1000	994,22	993,4	990,08	989,50
34	Cakupan Desa / Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	n.a	52	51	53



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	17,98	20,27	n.a	n.a
2	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Persen	73,4	62,76	n.a	n.a
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	57,32	54,9	58,01	51,38
4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	61,68	61,68	n.a	n.a
5	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	49,76	45,68	n.a	n.a
6	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	22,5	22,8	n.a	n.a
7	Persentase Sistem Air limbah yang terkelola dengan baik	Persen	57,32	54,9	n.a	n.a
8	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	0,9	1,9	n.a	n.a
9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	75,12	75,12	n.a	n.a
10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	29,09	30,29	n.a	n.a
11	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	Persen	36,75	48,99	n.a	n.a
12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah HPL/HGB	Persen	2,33	2,33	n.a	n.a
13	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	3,43	4,09	n.a	n.a
14	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	13,23	14,05	n.a	n.a
15	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	12,36	13,91	n.a	n.a
16	Persentase SDM Terampil Konstruksi Bersertifikat	Persen	65	65	n.a	n.a



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
1	Rasio permukiman layak huni	Persen	49,91	48,21	54,68	57,1
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	n.a	n.a	n.a	87
3	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	n.a	n.a	n.a	85
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	n.a	n.a	n.a	10
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	n.a	n.a	n.a	90
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	n.a	n.a	n.a	20
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	n.a	n.a	99,61	100
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	47,93	48,32	55,86	58,41
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	n.a	n.a	100	100
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	n.a	n.a	100	100
4	Persentase penanganan bencana yang ditangani	Persen	100	100	100	100
5	Persentase penanganan kebakaran hutan dan lahan	Persen	100	100	100	100
6	Persentase Penurunan Titik Hotspot Karhutla	Persen	n.a	n.a	27,85	40
7	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran dan non kebakaran	Persen	n.a	n.a	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	n.a	n.a	100	100
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	n.a	n.a	100	100
F	Sosial					
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	4	4	4	9
2	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	95	95	1	100
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	95	95	0	0
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	98	1	100
5	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98	98	1	100
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98	98	1	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95	95	1	100
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	97	97	1	100
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	97	97	0	0



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
A	Tenaga Kerja					
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Orang	339	133	133	103
2	Persentase tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	n.a	n.a	0,019	0,23
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	n.a	n.a	0,36	12,56
4	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	n.a	n.a	100	100
5	Persentase Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	n.a	n.a	58,11	45,76
6	Persentase Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	n.a	n.a	100	100
7	Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Persen	n.a	n.a	88,30	82
8	Persentase Kelesematan dan perlindungan	Persen	n.a	n.a	100	100
9	Pencari Kerja					
	Lowongan Kerja Terdaftar	Lowongan	8	70	1445	3542
	Pencari Kerja Terdaftar	Jiwa	747	50	554	176
	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jiwa	16	13	2	252
	Bursa Kerja Swasta	Jumlah	0	0	0	0
	Jumlah Pengantar Kerja	Jumlah	0	0	0	0
10	Hubungan Industrial					
	Jumlah Mediator	Mediator	0	0	1	2
	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	Dokumen	2	12	21	25
	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kali	2	2	6	10



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
	Jumlah SP/SB	Kali	9	40	40	41
	Jumlah Lembaga Bipartit	Unit	23	24	30	na
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Jumlah KDRT	Kasus	1	1	100	3
2	Selesai Tindak pidana KDRT	Kasus	1	1	100	1
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	1	0,96	0,96	0,2
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	12	12	12	n.a
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0,39	0,38	0	n.a
6	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1	0,96	0,96	0,2
C	Pangan					
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	35,8	36,31	80,34	80
2	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	n.a	n.a	36,02	37,32
D	Pertanahan					
1	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	Persen	100	100	100	100
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	n.a	n.a	85	90
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	n.a	n.a	n.a	90



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
4	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	n.a	n.a	80	75
E	Lingkungan Hidup					
1	Persentase Penanganan Sampah	Persen	51	51	70	12,28
2	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	8,96	8,76	0,004	12,29
3	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Buah	1	1	1	1
4	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	4	4	4	20
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	54,98	56,76	72,69	68,71
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Persen	50	50	62,29	48
7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Persen	83,72	84,56	84,33	87,80
8	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	n.a	n.a	1	-
9	Penetapan hak MHA	Ketetapan	n.a	n.a	1	-
10	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Lembaga	n.a	n.a	n.a	-
11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Lembaga	n.a	n.a	n.a	1
12	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Lembaga	n.a	n.a	n.a	-
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Lembaga	n.a	n.a	n.a	1
14	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	n.a	-
15	Persentase berkurangnya kerusakan lingkungan hidup	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a
16	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	n.a	n.a	n.a	Tidak ada



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
17	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	14	1	8	24
F	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Persen	93,66	95,27	95,11	95,11
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	97,77	99,73	100	99,09
3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	38,15	37,16	63,28	59,6
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1000	576,182	599,89	624,32	628,08
5	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	sudah	Sudah	sudah	sudah
7	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	93,66	95,27	95,11	95,11
8	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	Persen	97,77	99,73	100	99,09
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	97	97	100	100
2	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100
4	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	70	70	60	70,1
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	n.a	n.a	8	0



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	59,37	59,37	60	28,86
7	Persentase LSM Aktif	Persen	5,54	5,54	8	4,12
H	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana					
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	1,3	2,3
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,04	0,02	0,02	1,48
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Kelaurga Berencana dan pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	Persen	1,5	1,5	63	n.a
4	Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Ketersediaan dan Didistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	100	100	0,96	100
6	Persentase Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	21	28	100	180
7	Persentase PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPKKS) yang ber KB- mandiri	Persen	10,2	11,6	100	100
8	Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	56	56	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
9	Persentase anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	41	41	100	100
10	Persentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	20	20	100	100
I	Perhubungan					
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Termin al Bus	Unit	96	96	100	100
2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.110	3.305	3685	3691
3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	6.106	6.327	6954	6842
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1130	1362	1669	1694
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,62	0,63	0,86	0,66
6	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	214	247	247	247
7	Rasio Ijin Trayek Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Kabupaten	Persen	3	3	3	3
8	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	41	47	39,1	39,28
9	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,034	0,032	0,035	0,028
J	Komunikasi dan Informatika					
1	Jumlah Surat Kabar Nasional	Unit	11	14	11	11
2	Jumlah Surat Kabar Lokal	Unit	11	13	14	5
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	53	53	53	53
4	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	43	54	85	68
5	Proporsi Rumah Tangga Berakses Internet	Persen	60	65	80	61



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
K	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	86,81	86,81	87,59	87,5
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen	86,95	83,3	80,84	86
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	13,05	16,7	16,94	14
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,5	99,5	94,17	90
L	Penanaman Modal					
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	67,69	57,6	88	62
2	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	n.a	n.a	87	48
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	n.a	n.a	941.724.700.000	362.014.820.969
4	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	Persen	n.a	n.a	0,88	2
M	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	70	60	86	86
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	62,5	92	92	92
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	32	32	12	31
4	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	11	0	2	8
N	Statistik					
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/tidak ada	ada	Ada	Ada	ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/tidak ada	ada	Ada	Ada	tidak ada
3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak Ada	tidak ada



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
O	Persandian					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	n.a	n.a	10	10
P	Kebudayaan					
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	2	0	0	1
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	24	24	35	35
Q	Perpustakaan					
1	Jumlah Pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (dihapus) ganti persentase sesuai rumus PMDN	Orang	11.784	7.855	4929	50933
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	9.14	5,98	3,53	3,77
3	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	64.582	71.923	71923	72365
4	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	Unit	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 49 PD
5	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	35,27	35,25	35,31	0
R	Kearsipan					
1	Pengelolaan Arsip secara baku	Persen	50	56	100	100
2	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	0	300	47,61	75



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
3	Layanan Urusan Pilihan					
A	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata	Orang	29.922	19.164	24.134	22.139
B	Pertanian					
1	Persentase Produktivitas padi	Persen	144,56	145,07	36,02	37,32
2	Cakupan bina kelompok petani	Persen	85	85	87,31	90,86
3	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	n.a	n.a	36,3	37,6
4	Persentase Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	n.a	n.a	76,92	79,42
C	Kehutanan					
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	0,31	0,31	170,5	0,05
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	9,48	9,48	n.a	1
D	Energi dan Sumberdaya Mineral					
1	Persentase Pemakaian Listrik (kWh)	Persen	3,97	2,64	3,66	n.a
2	Produksi Listrik (kWh)	kwh	1.757.277	2005722	23488201	n.a
E	Perdagangan					
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	87,5	87,5	86,7	86,7
F	Perindustrian					
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	7,85	3,75	0,18	0,19
G	Transmigrasi					
1	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	Persen	n.a	n.a	42,85	42,85



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
2	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persen	n.a	n.a	0	0
3	Persentase Kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun	Persen	n.a	n.a	0	0
H	Kelautan dan Perikanan					
1	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	4,6	6,7	8	7,36
2	Konsumsi ikan	kg/tahun	52,24	52,5	57,46	58,31
3	Persentase Konsumsi Ikan	Persen	106	101,4	109,4	102,37
4	Produksi Perikanan	ton/tahun	32.160,67	35.276,92	40786,75	40270,812
	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	12.167,69	14.457,88	15838,92	17458,41
	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	19.992,98	20.819,04	21596,38	19445,52
	- Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	ton/tahun	n.a	n.a	4141,21	3366,882
5	Persentase Produksi Perikanan	Persen	96,32	98,74	97,9	88,98
6	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	Persen	n.a	n.a	97,9	90,07
7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan dan Undang-undang yang berlaku	Persen	n.a	n.a	81,92	81,95
8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya)	Persen	n.a	n.a	52	52,45
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
A	Sekretariat Daerah					
1	Jumlah Informasi Manajemen Pemda	Jumlah	4	9	25	25
B	Sekretariat DPRD					
1	Jumlah anggota DPRD	Anggota	25	25	25	25



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase Terlaksananya Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Pembentukan Perda dan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	n.a	n.a	98,57	75
6	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD	Persen	n.a	93	50	50



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
A	Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	Persen	100	100	100	89,04
6	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100	100	100	92,12
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	n.a	n.a	n.a	4
B	Keuangan					
1	Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tepat / Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	n.a	n.a	10	0,65
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	n.a	n.a	18,9	24,98
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	n.a	n.a	12,7	15,85
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	n.a	n.a	12,4	5,3
6	Persentase Program Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	n.a	n.a	96,52	94,63



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
7	Persentase Kegiatan Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	n.a	n.a	94,1	90,5
8	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,92	6,95	7,46	7,41
C	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan					
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	3.107	3.134	n.a	n.a
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	28	n.a	n.a
5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	583	n.a	n.a
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	1771	n.a	n.a
D	Penelitian dan Pengembangan					
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	n.a	n.a	100	60
2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	n.a	n.a	76	60
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	n.a	n.a	33	60
4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	n.a	n.a	100	60



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2019-2023			
			2019	2020	2021	2022
6	Unsur Pengawas					
A	Inspektorat					
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	n.a	n.a	79,86	81,53
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	n.a	n.a	0,1	0,06
3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	n.a	n.a	26	23
4	Persentase terlaksananya pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah)	Persen/Level	n.a	n.a	Level 3	Level 3
7	Unsur Pemerintahan Umum					
A.	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat					
1	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	n.a	n.a	17,73	5,1
2	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik	Persen	n.a	n.a	5,58	16,12
3	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	n.a	n.a	100	50



2.3. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan : (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.37
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan anak usia dini	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	n.a	64,91	81,22	99,06	100,00
2	Pendidikan dasar	Persentase warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	n.a	93,39	98,38	99,38	100,00
3	Pendidikan kesetaraan	Persentase warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	n.a	24,53	98,83	96,5	100,00
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	85,73	75,31	62,55	83,81	87,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Persen	70,39	48,27	54,66	62,93	59,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	73,06	74,02	74,65	81,15	77,00
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	46,76	41,31	57,65	70,50	59,00
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	20,39	25,5	28,15	96,66	12,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	5,89	12,59	23,16	49,31	36,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	18,59	23,21	28,89	45,23	20,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	16,05	36,47	16,38	22,67	32,00
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,05	39,67	100,00	98,34	92,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	44,88	100	95,38	51,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100	25,67	12,64	17,03	42,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promo tif dan pencegahan/preventif	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100	100	22,00	9,99	42,00
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Persen	21,33	22,72	68,75	35,33	53,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	30,29	54,85	9,95	6,88	51,00
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah layak huni yang disediakan dan direhabilitasi bagi korban bencana	Unit	n.a	n.a	n.a	n.a	44,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah rumah layak huni yang disediakan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Unit	n.a	n.a	15	n.a	0,00
5. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga yang mendapatkan layanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	n.a	90	90	16,67	100,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Persen	n.a	85	92,22	91,43	100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	n.a	25	70,63	73,8	100,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	n.a	100	100	99,76	100,00
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	n.a	90	90	5,09	16,28
6. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti yang direhabilitasi sosial	Orang	17	111	262	46	7,00
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar di luar panti yang direhabilitasi sosial	Orang	150	120	188	63	0,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia telantar di luar panti yang direhabilitasi sosial	Orang	285	583	425	100	19,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang direhabilitasi sosial	Orang	n.a	n.a	n.a	4	0,00
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Orang	n.a	1.042	3.605	23.853	100,00



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.



Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga turut harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 demi meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik gaya hidup, belajar maupun cara bekerja. Hingga saat ini, perubahan-perubahan masih terus terjadi dan secara pasti cara-cara konvensional mulai bergeser ke arah digital dan *online*.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kondisi saat ini memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan dan melakukan berbagai *refocussing* anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan sosial yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional telah mengalami kontraksi.

Kondisi pasar keuangan global masih terus diwarnai oleh ketidakpastian disebabkan adanya kekhawatiran dalam pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Berbagai skenario yang telah dirumuskan membuat postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang



kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat, level pemerintah provinsi dan level pemerintah kabupaten/kota kebijakan ekonomi secara lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seruyan harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa



lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 DOFD Kabupaten Seruyan



sebesar 8,28% turun pada tahun 2019 kembali turun menjadi 7,92%. Pada tahun 2020 DOFD kembali turun hingga mencapai 6,95%, pada tahun 2021 kembali naik menjadi 7,46% dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 7,21%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Seruyan yang sebesar 7,56% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Seruyan periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Seruyan, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Pendapatan	1.126.581	1.123.014	1.012.118	1.113.153	1.142.917	1.103.557
Pendapatan Asli Daerah	93.254	88.984	70.358	83.036	82.393	83.605
Persentase	8,28%	7,92%	6,95%	7,46%	7,21%	7,56%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja



pelaksanaan APBD Kabupaten Seruyan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi sebesar 71% yang naik drastis pada tahun 2021. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mengalami penurunan sebesar -1%.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:



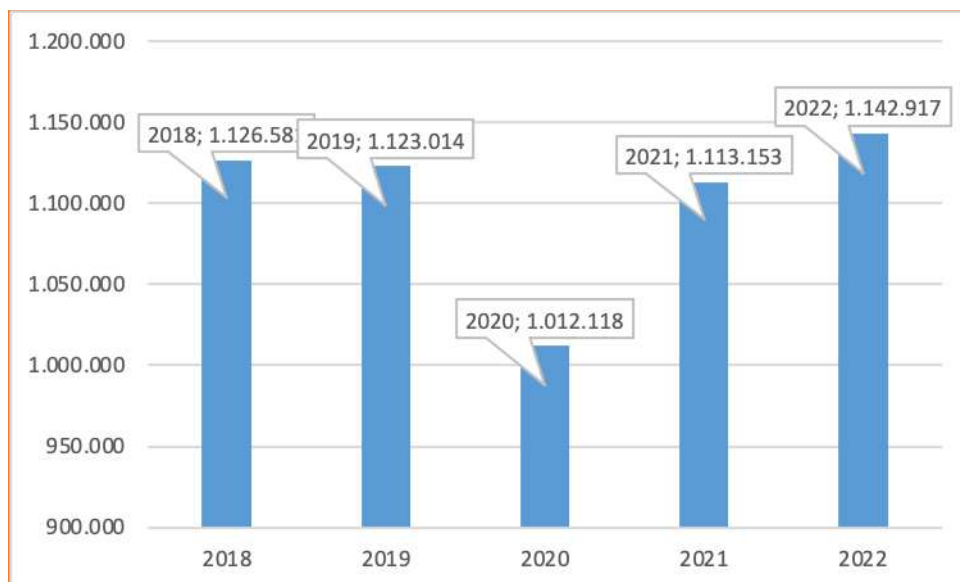
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Seruyan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% pertahun dari Rp. 1,126 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 1,142 miliar di tahun 2022.



Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Seruyan terbaik pada tahun 2012. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -2% pertahun dari Rp. 93 miliar di tahun 2018, turun menjadi Rp. 82 miliar di tahun 2022. Pendapatan transfer stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% pertahun dari Rp. 1,015 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 1,050 miliar di tahun 2022. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat turun besar -5% pertahun dari Rp. 17 miliar di tahun 2018, meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 25 miliar di tahun 2021 dan kembali menurun dengan hanya sebesar Rp. 10 miliar pada 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:



1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Seruyan di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.



4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023(diolah)

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Seruyan berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2018-2022, PAD mengalami trend penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif -2%. Hal ini terjadi karena kurangnya optimalisasi kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta stimulus pengurangan pajak/retribusi. Untuk memperbaiki kondisi ini harus melalui penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah



dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	1.126.581	1.123.014	1.012.118	1.113.153	1.142.917	1%
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.254	88.984	70.358	83.036	82.393	-2%
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	46.850	32.509	16.401	23.335	14.379	-19%
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	16.458	11.289	11.621	2.330	3.126	-19%
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.529	7.453	7.738	9.302	10.803	10%
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.417	37.733	34.597	48.069	54.085	28%
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.015.414	1.013.416	921.579	1.004.974	1.050.032	1%
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	886.362	844.144	762.006	859.678	909.706	1%
	Bagi Hasil Pajak	29.153	37.467	24.379	850.871	900.018	847%
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	54.218	56.472	39.164	-	-	-42%



No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Dana Alokasi Umum	616.416	629.418	566.244	-	-	-36%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.575	120.787	132.220	-	-	-42%
	Dana Insentif Daerah (DID)						10%
1.2.1.3	Transfer Antar Daerah	91.782	137.444	131.879	111.356	88.518	2%
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	9.250	37.544	25.943	-	-	58%
1.2.1.3.3	Dana Desa	82.532	99.900	105.936			3%
1.2.1.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	37.270	31.828	27.694	33.940	51.808	12%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.620	31.828	27.694	33.940	51.808	13%
	Pendapatan Bantuan Keuangan	1.650	-	-	-	-	
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.913	20.615	20.181	25.143	10.492	-5%
01.03.01	Pendapatan Hibah	17.738	20.615	20.181	-	5.597	-29%
01.03.02	Pendapatan Lainnya	176	-	-	25.143	4.895	-90%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang

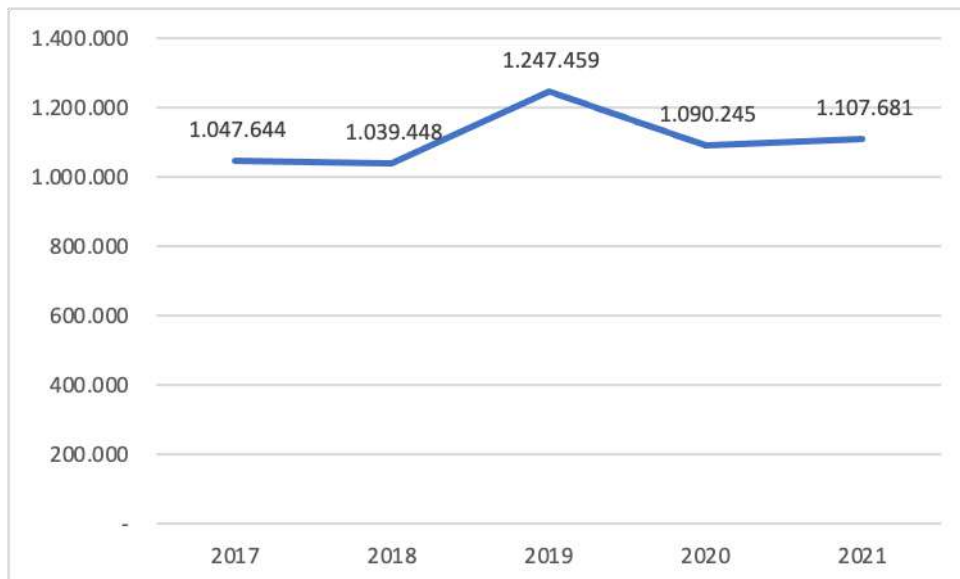


memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% per tahun dari Rp. 1,047 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp. 1,039 miliar di tahun 2018, naik pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,090 miliar dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,107 miliar. Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Belanja Daerah menunjukkan



kinerja berfluktuatif dan cenderung stagnan dengan pertumbuhan 1%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Fluktuasi belanja operasi sangat dipengaruhi oleh adanya belanja hibah pada tahun 2021 yang cenderung meningkat sampai dengan Rp. 52 miliar. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan 3% pertahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 331 miliar dan stagnan sampai tahun 2022 sebesar Rp. 366 miliar. Sedangkan belanja hibah yang tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 61 miliar rupiah dan turun pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 9 miliar, namun kembali naik menjadi Rp. 52 miliar pada 2022. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2018-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -14%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	Belanja	1.039.448	1.247.459	1.090.245	1.107.681	1.071.565	1%
02.01	Belanja Operasi	564.972	697.995	612.765	714.899	747.008	8%
02.01.01	Belanja pegawai	331.708	380.620	383.996	329.784	366.213	3%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	179.780	244.184	211.225	317.829	329.373	19%
02.01.03	Subsidi	-	1.711	1.837	2.000	2.000	5%
02.01.04	Hibah	49.738	61.256	9.629	52.585	29.943	85%
02.01.05	Bantuan Sosial	3.746	10.224	6.078	12.702	19.478	74%
02.02	Belanja Modal	314.813	364.952	269.203	213.378	159.704	-14%
02.02.01	Belanja Tanah	56	-	7	-	-	-100%
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	24.283	70.512	72.657	74.928	48.876	40%
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	68.416	69.240	48.315	40.971	31.521	-17%
02.02.04	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	218.149	217.283	133.766	96.672	77.888	-21%
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.909	7.917	14.458	807	1.419	42%
02.03	Belanja Tak Terduga	-	-	34.933	1.090	1.358	25%
02.03.01	Belanja Tak Terduga	-	-	34.933	1.090	1.358	-36%
02.04	Transfer	159.663	184.512	173.345	178.314	163.496	1%
02.04.01	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	4.673	4.776	2.360	2.358	1.479	-21%
	Bagi Hasil Pajak	4.673	4.776	2.360	2.358	1.479	-21%



No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	154.990	179.736	170.985	175.956	162.017	2%
	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	245	245	245	175.956	162.017	17928%
	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa	154.026	178.802	170.740	-	-	-29%
	Bantuan Keuangan Lainnya	719	689	-	-	-	-52%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Seruyan selama kurun waktu tahun 2018-2022 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Seruyan terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 2018-2022, pembiayaan netto Kabupaten Seruyan mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata -11%. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
03.01	Penerimaan Pembiayaan	283.619	364.252	239.808	161.680	154.189	-11%
03.01.01	Penggunaan SILPA	283.619	364.252	239.808	161.680	154.189	-11%
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	6.500	-	-	12.963	12.963	-50%
03.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.500	-	-	12.963	12.963	-50%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Seruyan berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel berikut ini,



Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET	5.3.1						
3	ASET LANCAR	5.3.1.a						
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1)	360.859,28	278.878,44	153.859,43	233.101,10	134.401,21	-15%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.2)	10,25	6,35	5,54	2,85	-	-50%
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.3)			36,26	0,99	-	-99%
7	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.a.4)	1.281,65	928,93	1.446,19	761,66	13.373,66	409%
8	Kas di Bendahara BOS APBN	5.3.1.a.5)	886,79	1.855,40	2.193,89	903,13	1.458,96	33%
9	Kas Bendahara Sekolah				3.267,40	4.327,53	955,63	-23%
10	Kas Lainnya	5.3.1.a.6)		91,59	160,94	0,00	-	-12%
11	Piutang Pajak	5.3.1.a.7)	6.883,93	6.786,19	8.800,03	7.700,01	7.315,11	3%
12	Piutang Retribusi	5.3.1.a.8)	4.519,59	1.130,13	291,23	318,06	282,49	-38%
13	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.3.1.a.9)	816,73	424,71	3.395,07	1.662,45	17.886,62	394%
14	Piutang Transfer	5.3.1.a.10)	8.397,48	9.235,97	11.676,36	11.032,18	15.229,24	17%
15	Penyisihan Piutang	5.3.1.a.11)	(3.622,34)	(3.230,71)	-5.474,08	(4.035,55)	(3.508,42)	5%
16	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a.12)	126,40		174,17	140,96	231,84	-18%
17	Persediaan	5.3.1.a.13)	35.853,29	35.178,38	42.301,47	41.693,80	85.604,05	31%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No.	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
18	Jumlah Aset Lancar		416.013,05	331.285,39	222.133,90	297.609,21	277.230,45	-7%
19			-	-	0,00	0,00		
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b	-	-	0,00	0,00		
21	Investasi Nonpermanen				0,00	0,00	-	
22	Pinjaman Jangka Panjang				0,00	0,00	-	
23	Investasi Nonpermanen Lainnya				0,00	0,00	-	
24	Jumlah Investasi Nonpermanen				0,00	0,00	-	
25	Investasi Permanen	5.3.1.b.1)	-	-	0,00	0,00	-	
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		55.282,96	49.543,61	56.753,60	56.627,78	68.873,30	6%
27	Investasi Permanen Lainnya				0,00	0,00		
28	Jumlah Investasi Permanen		55.282,96	49.543,61	56.753,60	56.627,78	68.873,30	6%
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang		55.282,96	49.543,61	56.753,60	56.627,78	68.873,30	6%
30			-	-	0,00	0,00		
31	ASET TETAP	5.3.1.c	-	-	0,00	0,00		
32	Tanah	5.3.1.c.1)	199.852,14	201.606,98	202.644,39	199.911,61	201.458,42	0%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No.	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	316.010,05	299.099,60	443.189,23	378.567,49	514.226,30	16%
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	788.456,36	759.908,82	908.330,55	854.460,72	945.497,50	5%
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.c.4)	2.543.740,28	2.319.477,21	2.951.864,23	2.771.783,47	3.045.121,81	6%
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	15.435,12	10.759,10	38.567,61	27.658,16	41.759,86	63%
37	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	109.921,41	81.614,23	96.717,17	114.649,27	116.014,42	3%
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(1.281.033,95)	(1.082.904,89)	-1.727.905,14	(1.515.950,80)	(1.953.498,54)	15%
39	Jumlah Aset Tetap		2.692.381,41	2.589.561,03	2.913.408,03	2.831.079,92	2.910.579,78	2%
40			-	-	0,00	0,00	-	
41	DANA CADANGAN		-	-	0,00	0,00	-	
42	Dana Cadangan				0,00	0,00	-	
43	Jumlah Dana Cadangan				0,00	0,00		
44			-	-	0,00	0,00		
45	ASET LAINNYA	5.3.1.d	-	-	0,00	0,00		
46	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.d.1)	1.214,13	1.950,06	710,62	710,62		-26%
47	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.d.2)	1.703,62	1.703,62	1.701,62	1.703,62	51.727,94	734%
48	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.d.3)	49.828,67	49.582,18	50.194,14	49.757,49		-25%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No.	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
49	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.d.4)	(43.804,14)	(21.776,22)	0,00	0,00		-75%
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				0,00	0,00	-	
51	Aset Tak Berwujud	5.3.1.d.5)	16.572,64	16.373,54	11.006,31	9.997,61	11.006,31	-8%
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.d.6)	(3.430,49)	(3.113,61)	-3.538,88	(2.903,98)	(4.325,81)	9%
53	Aset Lain-Lain	5.3.1.d.7)	74.094,02	171.980,83	70.201,41	78.519,00	81.716,51	22%
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.d.8)	(37.023,21)	(68.478,53)	-37.768,88	(43.417,74)	(46.462,76)	16%
55	Jumlah Aset Lainnya		59.155,23	148.221,86	92.506,34	94.366,62	93.662,19	29%
56			-	-	0,00	0,00		
57	JUMLAH ASET		3.222.832,66	3.118.611,89	3.284.801,87	3.279.683,52		-25%
58			-	-	0,00	0,00		
59	KEWAJIBAN	5.3.2	-	-	0,00	0,00		
60			-	-	0,00	0,00		
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-	0,00	0,00		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	5.3.2.a			0,00	0,00		
63	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.b	4.648,78	5.336,69	1.072,89	727,25		-49%
64	Utang Bunga	5.3.2.c			0,00	0,00		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



No.	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				0,00	0,00		
66	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.d	98,30	28,15	7,01	0,93		-83%
67	Utang Beban	5.3.2.e	14.129,33	4.362,76	3.449,48	2.181,06		-57%
68	Utang Jangka Pendek Lainnya				0,00	0,00		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.876,41	9.727,60	4.529,38	2.909,24		-59%
70			-	-	0,00	0,00		
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	0,00	0,00		
72	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				0,00	0,00		
73	Utang Dalam Negeri - Obligasi				0,00	0,00		
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				0,00	0,00		
75	JUMLAH KEWAJIBAN		18.876,41	9.727,60	4.529,38	2.909,24	23.671,59	144%
76	EKUITAS/EKUITAS DANA	5.3.3	3.203.956,24	3.108.884,29	3.280.272,49	3.276.774,28	3.326.674,12	1%
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.222.832,66	3.118.611,89	3.284.801,87	3.279.683,52	3.350.345,72	1%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)



4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Seruyan periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2017-2021 fluktuatif setiap tahun dan berada antara angka 0,00 sampai dengan 0,05, sehingga kemampuan membayar hutang jangka cukup sampai dengan 0,00 pada tahun 2021 yang berarti rasionya semakin baik.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan):



Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Rasio Lancar
1	2017	416.013	18.876	0,05
2	2018	331.285	9.728	0,03
3	2019	222.134	4.529	0,02
4	2020	297.609	2.909	0,01
5	2021	277.230,45	0	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)

1. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang



yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Seruyan dari tahun 2017-2021 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio tahun 2017 yaitu sebesar ,01 dan stagnan selama 2018 sampai dengan 2020 dengan angka 0,00 dan menjadi 0,01 pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Seruyan cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III.8
Rasio Hutang Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	18.876,41	9.727,60	4.529,38	2.909,24	23.671,59
EKUITAS	3.203.956,24	3.108.884,29	3.280.272,49	3.276.774,28	3.326.674,12
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.



Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Seruyan dari tahun 2017-2021 stabil hingga ditahun 2021 mencapai angka 0,01. Rasio terendah terjadi pada tahun 2019 mencapai 0,00. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2017-2021 pernah lebih dari 1% dari total aset yang ada, artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Seruyan.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	18.876,41	9.727,60	4.529,38	2.909,24	23.671,59
AKTIVA	3.222.832,66	3.118.611,89	3.284.801,87	3.279.683,52	3.350.345,72
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Seruyan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.



Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2017-2021 tren stabil. Adapun rasio di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 0,04. Rasio pada tahun 2021 sebesar 0,03. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	110.713,32	93.253,51	88.983,63	70.357,79	83.036,15
AKTIVA TETAP	2.692.381,41	2.589.561,03	2.913.408,03	2.831.079,92	2.910.579,78
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2017-2021 relatif tetap. Rasio di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 0,02 sampai dengan 0,03. Secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup



masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Seruyan
Tahun 2017–2021 (Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	110.713,32	93.253,51	88.983,63	70.357,79	83.036,15
TOTAL AKTIVA	3.222.832,66	3.118.611,89	3.284.801,87	3.279.683,52	3.350.345,72
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2022 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Seruyan 2017-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur



perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 32% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 sebesar 32% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya stabil sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 34%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	331.708	1.045.948	32%
2	2019	380.620	1.247.459	31%
3	2020	383.996	1.090.245	35%
4	2021	329.784	1.120.644	29%
5	2022	366.213	1.084.528	34%
Rata-rata		356.527	1.126.074	32%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2018-2022 cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 3% pertahun dari Rp. 497 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 544 miliar ditahun 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya belanja tak terduga pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Belanja transfer pos belanja



bagi hasil tercatat menurun tahun 2018 sebesar Rp. 4 miliar menjadi hanya Rp. 1,4 miliar pada 2022. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.13

**Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	Belanja	497.870	565.131	592.274	522.151	544.030	3%
02.01	Belanja Operasi	331.708	380.620	383.996	329.784	366.213	3%
02.01.01	Belanja pegawai	331.708	380.620	383.996	329.784	366.213	3%
02.01.05	Hibah	-	-	-	-	-	
02.03	Belanja Tak Terduga	-	-	34.933	1.090	1.358	25%
02.03.01	Belanja Tak Terduga	-	-	34.933	1.090	1.358	-36%
02.04	Transfer	159.663	184.512	173.345	178.314	163.496	1%
02.04.01	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	4.673	4.776	2.360	2.358	1.479	-21%
	Bagi Hasil Pajak	4.673	4.776	2.360	2.358	1.479	-21%
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	154.990	179.736	170.985	175.956	162.017	2%
	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	245	245	245	175.956	162.017	17928%
	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa	154.026	178.802	170.740	-	-	-29%
	Bantuan Keuangan Lainnya	719	689	-	-	-	-52%



No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	6.500	-	-	12.963	12.963	-50%
03.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.500	-	-	12.963	12.963	-50%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) perkembangan surplus/defisit riil anggaran relatif fluktuatif cenderung. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 87 miliar turun menjadi Rp. 5 miliar pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi Rp. 71 miliar. Sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Secara lengkap berikut disajikan surplus/defisit anggaran Kabupaten Seruyan tahun 2018-2022.

Tabel III.14
Surplus/Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.126.581	1.123.014	1.012.118	1.113.153	1.142.917
2	Penerimaan Pembiayaan	1.039.448	1.247.459	1.090.245	1.107.681	1.071.565
Surplus/Defisit		87.133	(124.444)	(78.128)	5.472	71.352

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	277.119	364.252	239.808	148.718	141.227
Total Komposisi Penutup Defisit	277.119	364.252	239.808	148.718	141.227

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100%	100%	100%	100%	100%
Penerimaan Kembali Piutang	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018-2022 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Seruyan.

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	283.619	100%	364.252	100%	239.808	100%	161.680	100%	141.227	100%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	283.619	100%	364.252	100%	239.808	100%	161.680	100%	141.227	100%

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2024 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Seruyan tahun 2024-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2024-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan



2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Seruyan. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, adanya isu resesi global yang akan dirasakan hampir seluruh negara di dunia akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Seruyan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.



Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 hingga 2021 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi perekonomian Kabupaten Seruyan di tahun 2024-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional meskipun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, khususnya dalam menghadapi resesi global pada tahun-tahun mendatang.

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kabupaten Seruyan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Seruyan masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2021). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.



Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum di tahun 2023 diproyeksikan mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, maka di tahun 2023 dua komponen ini ditargetkan nilainya membaik seperti realisasi tahun 2021. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat akibat pandemi Covid-19 sudah dalam tahap *akselerasi/percepatan*. Adapun proyeksi tahun 2024-2026 secara umum menggunakan tahun dasar proyeksi pada RKPD tahun 2023.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 2% sampai dengan 8%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 118 miliar dan akan ada penurunan/penyesuaian sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 95 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana



transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Seruyan yang diperkirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2023 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.



Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

- 1) Dana Perimbangan;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan nilainya naik dari tahun 2021 menjadi 1,154 miliar pada tahun 2023 dan ditargetkan mencapai Rp. 1,258 miliar pada tahun 2026; dan

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah juga ada penyesuaian per komponen yaitu dari tahun 2021 senilai Rp 18 miliar sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 5 miliar. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)			
		APBD 2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.192.975	1.237.572	1.296.959	1.359.582
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.550	81.449	87.968	95.330
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	56.741	29.779	31.583	33.778
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.078	4.425	4.661	4.918
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.280	10.780	11.858	13.044
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.451	36.465	39.867	43.590
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.069.425	1.150.754	1.203.622	1.258.883
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.004.255	1.089.807	1.137.675	1.187.936
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	65.170	-	-	-
01.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	-	60.947	65.947	70.947
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	5.369	5.369	5.369
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
01.03.02	Pendapatan Lainnya	-	5.369	5.369	5.369

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



Seperti yang terlihat pada tabel III.18 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;



- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Seruyan akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:



- a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan
 - b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Seruyan, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Seruyan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 diproyeksikan meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan regulasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Seruyan. Pada tahun Anggaran 2023, pada RKPD disusun anggaran belanja daerah Kabupaten Seruyan sebesar Rp 1,334 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.813 miliar, belanja modal sebesar Rp 305 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024-2026 anggaran belanja daerah Kabupaten Seruyan diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan dan ada penurunan dengan mengikuti pola proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis dengan rata-rata kenaikan sebesar 1-7% di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 794 miliar, belanja modal sebesar Rp 375 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 11 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1,396 Miliar. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.19 di bawah ini.



Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)			
		APBD 2023	2024	2025	2026
2	Belanja	1.322.995	1.289.514	1.334.803	1.396.086
02.01	Belanja Operasi	914.405	745.062	759.155	794.104
02.01.01	Belanja pegawai	417.933	429.543	440.343	460.945
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	420.522	282.291	283.791	296.562
02.01.03	Bunga	-	-	-	-
02.01.04	Subsidi	2.000	2.000	2.000	2.090
02.01.05	Hibah	64.177	20.791	21.291	22.249
02.01.06	Bantuan Sosial	9.772	10.437	11.729	12.257
02.02	Belanja Modal	223.192	326.948	353.682	375.038
02.03	Belanja Tak Terduga	10.691	10.747	11.240	11.757
02.03.01	Belanja Tak Terduga	10.691	10.747	11.240	11.757
02.04	Transfer	174.770	206.756	210.726	215.188

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

- 1) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 2) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 3) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 4) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 5) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 6) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.



Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 2,00\%$ pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar $2,00\%$ bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata, percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kabupaten Seruyan masih perlu mengalokasikan Belanja Tak Terduga sebagai antisipasi kondisi ekonomi yang diisukan akan terjadi resesi pada tahun 2023 dan berakibat pada kondisi ekonomi pada tahun 2024-2026. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel III. 20

Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)			
		APBD 2023	2024	2025	2026
Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama		671.828	660.008	662.309	687.890
02.01	Belanja Operasi	417.933	450.334	440.343	460.945
02.01.01	Belanja pegawai	417.933	429.543	440.343	460.945
02.03	Belanja Tak Terduga	10.691	10.747	11.240	11.757
02.03.01	Belanja Tak Terduga	10.691	10.747	11.240	11.757
02.04	Transfer	12.963	206.756	210.726	215.188
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	12.963	-	-
03.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	12.963	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Seruyan tahun 2023-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 0 miliar, namun pada tahun 2024 diproyeksikan menjadi Rp. 64 miliar naik sebesar 5% dari realisasi tahun 2021 dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Seruyan tahun 2022-2026 antara lain dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito



sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;

- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
- c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel III.21
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)			
		APBD 2023	2024	2025	2026
3	Pembiayaan Netto	130.020	51.942	37.844	36.504
03.01	Penerimaan Pembiayaan	142.983	64.904	37.844	36.504
03.01.01	Penggunaan SILPA	142.983	64.904	37.844	36.504
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	12.963	12.963	-	-
03.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.963	12.963	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Seruyan dari tahun 2024 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel III.22
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.192.975	1.237.572	1.296.959	1.359.582
2	Penerimaan Pembiayaan	142.983	64.904	37.844	36.504
	Total Penerimaan	1,335,958	1,302,476	1,334,803	1,396,086
	(Dikurangi):				
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	616.357	660.008	662.309	687.890
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	719.601	642.468	672.493	708.197

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



Perlu dipahami bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), Bantuan Sosial dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.192.975	1.237.572,07	1.296.959,00	1.359.582,23
2	Penerimaan Pembiayaan	142.982	64.904,12	37.843,59	36.504,04
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.335.957	1.302.476,19	1.334.802,59	1.396.086,27

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan Kabupaten Seruyan pada periode 2024-2026 ini merupakan estafet dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan sehingga tak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, permasalahan dan isu



strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Seruyan periode pembangunan 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan



permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Seruyan sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Seruyan, yakni: **“Belum Optimalnya Pembangunan Seruyan yang Adil dan Sejahtera”**.

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas SDM yang sehat dan berdaya saing;
2. Meningkatnya angka kemiskinan daerah;
3. Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global;
4. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh urusan pemerintahan;



5. Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi;

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Seruyan



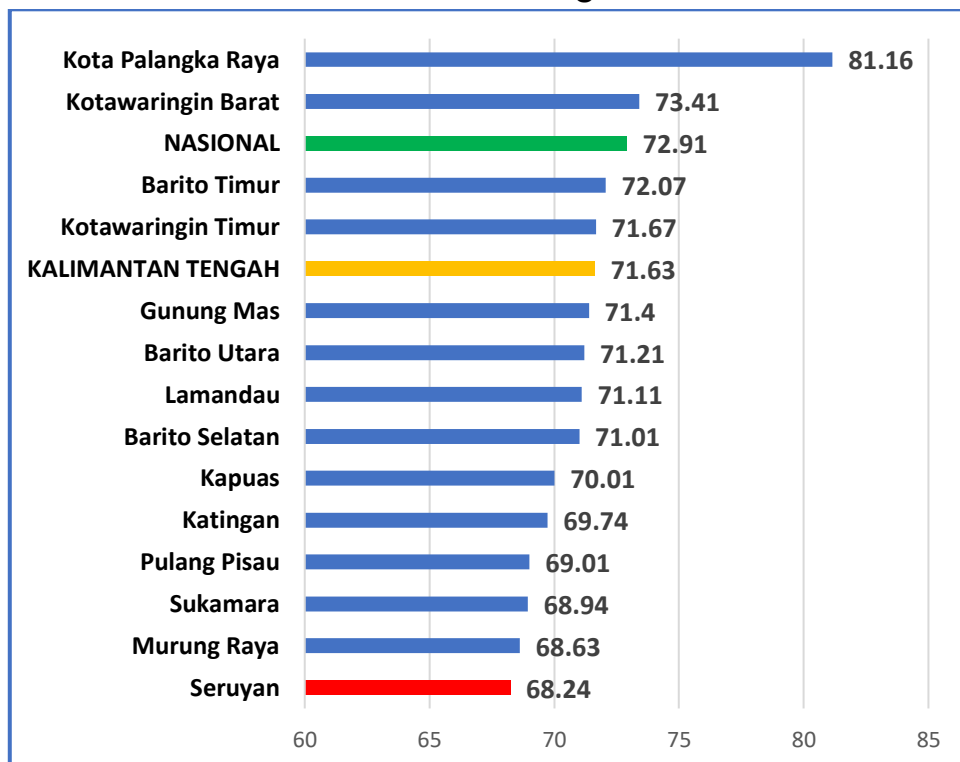
Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi permasalahan pembangunan daerah yang akan diatasi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan.



1. Belum optimalnya kapasitas SDM yang sehat dan berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan sekaligus potensi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



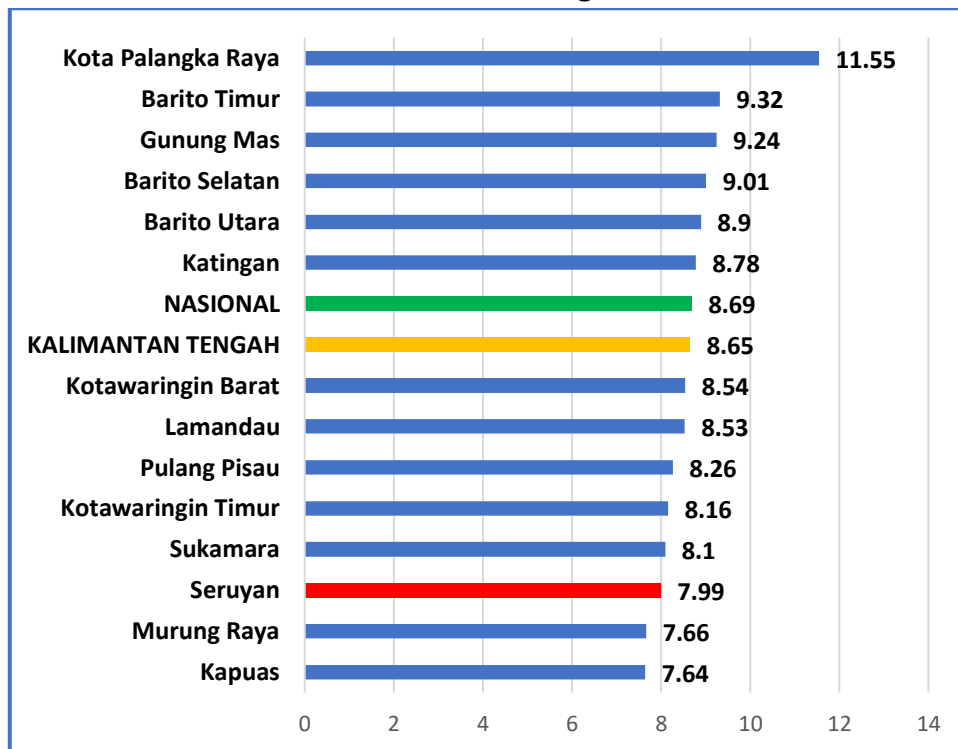
Sumber: BPS RI, 2023

Pembangunan manusia di Kabupaten Seruyan masih memerlukan perhatian yang tinggi dalam perwujudan kualitas terlebih daya saing. Hal



ini terlihat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Seruyan dimana capaiannya sebesar 68,24 merupakan angka terendah diantara seluruh Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini tentu saja cukup jauh dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Tengah (71,63) dan Nasional yang mencapai 72,91.

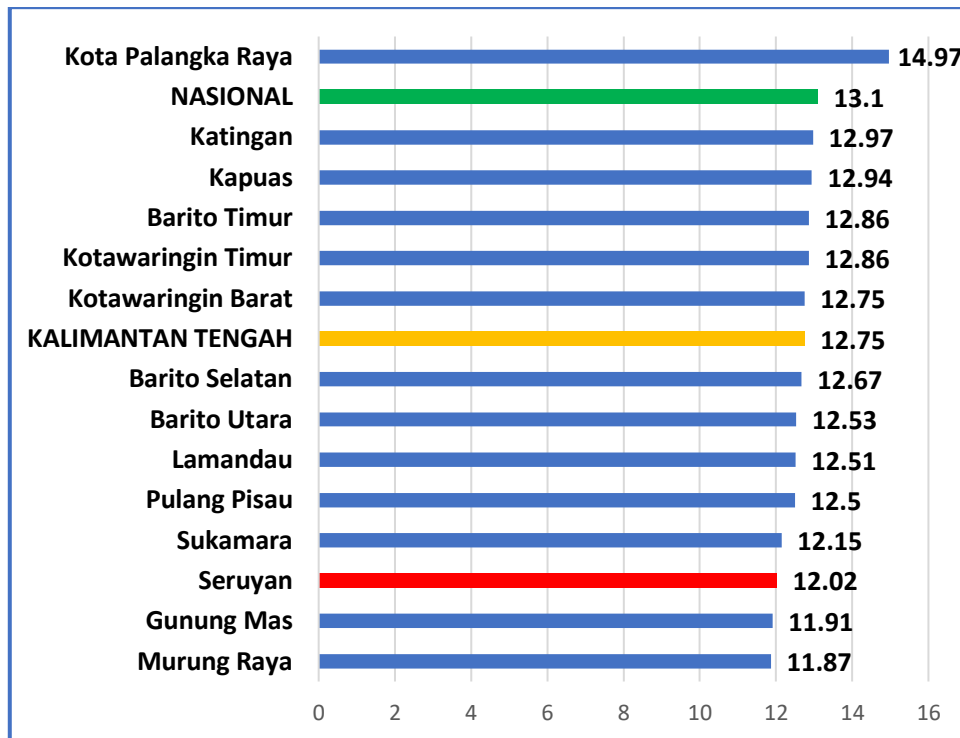
Gambar IV.3
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2023



Gambar IV.4
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

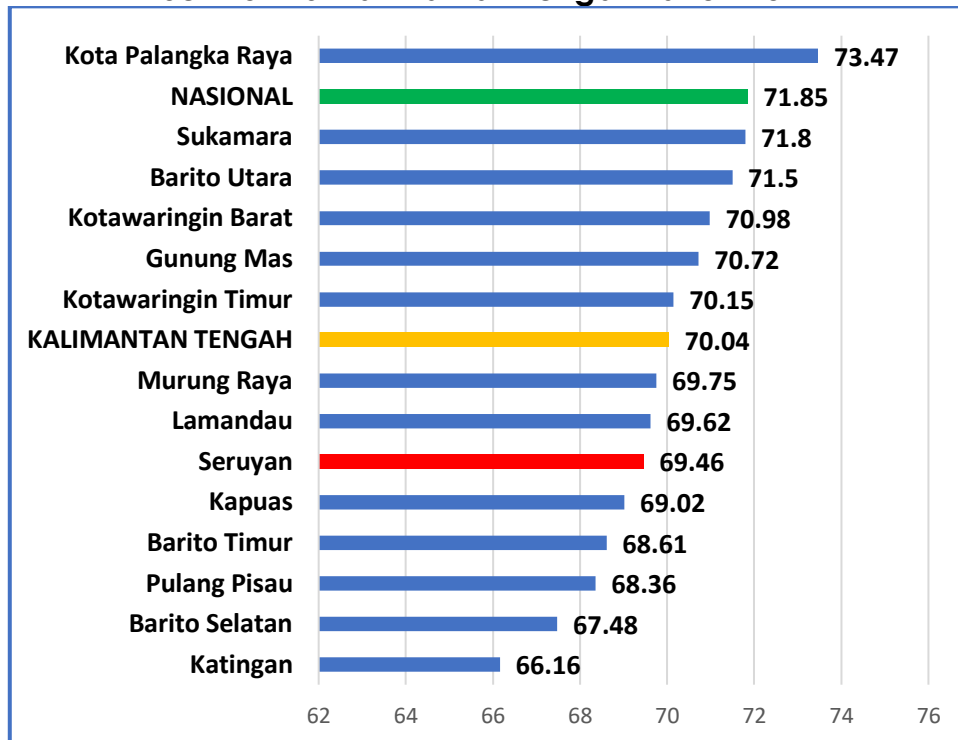


Sumber: BPS RI, 2023

Kondisi ini terlihat pula dari komponen penyusun indeks pembangunan manusia baik komponen pendidikan, kesehatan maupun ekonomi rumah tangga. Dari aspek pendidikan, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Seruyan sebesar 7,99 tahun dengan peringkat tiga terendah diantara kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Pola yang sama juga terlihat dari harapan lama sekolah Seruyan yang mencapai 12,02 tahun dimana angka ini merupakan peringkat ketiga terendah diantara seluruh kabupaten/kota. Kedua indikator ini pun juga lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.



Gambar IV.5
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2023

Capaian pembangunan manusia dari sisi kesehatan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan. Hal ini terlihat dari angka harapan hidup Seruyan yang mencapai 69,46 tahun dengan peringkat 6 terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Terlihat juga capaian angka harapan hidup Seruyan masih jauh di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan angka Nasional.

2. Meningkatnya angka kemiskinan daerah

Kesejahteraan masyarakat yang baik dan merata merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi topik utama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan di suatu daerah, tak terkecuali Kabupaten Seruyan. Selain itu, perwujudan kesejahteraan juga termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945



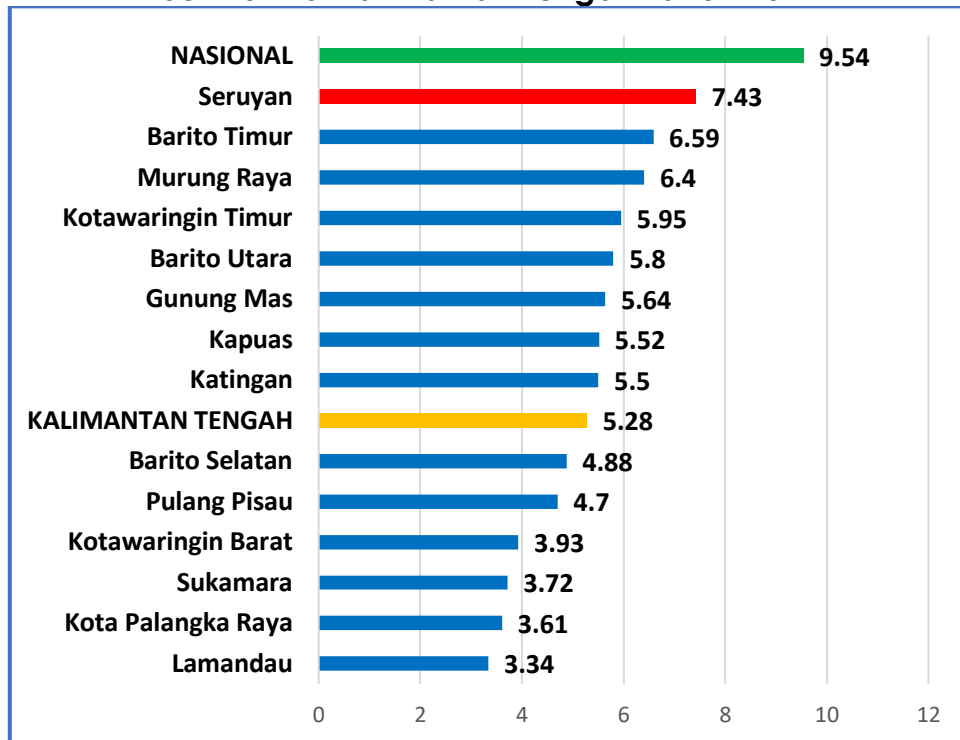
dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai salah satu indikator yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok di Kabupaten Seruyan yang harus dientaskan. Terlihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Seruyan merupakan tingkat kemiskinan yang tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Seruyan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi dengan arahan Presiden RI dimana kemiskinan ekstrem harus dihilangkan pada tahun 2024.



Gambar IV.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2023

3. Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global

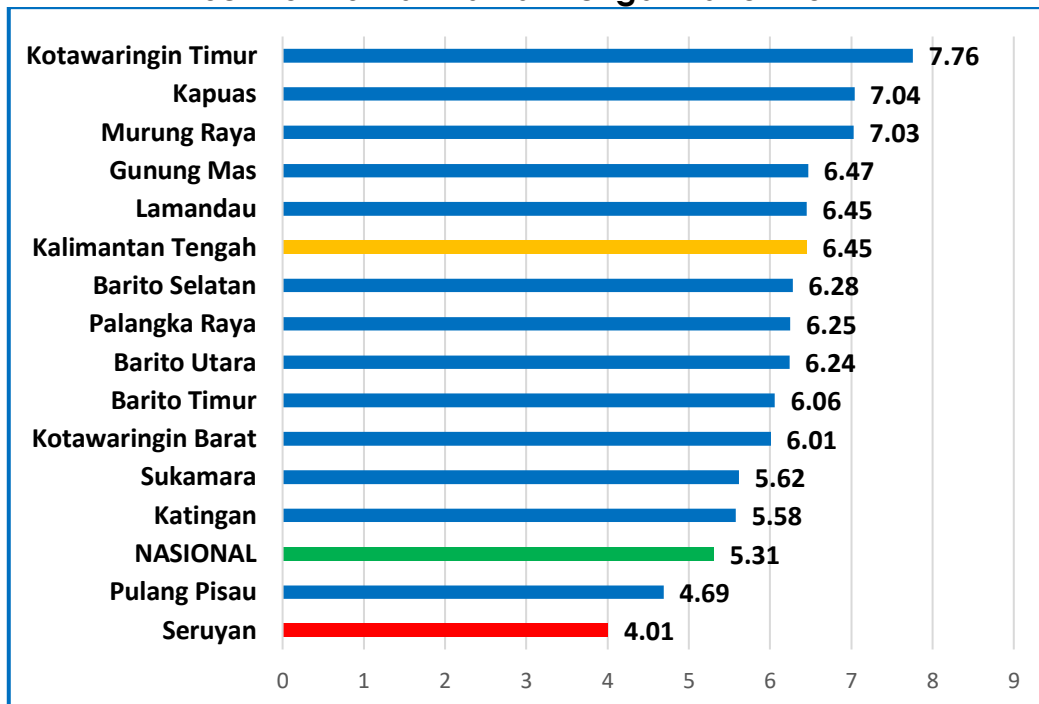
Pembangunan suatu wilayah memiliki motor penggerak utama yakni perekonomian daerah. Semakin tinggi kualitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka akan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah jika perencanaannya dilakukan secara seksama dan konsisten. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi salah satu sentral dalam mencapai target pembangunan daerah sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Kinerja makro ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan, namun kondisi makro ekonomi yang kokoh merupakan syarat perlu untuk tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.



Pasca pandemi COVID-19, perekonomian di Kabupaten Seruyan secara umum belum sepenuhnya pulih. Hal ini terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang masih belum optimal dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi di Seruyan baru mencapai 4,01 persen di tahun 2022. Capaian ini merupakan pertumbuhan ekonomi terendah jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya pergerakan perekonomian kerakyatan, khususnya dalam menghadapi resesi global yang kemungkinan akan terjadi mulai tahun 2023.

Gambar IV.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Salah satu pendukung utama dalam pembangunan perekonomian adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing daerah. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun



antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau
- Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut.
- Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam yaitu :
 1. Kesiediaan masyarakat untuk pembangunan SPALD masih rendah;
 2. Kebiasaan masyarakat berperilaku BABS terutama masyarakat bantaran sungai;
 3. Belum berfungsinya penampungan system air limbah;



4. Sarana dan prasarana pengangkut lumpur tinja belum ada;
5. Sulitnya mendapatkan ketersediaan air baku yang layak di beberapa daerah tertentu untuk pembangunan SPAM

4. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh urusan pemerintahan

Idealnya, pelaksanaan reformasi birokrasi akan mewujudkan sistem pemerintahan beserta aparat pemerintah menjadi lebih profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Namun pada realitasnya, perwujudan implementasi reformasi birokrasi sebagai jalan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu pembenahan di berbagai aspek kinerja pemerintahan daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Secara umum, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seruyan terlihat dari pencapaian implementasi Reformasi Birokrasi. Terlihat pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan berada pada kategori



B dengan nilai 60,08 pada tahun 2021. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2020 yang mencapai 60,19 dengan kategori yang sama yakni B. Selain itu, capaian Nilai SAKIP juga masih berada di kategori B dengan nilai 63,37 di tahun 2021.

5. Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi

Aktivitas perekonomian di suatu daerah notabene memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengawasan secara ketat baik dalam hal ijin maupun pelaksanaannya. Sebagai daerah yang memiliki dominasi struktur ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan, maka aktivitas ekonomi dan masyarakat akan memberikan dampak pada kualitas lingkungan hidup. Dampak tersebut terlihat dari berbagai permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah seperti meningkatnya volume sampah dan penanganannya yang kurang memadai, optimalnya penyelarasan pembangunan fisik daerah dengan perencanaan tata ruang wilayah, rendahnya kualitas air daerah dan sebagainya.

Tabel IV.1
Permasalahan Pokok dan Permasalahan
Kabupaten Seruyan

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum Optimalnya Pembangunan Seruyan yang Adil dan Sejahtera	Belum optimalnya kapasitas SDM yang sehat dan berdaya saing	Sarana prasarana peningkatan pendidikan belum memadai
		Belum memadai dan meratanya aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Meningkatnya angka kemiskinan daerah	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem
		Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing



Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Permasalahan
	Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
		Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
		Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum merata
	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah masih kurang terintegrasi
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh
		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal
		Minimnya upaya peningkatan sistem informasi dalam optimalisasi kualitas pelayanan publik
	Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi	Meningkatnya aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun



program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

4.2.1 ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain



isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan seperti:

A. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut **Sustainable Development Goals (SDGs)**. Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*,



Economic Sustainability dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;



- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Seruyan berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Seruyan memiliki Topografi yang ekstrim. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Seruyan telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati sehingga berpotensi pada peningkatan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

B. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).



Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Seruyan juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar - 2,23 persen pada tahun 2020. Sedangkan upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan selama tahun 2021 mencapai 2,12 persen.

C. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 745.021,88 ha hutan atau mencapai 48,96 persen luas dari wilayah, Kabupaten Seruyan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Seruyan akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus



pada habitat satwa yang ada di Kabupaten Seruyan sekaligus memberikan kondisi lingkungan yang baik kepada ekosistem alam Nasional bahkan Internasional.

D. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).



Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Seruyan.



E. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada



meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

F. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke



depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Seruyan baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arahkan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
 - b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
 - c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 - d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 - f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 - g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
 - h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- dan



i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;



- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Pengentasan kemiskinan; dan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - Moderasi beragama; dan
 - Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - Pembangunan Rendah Karbon.
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Seruyan yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Seruyan.

Pertama, transformasi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Seruyan yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk mempermudah



investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia. Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (*Human Capital Index, World Bank, 2020*), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.

2) Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti



jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

- (1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (c) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (d) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (e) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- (2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f)



pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; (i) pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan (j) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah

- (3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.
- (4) Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- (5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis



kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar IV. 8
Peta Pengembangan Pulau Kalimantan



(sumber : Lampiran I Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)



Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian serta hilirisasi sumber daya alam untuk energi. Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri melalui integrasi dengan sektor lain. Pola penyediaan energi terintegrasi difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. Peningkatan penyediaan listrik juga diupayakan dengan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan. Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.

Saat ini sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 60,1 persen dan Pulau Sumatera sebesar 21,6 persen terhadap PDB nasional. Ketimpangan antarwilayah pulau masih sangat tinggi sedangkan ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau bervariasi, dimana yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum ditetapkan; belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan; terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta tingginya dinamika



politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan Wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (b) masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan, serta banjir; (c) tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (d) belum optimalnya peran daerah perbatasan; (e) menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, didukung oleh kebijakan pengelolaan ASN berbasis *smart governance*;

B. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19 /Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada



aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya yang masih belum dapat diperkirakan. Adanya berbagai macam varian baru yang terus bermunculan di beberapa negara di dunia menyebabkan ancaman COVID-19 masih perlu diperhatikan secara serius, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan dan pembatasan ruang gerak maupun aktivitas pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada saat yang sama, pemerintah juga terus secara bertahap melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis pandemi dan terus mengalami pertumbuhan dengan lebih baik. Peningkatan kualitas pembangunan nasional diupayakan untuk menyehatkan masyarakat, perekonomian, sekaligus menyehatkan APBN yang sudah sangat bekerja keras dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Pembangunan Indonesia pascapandemi COVID-19 memang perlu mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memulihkan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari cepat pulihnya Indonesia dari keterpurukan ekonomi sebagai dampak COVID-19. Hingga saat ini, stabilitas keuangan Indonesia relatif masih terjaga dan perbaikan ekonomi domestik



diperkirakan terus berlanjut. Kondisi ini disebabkan karena peningkatan konsumsi, investasi, kinerja ekspor-impor, dan membaiknya neraca pembayaran. Namun risiko atas memburuknya resesi global perlu untuk terus diwaspadai.

4.2.3 ISU STRATEGIS REGIONAL

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun isu strategis regional merupakan isu strategis kewilayahan baik level Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Seruyan yang memiliki dampak pada pelaksanaan pembangunan 2024-2026.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya..

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD Keempat (2021-2026), berbagai permasalahan pembangunan serta isu strategi pembangunan lainnya, maka Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 KALTENG MAKIN “BERKAH” (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Sebagai upaya untuk mencapai misi



pembangunan tersebut maka dirumuskan Misi Pembangunan jangka menengah periode pembangunan 2021-2026:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing
5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah Sekitar

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Visi pembangunan daerah harus dapat menjawab isu-isu strategis maupun permasalahan pembangunan daerah serta dapat diselesaikan dalam jangka menengah. Berpedoman pada hasil pembangunan yang telah dicapai dan berdasarkan pada beberapa isu strategis tersebut, maka visi pembangunan Kabupaten Lamandau dalam sisa beberapa tahun perencanaan kedepan sebagaimana telah ditetapkan pada awal masa RPJMD 2018-2023 yaitu:

"Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)"

Adapun misi pembangunan Kabupaten Lamandau 2018-2023 adalah:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;



- Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka rumusan tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal; dan
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025. Dengan peraturan daerah ini, setiap pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun wajib mengacu pada setiap kebijakan pembangunan dengan berfokus pada pencapaian visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA".



Adapun dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, maka disusun tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Seruyan adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun untuk pencapaiannya, dirumuskan pula sasaran pokok pembangunan Kabupaten Seruyan yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:
 - (1) Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Seruyan yang terpadu, efisien dan efektif.
 - (2) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Seruyan.
 - (3) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Seruyan.



- (4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
 - (5) Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (6) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
 - (7) Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Seruyan.
 - (8) Makin mantapnya budaya masyarakat Kabupaten Seruyan yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal ditandai oleh hal-hal berikut:
- (1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Seruyan semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.
 - (2) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdayasaing.
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:
- (1) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Seruyan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.



- (2) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan pedalaman.
- (3) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif ditandai oleh hal-hal berikut:
 - (1) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Seruyan yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
 - (2) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
 - (3) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
 - (4) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Seruyan yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:
 - (1) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Seruyan termasuk wilayah pedalaman, perdesaan.
 - (2) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
 - (3) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Seruyan yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - (4) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Seruyan.



- (5) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Seruyan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyesuaian antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Untuk itu, berikut ini disajikan inti dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD khususnya terkait dengan pengambilan kebijakan terkait ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Seruyan, terdiri atas:

1. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;



3. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya;
5. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
10. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
Strategi yang dilakukan dalam mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi, meliputi:
 1. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dalam suatu pengembangan kawasan di Teluk Segintung;
 2. Pembangunan pelabuhan multipurpose dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul;
 3. Pembangunan kawasan industri terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pertambangan;
 4. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;



5. Pembangunan pusat distribusi dan koleksi dengan pengembangan transportasi multi moda antara transportasi darat dan transportasi laut; dan
6. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan kawasan ekonomi terpadu.

Strategi yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan, meliputi:

1. Peningkatan pembangunan untuk mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Pengembangan interaksi kawasan dengan pengembangan transportasi antar wilayah dan antar kecamatan;
3. Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
4. Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan transportasi reguler antar wilayah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas transportasi dan perdagangan; dan
6. Pengembangan dan pembangunan desa-desa tertinggal.

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah, meliputi:

1. Peningkatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan, kebun swadaya bersertifikasi dan minapolitan yang berkelanjutan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian dan perikanan kawasan;



3. Peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sarana pendukungnya;
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan destinasi wisata;
5. Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di kota kuala pembuang sebagai pkI; dan
6. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan dan kegiatan pariwisata.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya, meliputi:

1. Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah dalam upaya pengembangan perekonomian daerah;
2. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
3. Peningkatan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.

Strategi yang dilakukan dalam pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan, meliputi:

1. Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;



5. Peningkatan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten seruyan;
6. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
7. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya masyarakat; dan
8. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Peningkatan teknologi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
4. Pemanfaatan pestisida secara terbatas dalam kerangka peningkatan produktivitas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
5. Penguatan pemasaran hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
6. Penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis dan mengembangkan kegiatan unggulan di dalam kawasan beserta prasarana;
7. Pengembangan dan pelestarian kawasan budi daya untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten seruyan;



8. Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian nasional; dan
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, meliputi:

1. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis;
2. Pengembangan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. Peningkatan kegiatan agro melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan, meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
2. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; dan
3. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.

Strategi yang dilakukan dalam pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, meliputi:



1. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
2. Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan fokus prioritas transportasi darat yang menghubungkan wilayah utara dan selatan yang aman dan lancar guna mendukung transportasi laut dan udara yang berada di kuala pembuang;
3. Pengembangan prasarana telekomunikasi dengan prioritas prasarana telepon seluler terutama di kawasan terisolasi (*blank spot area*);
4. Peningkatan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dengan fokus prioritas pltmh, plts, dan pln;
5. Peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
6. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas yang focus pada distribusi BBM dengan membangun depot BBM di Kuala Pembuang serta SPBU di setiap PKL dan PPK

Strategi yang dilakukan dalam mendorong peningkatan pelayanan transportasi, meliputi:

1. Peningkatan dan penambahan ruas jalan;
2. Peningkatan dan penambahan panjang run way bandara kapten mulyono kuala pembuang untuk menjadi bandara pengumpul;
3. Peningkatan pengembangan pelabuhan laut di teluk segitung;
4. Peningkatan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara; dan
5. Penyediaan dan pengembangan trayek darat, laut dan udara.

4.2.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, isu-isu strategis regional, hingga observasi baik dari



program kegiatan pembangunan dan sebagainya, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Seruyan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Seruyan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan SDM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat

Sebagai modal dasar pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu potensi besar dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan yang didasarkan pada kualitas dan pemerataan kesejahteraan sosial. Masih minimnya capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,67 pada tahun 2021, menjadikan Kabupaten Seruyan wajib meningkatkan capaian-capaian pembangunan, khususnya pelayanan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Capaian pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan peningkatan, menjadikan perencanaan pembangunan wajib memerhatikan kedua urusan tersebut, tanpa mengindahkan urusan pembangunan yang lain. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Seruyan.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Seruyan, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.



Dari sisi kesehatan, pembangunan kesehatan di Seruyan sudah menunjukkan hasil positif, namun untuk lebih mengoptimalkan kualitas SDM dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, maka peningkatan layanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Berbagai kasus penanganan kesehatan khusus harus menjadi salah satu fokus kebijakan kesehatan dalam perencanaan pembangunan ke depan seperti stunting/gizi buruk, kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.

Stunting sendiri merupakan suatu permasalahan yang mendapat sorotan pemerintah pusat akhir-akhir ini. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengharapkan adanya strategi yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

2. Pemulihan perekonomian yang mandiri berbasis sektor unggulan

Kabupaten Seruyan memiliki dua sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah yakni sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Capaian kedua sektor tersebut sangat menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga perlu dijaga stabilitasnya dalam kontribusi nilai tambah produksinya.

Seruyan memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang tinggi dikarenakan melimpahnya bahan mentah/barang primer di kawasan Seruyan, khususnya komoditas pertanian. Kondisi ini menjadi perlu untuk digaungkan, khususnya dalam promosi kepada investor sebagai daya tarik dalam menanamkan modal. Meskipun begitu, iklim investasi harus terus dikondusifkan baik dari sisi sosial maupun keamanan sehingga investor akan terus menanamkan modalnya dalam jangka panjang.

Dari sisi pengembangan perekonomian sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang cukup mendominasi aktivitas perekonomian Seruyan, maka dalam rangka Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) serta implementasi dari Peraturan Presiden



Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui pola kemitraan telah membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi melalui SK Bupati Nomor 188.45/305/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan, yang kemudian diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 188.45/145/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan. Merujuk pada Inpres Nomor 6 Tahun 2019.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, khususnya kepala sawit di Kabupaten Seruyan, diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mewujudkan pembangunan perekonomian Seruyan sekaligus menyejahterakan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal.

Melalui Kelompok Kerja Sertifikasi kelapa sawit berbasis Yurisdiksi, terdapat berbagai agenda penting yang sedang sudah dan sedang dikerjakan. Fokus kerja terbagi ke dalam 4 (empat) kategori utama, yakni Penguatan database petani, upaya perlindungan pada area bernilai konservasi tinggi, Penanganan sengketa dan Pendampingan atau pemberdayaan terhadap petani/pekebun.

Melalui kelembagaan Kelompok Kerja, juga telah disusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024. Dokumen ini telah disahkan melalui Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2022. Meskipun baru dikeluarkan pada tahun 2022, namun secara aktivitas kerja sudah dimulai sejak tahun 2020. Saat ini terdapat berapa target yang sedang dikerjakan diantaranya, advokasi kebijakan di tingkat Kabupaten untuk beberapa isu yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Lalu ada pendampingan terhadap petani yang sedang menjalankan sertifikasi secara swadaya. Dan yang terakhir adalah upaya penyelesaian keterlanjuran lahan dalam Kawasan hutan melalui penataan Kawasan.



Dalam rangka membangun sinergitas antara Kabupaten dan Desa sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Seruyan juga telah menginisiasi satu pendekatan Pembangunan berbasis Desa yang diberi nama Gawi Bapakat (Kerja Bersama). Pendekatan ini memberikan ruang kepada desa untuk menjalankan otonominya dalam menata serta membangun desa dengan mengandalkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing. Diharapkan melalui pendekatan ini, desa dapat mencanakan berbagai prioritas pembangunannya seperti Desa menanam, desa penjaga hutan, desa pesisir, desa konservasi dan lainnya.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kinerja pemerintahan memiliki progress positif. Beberapa pencapaian yang cukup baik yakni pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP dengan capaian kategori B. Selain itu, cukup tingginya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 87,59 merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Seruyan.

Terjaganya kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Seruyan ini tentu harus terus dilanjutkan dengan mendorong peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembenahan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi agar lebih efektif dan efisien. Seluruh elemen pemerintahan baik perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian maupun penelitian dan litbang harus memiliki sinkronisasi dan integrasi dalam mewujudkan visi pembangunan Seruyan.

Selanjutnya, untuk terus meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, maka transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas.



Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Transformasi digital ini nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.

4. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan



sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah “mengeksplorasi” hutan demi kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Seruyan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Adanya aktivitas transformasi perekonomian yang meningkat dari eksploitasi sumber daya tidak terbaharukan menjadi sumber daya alam terbaharukan tentu menjadi salah satu rekomendasi utama dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan.

5. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan cara memfasilitasi di bawah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Hal ini terlihat dari rendahnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Seruyan yang memungkinkan pendapatan yang diterima masih dibawah



upah layak. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Adapun target kemiskinan ekstrem secara Nasional diharapkan mampu mencapai 0 persen di tahun 2024 sehingga perlu strategi khusus untuk mewujudkannya.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di Tahun 2023. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, dalam RPD tidak ada visi misi dan program kampanye dikarenakan pemilu akan dilakukan di Tahun 2024. Sehingga Bab V dalam RPD ini memuat tujuan dan sasaran, yang dirumuskan berdasarkan RPJPD (arah pembangunan Tahap IV) dan isu strategis aktual. Rumusan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan, yang dijabarkan melalui sasaran dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta target pembangunan dari Tahun 2024 hingga 2026.

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka Panjang tersebut, dirumuskan misi pembangunan jangka Panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.



5.1 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Tahap Ke IV, pembangunan Kabupaten Seruyan diarahkan pada pemerataan pembangunan pada bidang Ekonomi, Infrastruktur, pemerintahan dan Lingkungan. Perumusan tujuan dan sasaran digambarkan pada kerangka logis sebagai berikut:

Gambar V.1

Kerangka logis Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan





Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka Indikator Makro dan target pembangunan Kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1.

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target		
			2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	68,24	68,92	69,25	69,58
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,43	6,72	6,36	6,00
3	Indeks Gini (Nilai)	0,292	0,286	0,283	0,280
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96	3,86	3,81	3,75
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,01	4,50	4,75	5,00
6	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	65,08	74,24	79,59	85,00

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan nasional dan daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan target pembangunan Nasional (RPJMN).



Tabel V.2.

Perbandingan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024				RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah					RPD Kab. Seruyan				
	Indikator	Capaian	Target		Indikator	Capaian	Target			Indikator	Capaian	Target		
		2022	2023	2024		2022	2024	2025	2026		2022	2024	2025	2026
1	IPM (Nilai)	72,91	73,31	75,54	IPM (Nilai)	71,63	73,42	73,95	74,48	IPM (Nilai)	68,24	68,92	69,25	69,58
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5	6,0	Tingkat Kemiskinan (%)	5,22	4,66	4,41	4,36	Tingkat Kemiskinan (%)	7,43	6,72	6,36	6,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3	3,6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	3,90	3,70	3,50	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96	3,86	3,81	3,75
4	Rasio Gini (Nilai)	0,381	0,375	0,360	Indeks Gini (Nilai)	0,309	0,316	0,310	0,304	Indeks Gini (Nilai)	0,292	0,286	0,283	0,28
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,31	5,5	6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,45	5,80	5,90	6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,01	4,50	4,75	5,00
6	Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	PDRB per Kapita (Juta Rp)					PDRB per Kapita (Juta Rp)	65,08	74,24	79,59	85,00

Sesuai pernyataan sebelumnya, rumusan tujuan dan sasaran dinyatakan dengan indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2026. Sesuai rumusan kerangka logis pada gambar 5.1 diatas maka berikut penjabaran tujuan pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026:



➤ **Tujuan 1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya adalah peningkatan daya saing masyarakat, daya saing masyarakat akan berdampak pada produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, kondisi kesehatan, pendapatan dan kualitas aktivitas sosial masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat, maka dirumuskan sasarannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- 3) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
- 4) Meningkatnya kualitas kesempatan kerja

➤ **Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan masyarakat dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa mengalami pergerakan/peningkatan. Peningkatan ekonomi masyarakat diawali dari produktivitas masyarakat, jika produktivitas masyarakat tinggi maka akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas sector unggulan Kabupaten Seruyan. Potensi Sumber Daya Alam sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian Kabupaten Seruyan. Hal ini terlihat dari sector pertanian yang cukup mendominasi, namun beberapa periode terakhir terlihat adanya pergeseran antara sector pertanian dengan non pertanian. Hal ini menunjukkan Kabupaten Seruyan mulai mengembangkan sector pertanian dengan spesialisasi produk yang lebih beragam, tidak bergantung pada sector pertanian.



Dengan ini pemerintah Kabupaten Seruyan perlu memberikan dukungan kepada sektor-sektor unggulan. Dengan ini diharapkan keuntungan ekonomis yang akan didapatkan dari sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang lebih efektif kepada masyarakat, yang mana sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga perekonomian semakin maju, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Setelah perekonomian semakin maju maka diharapkan pemerintah daerah mampu membiayai aktifitas pembangunan dari pendapatan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, maka dirumuskan sasarannya sebagai berikut:

1) Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah

➤ **Tujuan 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**

Tata kelola pemerintahan merupakan pengelolaan sistem kinerja pemerintah daerah yang proposional sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik terlihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan, ketepatan, kecepatan dan ketulusan aparat pemerintah dalam melayani masyarakat Seruyan. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur yang terukur antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Keempat hal tersebut harus saling terintegrasi sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat serta munculnya kesadaran dan pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka dirumuskan sasarannya sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT



➤ **Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas**

Pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar, dengan hal itu dapat tercapai keseimbangan dalam pembangunan. Pembangunan menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh tingkat kesejahteraannya, yang sebagian besar melalui pengelolaan sumber daya alam, atau membentuk sumber daya buatan dengan sentuhan teknologi. Sumber daya alam memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomi yang dikelola dan dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, akan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Dengan ini, maka perlu komitmen yang tinggi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai tujuan diatas, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas maka dirumuskan sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026 dapat dilihat pada tabel V.3 sebagai berikut:



Tabel V.3.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026

RPD			Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
Tujuan	Sasaran	Indikator			2024	2025	2026
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68,24	68,92	69,25	69,58
		Tingkat Kemiskinan	%	7,43	6,72	6,36	6,00
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,46	69,51	69,55	69,60
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,99	8,12	8,17	8,22
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,20	12,26	12,32
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,292	0,286	0,283	0,280
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	3,86	3,81	3,75
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	4,50	4,75	5,00
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,13	4,57	4,78	5,00
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,99	4,50	4,75	5,00
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62,25)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B (63,81)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)



RPD			Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
Tujuan	Sasaran	Indikator			2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,97*	86,29	87,49	88,69
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,86	71,07	71,3	71,54
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	48	59,7	59,8	59,9
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,8	81,30	81,40	81,50
	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Nilai	144,4*	140	138	135

*Data Capaian Tahun 2021

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan Perangkat Daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan. Keterkaitan Kebijakan (IKU) daerah dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel V.4.
Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia			
		Tingkat Kemiskinan			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
				2. Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
				3. Persentase Balita Gizi Buruk (%)	Dinas Kesehatan
				4. Prevalensi Balita Stunting (%)	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
				2. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Angka Kesakitan Akibat Penyakit (%)	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	RSUD
			Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	RSUD
				Rasio Daya Tampung RS	RSUD
				Rata-rata waktu tunggu pelayanan	RSUD
			Meningkatkan taraf hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya perencanaan keluarga	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH			
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Dinas Pendidikan
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasiona	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
					Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	
		APK SMP				
		APM SD				
		APM SMP				



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Dinas Pendidikan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya partisipasi sekolah/lembaga yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Dinas Pendidikan
				Iklim keamanan SD	
				Iklim keamanan SMP	
				Iklim kebinekaan SD	
				Iklim kebinekaan SMP	
				Iklim inklusivitas SD	
				Iklim inklusivitas SMP	
			Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya keinginan baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang terdaftar	Persentase tenaga kerja yang berpenghasilan sesuai UMK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK	Persentase perusahaan yang menerapkan UMK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/eks transmigrasi yang dibina	Persentase tingkat kesejahteraan masyarakat transmigrasi/eks transmigrasi yang dibina	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Seruyan	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Dinas Sosial
			Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Dinas Sosial
			Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan	Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meratanya pemberdayaan Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meratanya cadangan pangan di seluruh wilayah	Persentase Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Prosentase ketersediaan pangan utama dan pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Keamanan Pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Persentase Angkatan Kerja yang dilatih yang bekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran wirausaha muda dalam perekonomian	Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas pertanian unggulan	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya mutu dan produksi pertanian	Produktivitas pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan Kontribusi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Prosentase kontribusi pertanian, peternakan dan perkebunan dalam pertumbuhan ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan produktivitas Sektor pertanian tanaman pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas perikanan	LPE subkategori perikanan	Dinas Perikanan
			Meningkatnya mutu dan produksi perikanan	Persentase Produksi Perikanan (%)	Dinas Perikanan
				Jumlah produksi perikanan	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	Dinas Perikanan
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatkan Kapasitas UMKM daerah	Persentase UMKM yang naik skala usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya pertumbuhan Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatkan kapasitas Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan standarisasi harga jual beli perdagangan dan perlindungan konsumen	Pengawasan Sub Kegiatan dan persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan persentase pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Persentase peningkatan investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	LPE ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatkan kapasitas konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase akses pengolahan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase akses pengolahan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam IMB	Rasio kepatuhan IMB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang mudah diakses secara merata	Rasio permukiman layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Terselenggaranya pembangunan perumahan dan pemukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Pertanahan
			Terlaksananya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai rencana aksi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana , sarana dan utilitas yang memadai	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Terfasilitasinya penerbitan sertifikat bagi masyarakat dan pembangunan kabupaten	Penyelesaian kasus tanah Negara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap lahan untuk pembangunan perumahan, permukiman dan perkebunan serta kepentingan lainnya	Penyelesaian izin lokasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase luas lahan bersertifikat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pelaporan LHKPN	Semua Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Semua Kecamatan
			Terwujudnya pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total Desa	Semua Kecamatan
			Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan di setiap perangkat daerah	Indeks Merit Sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Meningkatkan kompetensi kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Nilai SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Nilai SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah
			Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
			Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel	Derajat Fiskal Otonomi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Terwujudnya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Nilai Indeks Data Statistik Sektorial yang disajikan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Terwujudnya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Terwujudnya masyarakat aman dan tentram	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Satuan Polisi Pamong Praja



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Terjaminnya ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Satuan Polisi Pamong Praja
				Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatkan kesejahteraan anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan stabilitas ipoleksosbud daerah	Persentase konflik ipoleksosbud yang diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP elektronik	Persentase perekaman KTP elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kinerja DPRD Seruyan	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat DPRD



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			produk hokum oleh DPRD		
			Meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya kapasitas kearsipan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Persentase Kuantitas dan Kualitas Sarana prasarana transportasi yang terlaksana	Dinas Perhubungan
			Meningkanya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Transportasi	Persentase sarana transportasi yang diadakan	Dinas Perhubungan
				Persentase prasarana transportasi yang diadakan / dibangun	Dinas Perhubungan
				Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	Dinas Perhubungan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Seruyan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Kualitas Udara	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya penanganan sampah dan limbah	Persentase volume sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase akses pengolahan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase akses pengolahan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam IMB	Rasio kepatuhan IMB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatkan Responsifitas dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKU PERANGKAT DAERAH		
			TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Peningkatan kualitas penanganan bencana kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate 15 Menit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya layanan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Salah satu proses perencanaan adalah menentukan tindakan masa depan, dan proses memilih urutan pilihan yang dapat dimaksimalkan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut merupakan langkah taktis strategis dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Langkah strategis ini dinamakan strategi, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan nasional dan daerah agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.



6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan melalui program – program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026. Strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1.
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026

Tujuan		Sasaran	Strategi	
Tujuan 1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat				
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Optimalisasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		
	Sasaran 3	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	2	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan				
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	4	Pengembangan potensi agroindustri daerah
			5	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah



Tujuan		Sasaran	Strategi	
Tujuan 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)				
	Sasaran 6	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	6	Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		
Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas				
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	7	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah		

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026:

1. Optimalisasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah,

Strategi 1
Optimalisasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan



Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang dengan matang untuk mengimbangi kebutuhan kualitas daya saing manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dengan memperhatikan kualitas dan aksesibilitas pelayanan



Pendidikan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan berbasis IT. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau layanan Pendidikan dengan lebih mudah, nyaman dan mampu mengembangkan minat, bakat, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan usaha. Selain Pendidikan, Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar kualitas layanan kesehatan secara merata dapat lebih mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang mudah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

2. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Dengan kondisi ekonomi saat ini, dampak dari Covid-19 yang masih terasa, kenaikan inflasi yang terjadi saat ini, membuat perekonomian



masyarakat tidak stabil. Walaupun Kabupaten Seruyan tidak begitu ekstrim terdampak Covid-19. Namun beberapa bidang sector ekonomi mengalami pukulan yang cukup terasa. Hal ini mengakibatkan perekonomian daerah mulai terguncang sehingga kemiskinan mulai meningkat pada tahun 2021.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata disuatu daerah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu penanganan kemiskinan yang dapat dilakukan yaitu optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan penduduk miskin di



perdesaan harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Seruyan, ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi di desa. Dengan memaksimalkan potensi sumberdaya terutama pada bidang pertanian, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah.

3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kualitas daya saing SDM, tenaga kerja yang unggul dan terampil akan lebih mudah



mendapatkan pekerjaan. Namun selain kualitas tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja juga perlu diperhatikan. Banyak factor yang mempengaruhi tingginya Produktivitas tenaga kerja, selain kualitas skill yang dimiliki, besarnya peluang penempatan pekerja, kemauan kerja keras dan kerja cerdas untuk

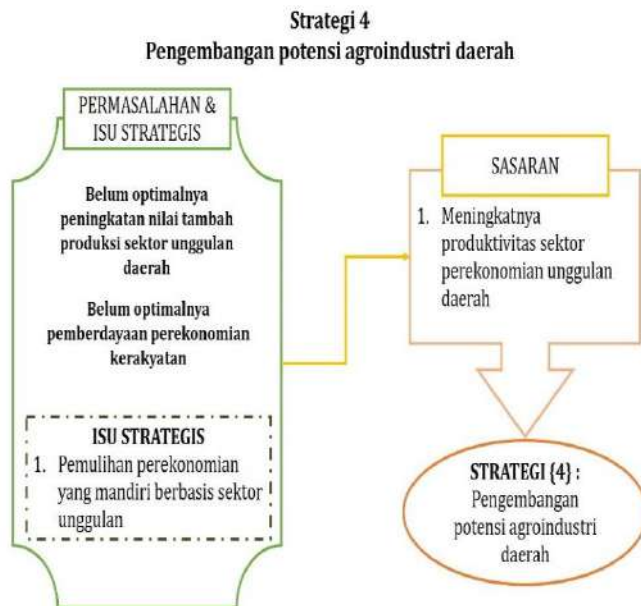
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini akan membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan usaha di Kabupaten Seruyan yang akan berdampak banyaknya penyerapan tenaga kerja. Hal ini perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, sehingga angkatan kerja ini mampu memenuhi kualifikasi dari bidang usaha yang dibutuhkan sehingga peluang dan kesempatan kerja yang tersedia.

4. Pengembangan potensi agroindustri daerah

Pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan mengolah potensi sumber daya yang tersedia dengan maksimal. Percepatan pembangunan ekonomi daerah harus berfokus pada pengembangan



Kawasan dan produk andalannya. Kabupaten Seruyan mempunyai



sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan, sektor pertanian ini memiliki potensi komoditas tanaman pangan dan hortikultura berupa padi varietas lokal (siam epang) dan pisang kepok yang memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah yang cukup signifikan. Pertanian

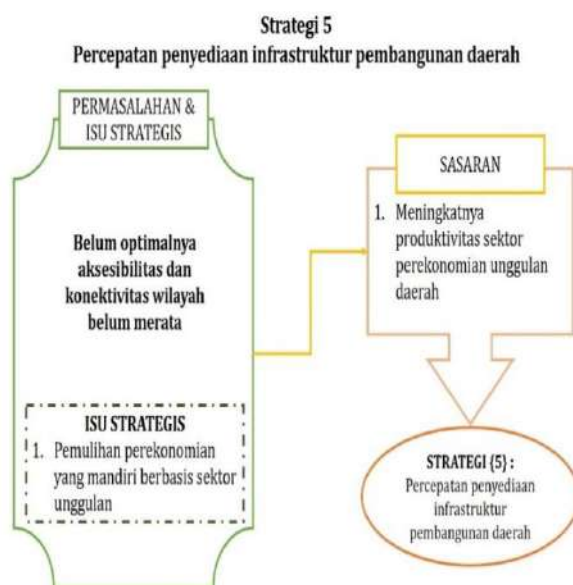
merupakan sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi, selain mencukupi kebutuhan pangan, sector pertanian dapat berkembang menjadi sektor industri (agroindustri) unggulan daerah. Titik krusial pembangunan ekonomi adalah bergesernya produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya pengembangan potensi agroindustri maka diharapkan mampu memberikan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan para petani, pekebun dan peternak. Menindaklanjuti hal tersebut dan melihat potensi yang ada Kabupaten Seruyan sudah berkomitmen untuk mengembangkan potensi SDA dengan optimalisasi kemitraan dalam pengembangan potensi perkebunan kerakyatan berkelanjutan. Hal ini dipertegas dengan adanya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, agar pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit selalu menjaga dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Selain itu upaya yang perlu dilakukan pengembangan perkebunan kelapa rakyat, digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan, serta



Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis. Dengan ini diharapkan pengembangan potensi agroindustri di Kabupaten Seruyan ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah

Infrastruktur menjadi salah satu bukti pembangunan fisik yang mampu memberikan pengaruh cukup signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada saat ini Kabupaten Seruyan berupaya



melaksanakan pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, terutama untuk jalan penghubung dan daerah perbatasan, jembatan, kemudian drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan berkelanjutan. Pembangunan

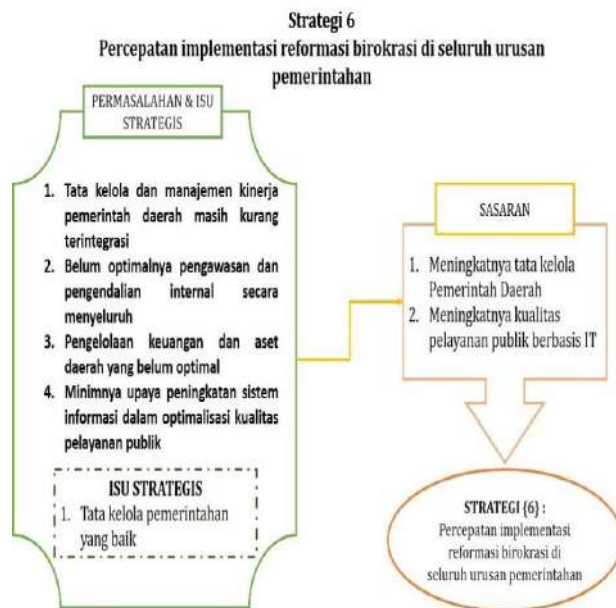
Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Seruyan. Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan aktivitas masyarakat. Sehingga diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Seruyan.

6. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan

Sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan reformasi birokrasi. Birokrasi menjadi instrument



sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan



daerah. Konsep birokrasi dimaknai sebagai proses system secara rasional menjamin mekanisme dan sistem kerja yang terstruktur dan teratur. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Menindaklanjuti hal tersebut maka berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi tata kelola keuangan daerah, dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Memahami hal tersebut terkait dengan keuangan daerah menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kabupaten Seruyan harus mencari peluang dalam pendanaan daerah, selain meningkatkan PAD dari retribusi dan pajak perlu mencermati, mencari dan mendapatkan sumber pendanaan yang lain seperti dari BUMD, BUMDes, CSR yang mampu berkolaborasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Seruyan. Sehingga dengan kerjasama dengan pihak yang mampu berkontribusi dalam pembangunan, diharapkan memberikan dampak pembangunan yang signifikan dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seruyan. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan



penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.

7. Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian

Dalam pembangunan ekonomi terkadang aktivitasnya berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup, Pengembangan sektor industri ini



memungkinkan terjadinya degradasi lingkungan. Hal ini dapat memicu pencemaran bahkan meracuni lingkungan yang akhirnya secara bertahap mampu mendegradasi ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem,

menyebabkan terganggunya komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem lingkungan hidup. Dengan ini perlu adanya upaya pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan sudah berkomitmen melalui Peraturan Bupati Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024. Dengan ini diharapkan pembangunan ekonomi dapat berlangsung dengan baik dan mampu meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.



6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI.1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026



Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.



1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pembangunan tahun pertama (2024), berorientasi pada pembangunan ekonomi, SDM dan lingkungan maka tema pembangunan tahun ini adalah :

“Ketahanan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan”

Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2024 pembangunan Kabupaten Seruyan fokus utama pembangunannya adalah pada bidang ekonomi, SDM dan lingkungan. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, mengingat bahwa Kabupaten Seruyan memiliki potensi besar pada produk-produk pertanian maka untuk pengembangannya perlu diupayakan pembangunan agroindustri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk produk mentah pertanian diolah menjadi produk yang bernilai lebih. Selain penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Seruyan masih perlu memperhatikan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat.

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Pembangunan tahun kedua (2025) ini merupakan estafet pembangunan tahun 2024, pada tahun ini mengusung tema pembangunan,

“Penguatan tata kelola pemerintahan guna akselerasi kesejahteraan sosial”

Merujuk tema pembangunan ini Kabupaten Seruyan pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh



pemerintah yaitu pada bidang ekonomi dengan peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja. Kemudian upaya tersebut diperkuat dengan pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, serta mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Melihat kebutuhan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Seruyan, perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan, Upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh Pemerintah daerah dengan upaya digitalisasi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan sosial masyarakat yang belum terpenuhi dengan maksimal pada tahun ini Kabupaten Seruyan perlu melakukan optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan pembangunan tahun ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.

3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Pada tahun 2026, menjadi tahun terakhir dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan, pada tahun ini diharapkan banyak capaian pembangunan yang tercapai. Dengan demikian tahun 2026 ini mengusung tema pembangunan

“Menuju Seruyan Yang Madani, Adil Dan Sejahtera”

Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Seruyan difokuskan pembangunan yang merata pada seluruh aspek terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dan pemerintahan. Dengan kolaborasi dan terintegrasi kebijakan yang kemudian dilaksanakan dengan optimal melalui program dan kegiatan diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Sehingga akan mempercepat



meningkatkan kualitas kehidupan pada seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat Kabupaten Seruyan akan semakin sejahtera.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel VI.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan				
				2024	2025	2026		
Tujuan 1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat								
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Optimalisasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	Pemerataan kualitas layanan kesehatan			
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat			Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT			
	Sasaran 3	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	2	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			
					Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah			
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja			



Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Tahapan		
						2024	2025	2026
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan								
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	4	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Optimalisasi kemitraan dalam pengembangan potensi perkebunan kerakyatan berkelanjutan			
					Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan			
					Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis			
					Peningkatan kompetensi Industri Mikro Kecil			
			5	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan			



Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Tahapan		
						2024	2025	2026
Tujuan 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)								
	Sasaran 6	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	6	Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			
					Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			
					Digitalisasi tata kelola keuangan daerah			
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT			Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			
Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas								
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	7	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup			
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah			Optimalisasi penanganan bencana daerah			



6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut penjabaran program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan selama tahun 2024-2026.

Tabel VI.3.

Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta Target dan Pagu Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
Mewujudkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat					Indeks Pembangunan Manusia	68,24	68,92		69,25		69,58		69,58		
					Tingkat Kemiskinan	7,43	6,72		6,36		6,00		6,00		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Harapan Hidup	69,46	69,51		69,55		69,60		69,60		
					Optimalisasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat sesuai Standar	100 %	100 %	69.464.303.302	100%	71.890.000.000	100%	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk	100 per 100.000	100 per 100.000	2.400.000.000	100 per 100.000	2.420.000.000	100 per 100.000	2.450.000.000	100 per 100.000	7.270.000.000	DINAS KESEHATAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani	100 %	100 %	400.00 0.000	100%	600.00 0.000	100%	800.00 0.000	100 %	1.800.00 0.000	DINAS KESEHATAN
			Rata-rata Lama Sekolah	7,99*	8,12		8,17		8,22		8,22				
			Harapan Lama Sekolah	12,02*	12,2		12,26		12,32		12,32				
	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Berbasis IT		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	104.04 3.491. 727	100%	113.26 2.430. 765	100 %	122.19 8.181. 080	100 %	339.504. 103.572	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
				Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	41,72 %	41,72 %	1.563. 304.41 6	43,72 %	1.563. 304.41 6	44,62 %	1.563. 304.41 6	44,62 %	4.689.91 3.248	DINAS PENDIDIKAN	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	80 %	50 %	391.30 0.000	51 %	430.49 3.400	52 %	439.03 0.600	52 %	1.260.82 4.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	73.000 Judul	73.500 Judul		74.000 Judul		74.500 Judul		74.500 Judul			
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37,50	37,75		38,00		38,25		38,25			

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
					Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,21	6,30		6,40		6,50		25,41		
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat				Indeks Gini	0,292	0,286		0,283		0,28		0,28		
		Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Tertib Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang Atau Barang di Kabupaten Seruyan	75 %	75 %	303.00 0.000	75%	345.00 0.000	75%	391.00 0.000	75%	391.000. 000	DINAS SOSIAL
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	80 %	80 %		80%		80%		80%		DINAS SOSIAL
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100 %	100 %	375.00 0.000	100%	415.00 0.000	100%	460.00 0.000	100%	460.000. 000	DINAS SOSIAL
					Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	80 %	80 %		80%		80%		80%		DINAS SOSIAL

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan Fakir Miskin	80%	80%	709.56 3.345	80%	450.00 0.000	80%	500.00 0.000	80%	500.000. 000	DINAS SOSIAL
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Desa yang memiliki Lembaga Aktif	14,56%	14,56 %	2.300. 000.00 0	17,48 %	2.300. 000.00 0	24,45 %	2.200. 000.00 0	71,05 %	6.800.00 0.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	13,40%	13,40 %	400.00 0.000	13,40 %	400.00 0.000	13,40 %	400.00 0.000	40,20 %	1.200.00 0.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan	90%	90%	2.400. 000.00 0	90%	2.900. 000.00 0	90%	2.000. 000.00 0	90%	7.300.00 0.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	98%	98%	838.94 1.946	99%	1.004. 021.39 1	100%	1.054. 021.39 1	100%	1.054.02 1.391	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	100%	100%	250.00 0.000	100%	150.00 0.000	100%	250.00 0.000	100%	250.000. 000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja				Tingkat Pengangguran Terbuka	3,96	3,86		3,81		3,75		3,75		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	85 %	85 %	286.766.000	85%	315.442.600	85%	346.995.150	85%	949.203.750	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	60 %	60 %	58.500.000	60%	62.350.000	60%	76.585.000	60%	197.435.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Program perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersusunnya Perencanaan tenaga kerja Kabupaten Seruyan	100 %	100 %	150.000.000	100%	65.000.000	100%	200.000.000	100%	415.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berprestasi	98,99%	100%	981.652.837	100%	1.160.375.763	100%	1.296.662.127	100%	3.438.690.726	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan					Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,5		4,75		5,00		5,00		
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah				LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,13	4,57		4,78		5,00		5,00		
					LPE Kategori Industri Pengolahan	3,99	4,5		4,75		5,00		5,00		
		Pengembangan Potensi Agroindustri Daerah	Optimalisasi Kemitraan Dalam Pengembangan Potensi Perkebunan Kerakyatan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	4 ton/hektar	4 ton/hektar	799.516.000	4 ton/hektar	1.486.504.000	4 ton/hektar	1.731.504.000	4 ton/hektar	4.017.524.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	25 %	25 %	482.400.000	25%	600.000.000	25%	505.000.000	25 %	1.587.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
				Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	91%	91,00 %	391.86 3.917	92%	376.08 4.371	92%	322.79 1.930	92%	1.090.74 0.218	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Wabah Pertanian	100 %	100 %	204.40 0.000	100%	250.00 0.000	100%	200.00 0.000	100 %	654.400. 000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	4 ton/hektar	4 ton/hektar	1.580. 674.80 0	4 ton/hektar	1.691. 107.20 0	4 ton/hektar	2.096. 571.02 9	4 ton/hektar	5.368.35 3.029	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.521,66 Ton	10.750 ,94 Ton	470.00 0.000	10.912 ,56 Ton	400.00 0.000	10.912 ,56 Ton	400.00 0.000	10.912 ,56 Ton	1.270.00 0.000	DINAS PERIKANAN
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.458,41 Ton	8.571, 54 Ton	670.00 0.000	10.371 ,57 Ton	640.00 0.000	10.371 ,57 Ton	620.00 0.000	10.371 ,57 Ton	1.930.00 0.000	DINAS PERIKANAN
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	4.564,89 Ton	2.772, 76Ton	170.00 0.000	2.940, 88 Ton	170.00 0.000	2.990, 34 Ton	170.00 0.000	2.990, 34%	510.000. 000	DINAS PERIKANAN
			Pengembangan Kawasan Terpadu Guna Meningkatkan Pembangunan Agribisnis	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100%	100%	1.000. 000.00 0	100%	750.00 0.000	100%	900.00 0.000	100%	2.650.00 0.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	100%	200.00 0.000	100%	125.00 0.000	100%	125.00 0.000	100%	450.000. 000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Koperasi	100%	100%	200.00 0.000	100%	125.00 0.000	100%	125.00 0.000	100%	450.000. 000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	98 %	100 %	110.00 0.000	100 %	135.00 0.000	100 %	155.00 0.000	100 %	400.000. 000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Program Promosi Penanaman Modal	Rasio Potensi dan Peluang Investasi yang di prosikan	44 Dokumen	2 KK	77.500 .000	2 KK	97.500 .000	2 KK	100.00 0.000	2 KK	275.000. 000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Peningkatan Kompetensi Industri Mikro Kecil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pembangunan industry	100%	100%	4.171. 601.65 1	100%	2.858. 517.58 3	100%	2.855. 457.51 0	100%	9.855.57 6.744	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Daerah	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Dan Perumahan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	28,54%	49%	73.483 .305.0 15	54,08 %	90.997 .291.9 71	54,49 %	94.401 .848.5 39	54,49 %	258.882. 445.525	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang ditangani akibat bencana	90%	90%	745.57 6.000	90%	1.065. 576.00 0	90%	1.065. 576.00 0	90%	2.876.72 8.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	3.662 orang	3.750 orang	586.91 3.502	3.795 orang	800.59 4.000	3.840 orang	847.57 3.000	3.840 orang	2.235.08 0.502	DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
				Program Kawasan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	85%	85%	1.354.614.000	85%	2.054.614.000	85%	2.280.695.000	85%	5.689.923.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	85%	85%	462.000.000	85	562.000.000	85	682.500.000	85%	1.706.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80%	80%	220.750.000	80%	394.352.000	80%	580.750.000	80%	1.195.852.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	7,23%	40,55 %	13.440.000.000	45,54 %	15.690.000.000	50,00 %	22.702.500.000	50,00 %	51.832.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	62,00%	73,49 %	9.050.000.000	75,32 %	9.550.000.000	77,21 %	11.550.000.000	77,21 %	30.150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						Indeks Reformasi Birokrasi	B (62,25)	B (67,00)		B (69,00)		BB (71,00)		BB (71,00)	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP	B (63,81)	B (67,50)		B (69,00)		BB (70,50)		BB (70,50)	
		Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30%	30%	845.000.000	35%	1.155.000.000	40%	1.175.000.000	40%	3.175.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Karier	80%	80%	2.525.000.000	80%	2.845.000.000	80%	3.125.000.000	80%	8.495.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	2.230.023.900	100%	2.369.111.898	100%	4.037.335.253	100%	4.037.335.253	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Wilayah	100%	100%	1.759.092.000	100%	4.333.000.000	100%	2.102.344.000	100%	2.102.344.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Wilayah	100%	100%		100%		100%		100%		
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100%	100%		100%		100%		100%		
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
					Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur										
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	90%	80%	340.76 8.000	80%	340.76 8.000	100%	340.76 8.000	87%	1.022.00 0	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah kebijakan dan laporan Tata Kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	9 Laporan	9 Lapor an	825.40 6.900	9 Lapor an	825.40 6.900	9 Lapor an	825.40 6.900	27 Lapor an	2.476.22 0.700	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	90%	90%	2.729. 850.00 0	95%	2.729. 850.00 0	100%	2.729. 850.00 0	95%	8.189.55 0.000	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90%	90%	80.000 .000	95%	80.000 .000	100%	80.000 .000	95%	240.000. 000	SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkata n Sistem Pengawasa n Dan Pengendali an Internal Penyelengg araan Pemerintah an	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	85%	85%	2.325. 000.00 0	87%	2.375. 000.00 0	90%	2.400. 000.00 0	90%	7.100.00 0	INSPEKTORAT DAERAH
				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah	90%	90%	440.00 0.000	90%	405.00 0.000	90%	405.00 0.000	90%	1.250.00 0.000	INSPEKTORAT
			Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98%	98%	219.09 9.588. 980	98%	236.39 2.856. 951	98%	242.53 5.037. 962	98%	698.027. 483.893	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	2.846. 956.90 0	100%	3.651. 956.90 0	100%	3.631. 956.90 0	100%	10.130.8 70.700	BADAN PENDAPATA DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab			
							K	P	K	P	K	P	K	P				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT		Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis IT		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,97	86,29		87,49		88,69		88,69		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	100 %	43 %	1.075.755.000	45 %	1.075.755.000	50 %	1.399.686.000	100 %	3.551.196.000			
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	47 Kelompok	53 Kelompok		53 Kelompok		53 Kelompok		53 Kelompok			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100 %	60 %	197.700.000	60 %	197.700.000	60 %	197.700.000	60 %	593.100.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	98,76%	98,76 %	193.412.000	99,59 %	393.924.000	99,60 %	481.014.000	99,60 %	1.068.350.000		
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan izin sesuai SOP dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	99%	100%	225.000.000	100%	255.000.000	100%	285.000.000	100%	765.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,86	71,07		71,3		71,54		71,54					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Air	48	59,7		59,8		59,9		59,9			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
					Indeks Kualitas Udara	87,8	81,3		81,4		81,5		81,5					
		Meminimalisir Potensi Kerusakan Lingkungan	Mengoptimalkan Pengawasan Aktivitas	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80 %	80 %	193.991.750	80 %	247.722.487	80 %	254.236.749	80 %	695.950.986				
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
							K	P	K	P	K	P	K	P	
		n Hidup Pada Aktivitas Perekonomian	Ekonomi Yang Berpotensi Degradasi Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara										
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang diawasi	80 %	80 %	85.849.000	80 %	96.633.900	80 %	100.000.000	80 %	282.482.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana Daerah				Indeks Risiko Bencana	144,4	140		138		135		135		
			Optimalisasi Penanganan bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	6.915.000.000	100 %	4.215.000.000	100 %	4.110.000.000	100 %	15.240.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



6.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Seruyan, perlu memperhatikan kebijakan spasial dalam pengembangan kewilayahan terutama pada pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Seruyan yang meliputi :

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten

Sesuai penjelasan diatas, berikut penjabaran pengembangan kawasan strategis Kabupaten Seruyan.

1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yaitu:
 - a. Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB)
 - b. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati yaitu Taman Nasional Tanjung Puting
2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:
 - 1) Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak
 - 2) Kawasan pengembangan peternakan berupa Kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia
 - 3) Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
 - 4) Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Seruyan Hilir
 - 5) Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan berpotensi

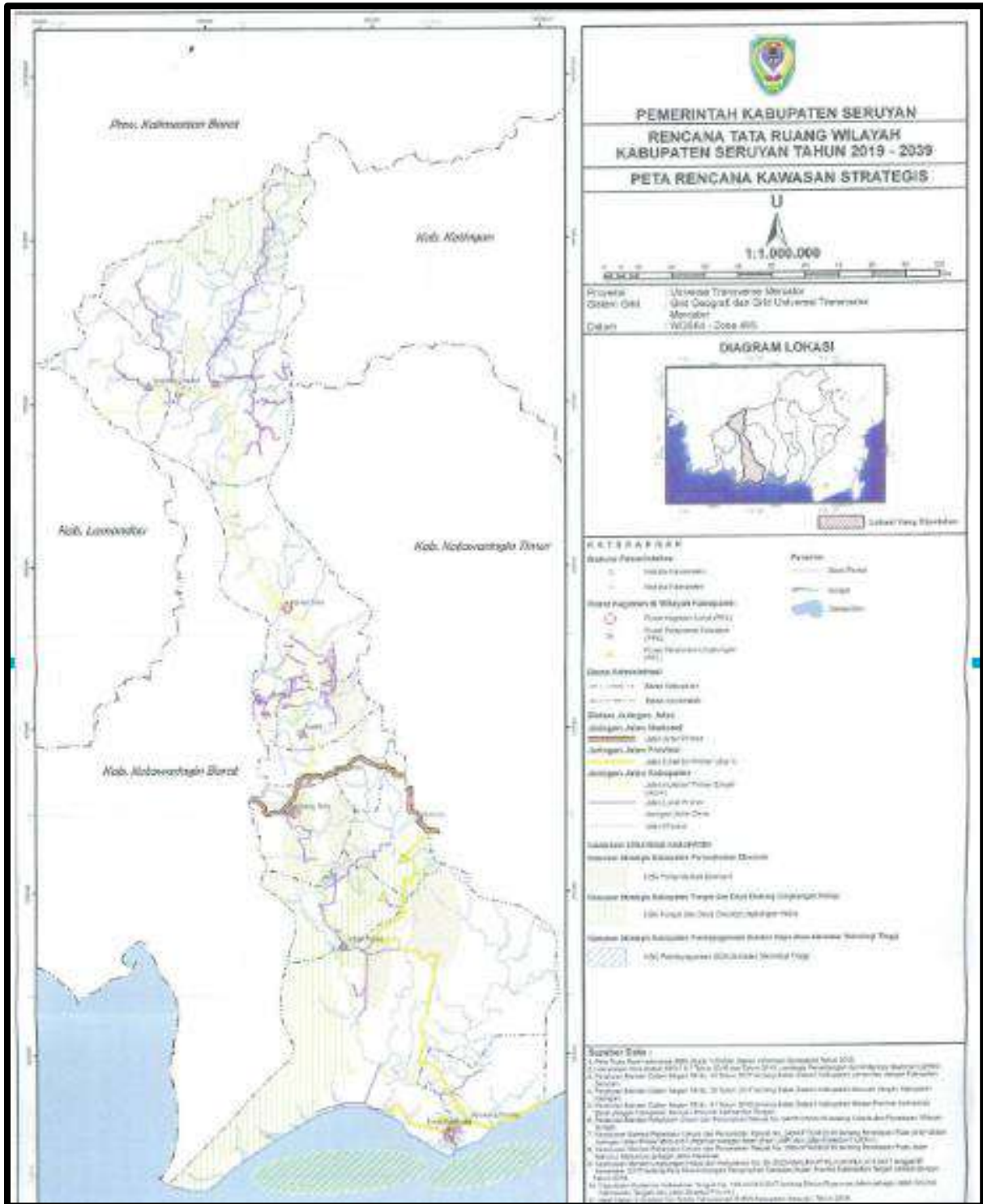


pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan.

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan strategis DAS Seruyan.
3. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan dijabarkan sebagai berikut :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:
 - 1) Kawasan perkotaan Kuala Pembuang
 - 2) Kawasan perkotaan Rantau Pulut
 - 3) Kawasan perkotaan Pembuang Hulu
 - 4) Kawasan pekebunan kelapa sawit dan karet serta pengembangan jasa yaitu Kawasan Hanau
 - 5) Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara di Kawasan Segintung
 - 6) Kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat yaitu Kawasan Segitiga Kudaman (Tumbang Kubang, Tumbang Darap dan Tumbang Manjul)
 - 7) Kawasan pengembangan terpadu untuk sektor unggulan perkebunan komoditi kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata yaitu Kawasan Sembuluh.
 - b. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Danau Sembuluh.

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan diperjelas dengan gambar peta pengembangan Kawasan strategis Kabupaten seruyan sebagai berikut:

Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dokumen Renstra seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beberapa yang termasuk prioritas telah dirumuskan dalam Bab VI dalam dokumen RPD ini, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan serta target kinerjanya.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Seruyan. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah berisi



indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. Kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Seruyan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2026 diasumsikan kapasitas untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan, setelah dikurangi



proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023–2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2023-2026

No.	Uraian	APBD 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.192.975	1.237.572	1.296.959	1.359.582
2	Penerimaan Pembiayaan	142.983	64.904	37.844	36.504
	(Dikurangi):				
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	616.357	660.008	662.309	687.890
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	719.601	642.468	672.493	708.197

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji,



tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel VII.2.
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Seruyan
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.192.975	1.237.572	1.296.959	1.359.582
2	Penerimaan Pembiayaan	142.982	64.904	37.844	36.504
	Kapasitas Pagu OPD	1.335.957	1.302.476,19	1.334.802,59	1.396.086,27

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023 (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Seruyan berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Total pagu Indikatif per OPD dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel VII.3.
Total Pagu Indikatif OPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI PAGU		
		2024	2025	2026
1	DINAS PENDIDIKAN	266.685.418.567	276.304.357.605	295.990.107.920
2	DINAS KESEHATAN	136.578.028.000	141.967.783.000	148.485.831.000
3	RSUD KUALA PEMBUANG	38.477.991.159	39.432.983.713	41.243.437.370
4	RSUD HANAU	27.179.886.752	27.854.469.512	29.133.328.514
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.996.269.000	222.066.990.000	230.227.995.000
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.757.434.000	13.024.424.000	13.622.403.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.640.000.000	9.165.435.000	9.586.239.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.820.000.000	6.989.266.000	7.310.158.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.420.212.000	12.852.567.000	13.442.656.000
10	DINAS SOSIAL	8.900.000.000	9.120.890.000	9.539.649.000
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.696.468.000	7.270.253.000	7.604.046.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.263.682.000	12.568.056.000	13.145.082.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.508.562.000	20.992.748.000	21.956.570.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29.455.313.000	15.186.369.000	15.883.608.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.400.000.000	7.097.088.000	7.422.930.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.376.099.000	12.121.215.000	11.108.857.000
17	DINAS PERHUBUNGAN	7.482.767.000	7.993.068.000	8.360.047.000



No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI PAGU		
		2024	2025	2026
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.181.306.000	7.396.768.000	7.805.237.000
19	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.845.519.000	9.639.515.000	10.082.086.000
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.199.193.000	6.554.514.000	6.832.489.000
21	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	12.262.819.000	12.567.172.000	13.144.158.000
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.691.115.000	5.026.912.000	5.257.708.000
23	DINAS PERIKANAN	8.487.978.000	8.698.642.000	9.098.015.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	43.990.377.000	45.082.182.000	47.152.002.000
25	SEKRETARIAT DPRD	43.482.693.000	44.561.898.000	46.607.831.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.297.157.000	14.357.310.000	14.357.660.000
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	243.745.704.000	254.276.051.000	263.858.590.000
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.350.708.000	16.163.211.000	16.213.474.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.513.866.000	10.275.602.000	10.747.377.000
30	INSPEKTORAT	9.768.571.000	10.011.019.000	10.470.646.000
31	KECAMATAN SERUYAN HILIR	7.837.726.000	8.032.252.000	8.401.030.000
32	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	3.404.933.000	3.489.440.000	3.649.647.000
33	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	2.980.477.000	3.061.310.000	3.201.861.000
34	KECAMATAN SERUYAN RAYA	3.186.089.000	3.267.444.000	3.417.459.000
35	KECAMATAN DANAU SELULUK	2.939.474.000	3.013.057.000	3.151.392.000
36	KECAMATAN HANAU	4.331.439.000	4.442.709.000	4.646.683.000



No.	PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI PAGU		
		2024	2025	2026
37	KECAMATAN BATU AMPAR	2.678.585.000	3.006.339.000	3.144.366.000
38	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	5.166.063.000	5.308.897.000	5.552.639.000
39	KECAMATAN SERUYAN HULU	3.804.378.000	3.939.484.000	4.120.354.000
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	3.431.444.000	3.556.758.000	3.720.056.000
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.260.445.000	7.066.144.000	7.390.565.000
	TOTAL PAGU	1.302.476.189.478	1.334.802.592.829	1.396.086.269.804

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada tabel VII.4 berikut ini :



Tabel VII.4
Program Pembangunan Daerah beserta Kerangka Pendanaan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				266,685,418,567		276,304,357,605		295,990,107,920		838,979,884,092	
1	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	159,328,622,424	100%	159,428,622,424	100%	169,428,622,424	100 %	488,185,867,272	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 %	100 %	104,043,491,727	100 %	113,262,430,765	100 %	122,198,181,080	100 %	339,504,103,572	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENDIDIKAN
				Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 3	Program Pengembang n Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	56 %	56 %	1,250,000,000	59 %	1,250,000,000	62 %	1,800,000,000	62 %	4,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	0	0	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D- IV	41.72 %	41.72 %	1,563,304,416	43.72 %	1,563,304,416	44.62 %	1,563,304,416	44.62 %	4,689,913,248	DINAS PENDIDIKAN
1	0	0	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase masyarakat penyelenggara PAUD dan pendidikan Non Formal yang memiliki izin operasional	66.14 %	66.14 %	200,000,000	69.16 %	400,000,000	72.18 %	400,000,000	72.18 %	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	0	0	Program Pengembang an Bahasa dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan Bahasa dan Sastra	56.78 %	56.78 %	300,000,000	58.76 %	400,000,000	60.74 %	600,000,000	60.74 %	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				136,578,028,000		141,967,783,000		148,485,831,000		427,031,642,000	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	63,890,536,698	100%	66,707,783,000	100%	70,415,831,000	100 %	201,014,150,698	DINAS KESEHATAN
1	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Sesuai Standar	100 %	100 %	69,464,303,302	100%	71,890,000,000	100%	74,460,000,000	100 %	215,814,303,302	DINAS KESEHATAN
1	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk	100 per 100.000	100 per 100.000	2,400,000,000	100 per 100.000	2,420,000,000	100 per 100.000	2,450,000,000	100 per 100.000	7,270,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	0	0	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani	100 %	100 %	400,000,000	100%	600,000,000	100%	800,000,000	100 %	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN
1	0	0	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan promotif preventif bidang kesehatan	100%	100%	423,188,000	100%	350,000,000	100%	360,000,000	100%	1,133,188,000	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				38,477,991,159		39,432,983,713		41,243,437,370		119,154,412,242	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	38,352,991,159	100%	39,279,994,713	100%	40,932,612,370	100%	118,565,598,242	RSUD KUALA PEMBUANG
1	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jenis layanan Rumah Sakit yang dimanfaatkan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90 %	100%	125,000,000	100%	152,989,000	100%	310,825,000	100%	588,814,000	RSUD KUALA PEMBUANG
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				27,179,886,752		27,854,469,512		29,133,328,514		84,167,684,777	



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	26,979,886,752	100%	27,654,469,512	100%	28,933,328,514	100%	83,567,684,777	RSUD HANAU
1	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	600,000,000	RSUD HANAU
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				178,996,269,000		222,066,990,000		230,227,995,000		631,291,253,999	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	16,360,268,149	100 %	20,435,074,160	100 %	21,149,566,311	100 %	57,944,908,620	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	49 %	6.60 %	21,728,601,921	6.70 %	26,957,015,654	6.80 %	27,947,691,213	6.80 %	76,633,308,788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhabat air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	7.23 %	40.55 %	13,440,000,000	45.54 %	15,690,000,000	50.00 %	22,702,500,000	50.00 %	51,832,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun atau ditinggalkan untuk pengembangan sistem sampah regional	85.74 %	100 %	3,400,000,000	100 %	3,400,000,000	100 %	4,400,000,000	100 %	11,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	62.00%	73.49 %	9,050,000,000	75.32 %	9,550,000,000	77.21 %	11,550,000,000	77.21 %	30,150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	82.57%	65.00 %	9,700,000,000	70.00 %	14,700,000,000	75.00 %	9,700,000,000	75.00%	34,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4	18,30 %	15.00 %	6,000,000,000	12.00 %	11,240,000,000	10.00 %	6,250,000,000	10.00 %	23,490,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Persetujuan bangunan Gedung (PBG) yang laik Fungsi	19,66 %	20.00 %	10,550,085,378	25.00 %	10,559,643,831	30.00 %	10,551,035,397	30.00 %	31,660,764,606	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Dokumen Bangunan dan Lingkungan	37.69 %	40.00 %	8,700,000,000	45.00 %	10,340,000,000	50.00 %	13,100,000,000	50.00%	32,140,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	28.54 %	49.00 %	73,483,305,015	54.08 %	90,997,291,971	54.49 %	94,401,848,539	54.49 %	258,882,445,525	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	0	1	Program Pengembanga n Jasa Konstruksi	Persentase SDM Terampil Konstruksi Bersertifikat	100%	35.94 %	1,369,144,077	39.53 %	1,728,280,626	43.48 %	1,767,907,649	43.48 %	4,865,332,352	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	2	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase Ketaatan tehadap RTRW Ruang	5,90 %	25.00 %	5,214,864,461	27.50 %	6,469,683,757	30.00 %	6,707,445,891	30.00 %	18,391,994,109	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9,923,048,800		11,743,478,800		12,376,457,800		128,321,456,403	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	95 %	95 %	7,140,108,800	95 %	7,666,936,800	95 %	7,766,936,800	95.00 %	22,573,982,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	0	0	Program Pengembanga n Perumahan	Persentase Rumah yang ditangani akibat bencana	90 %	90 %	745,576,000	90 %	1,065,576,000	90 %	1,065,576,000	90%	2,876,728,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	0	0	Program Kawasan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	85 %	85 %	1,354,614,000	85 %	2,054,614,000	85 %	2,280,695,000	85 %	5,689,923,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	0	0	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	85 %	85 %	462,000,000	85 %	562,000,000	85 %	682,500,000	85 %	1,706,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	0	0	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80 %	80 %	220,750,000	80 %	394,352,000	80 %	580,750,000	80 %	1,195,852,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8,640,000,000		9,165,435,000		9,586,239,000		27,391,674,000		
1	0 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	8,414,500,000	100 %	8,928,660,000	100 %	9,337,625,250	100 %	26,680,785,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0 5	0 2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	85 %	85 %	225,500,000	85 %	236,775,000	85 %	248,613,750	85 %	710,888,750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	58.41%	52%		54%		56%		56%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,820,000,000		6,989,266,000		7,310,158,000		21,119,424,000		
1	0 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	6,125,233,001	100 %	6,125,233,001	100 %	6,125,233,001	100 %	18,375,699,003	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	0 5	0 4	Program Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Persentase pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran dan non kebakaran - Cakupan bencana kebakaran	100 %	100 %	694,766,999	100 %	864,032,999	100 %	1,184,924,999	100 %	2,743,724,997	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Kabupaten/Kota										
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17,420,212,000		12,852,567,000		13,442,656,000		43,715,435,000	
1	0 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	10,505,212,000	100 %	8,637,567,000	100 %	9,332,656,000	100 %	28,475,435,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	0 5	0 3	Program Penanggulang an Bencana	Persentase Penanggulanga n Bencana	100 %	100 %	6,915,000,000	100 %	4,215,000,000	100 %	4,110,000,000	100 %	15,240,000,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,900,000,000		9,120,890,000		9,539,649,000		27,560,539,000	
1	0 6	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	6,990,436,655	100 %	7,320,890,000	100 %	7,539,649,000	100 %	21,850,975,655	DINAS SOSIAL
1	0 6	0 2	Program Pemberdayaa n Sosial	Persentase Tertib Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang di Kabupaten Seruyan	75 %	75 %	303,000,000	75 %	345,000,000	75 %	391,000,000	75 %	1,039,000,000	DINAS SOSIAL
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteran Sosial	80 %	80 %		80%		80%		80%		DINAS SOSIAL



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	0	0	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Seruyan	90 %	90 %	25,000,000	90 %	35,000,000	90 %	40,000,000	90 %	100,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100 %	100 %	375,000,000	100 %	415,000,000	100 %	460,000,000	100 %	1,250,000,000	DINAS SOSIAL
				Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
1	0	0	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan Fakir Miskin	80 %	80 %	709,563,345	80 %	450,000,000	80 %	500,000,000	80 %	1,659,563,345	DINAS SOSIAL
1	0	0	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya pada	100 %	100 %	400,000,000	100 %	450,000,000	100 %	500,000,000	100 %	1,350,000,000	DINAS SOSIAL



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota										
				Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		DINAS SOSIAL
1	0 6	0 8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	100%	100%	97,000,000	100%	105,000,000	100%	109,000,000	100%	311,000,000	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	0 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6,479,519,000		7,031,609,100		7,332,046,000		20,843,174,100	
2	0 7	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5,869,253,000	100 %	6,462,316,500	100 %	6,574,315,850	100 %	18,905,885,350	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0 7	0 2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tersusunnya perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Seruyan	100 %	100 %	150,000,000	100 %	65,000,000	100 %	200,000,000	100 %	415,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0 7	0 3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85 %	85 %	286,766,000	85 %	315,442,600	85 %	346,995,150	85 %	949,203,750	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2	0	0	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	60 %	60 %	58,500,000	60 %	62,350,000	60 %	76,585,000	60 %	197,435,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus ketenagakerjaa n yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	85 %	85 %	115,000,000	85 %	126,500,000	85 %	134,150,000	85 %	375,650,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8,723,108,907		8,860,454,253		9,062,100,164		26,645,663,324	
2	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	7,633,108,907	100 %	7,920,454,253	100 %	8,017,100,164	100 %	23,570,663,324	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0	0	Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaa n Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1 %	1 %	665,000,000	1,5 %	665,000,000	2 %	740,000,000	2 %	2,070,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0	0	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan yang dilindungi	98 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	80,000,000	100 %	180,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
20804	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan legalitas keutuhan dan kesetaraan Gender	100 %	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	105,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20805	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dokumen Hasil Pengolahan Data Gender dan Anak	100 %	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20806	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	100 %	100 %	290,000,000	100 %	140,000,000	100 %	140,000,000	100 %	570,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20807	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan terhadap Anak korban kekerasan yang ditangani	100 %	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15,742,207,283		16,310,802,429		16,822,453,041		48,875,462,753	
20901	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100 %	100 %	14,167,701,137	100 %	14,612,306,838	100 %	15,073,957,450	100 %	43,853,965,425	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
			Kabupaten/ Kota	perkantoran										
2	0 9	0 3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	98%	98%	838,941,946	99%	1,004,021,391	100%	1,054,021,391	100%	2,896,984,728	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	0 9	0 4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	10%	10%	90,000,000	9%	140,000,000	8%	140,000,000	8%	370,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	0 9	0 5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	40 %	40 %	645,564,200	41%	554,474,200	43%	554,474,200	43%	1,754,512,600	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				834,385,200		1,280,945,200		1,245,945,200		3,361,275,600	
2	1 0	0 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	85 %	85 %	45,370,000	85 %	64,830,000	85 %	64,830,000	85 %	175,030,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1 0	0 5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	85 %	85 %	64,926,000	85 %	64,926,000	85 %	64,926,000	85 %	194,778,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1 0	0 6	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	85 %	85 %	349,896,000	85 %	549,896,000	85 %	579,896,000	85 %	1,479,688,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
2	1	0	0	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penggunaan Tanah	85 %	85 %	374,193,200	85 %	601,293,200	85 %	536,293,200	85 %	1,511,779,600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			29,380,313,000		15,154,269,000		15,841,508,000		60,376,090,000		
2	1	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	7,436,274,468	100 %	7,840,212,461	100 %	8,394,810,586	100 %	23,671,297,515	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	1	0	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	1 Dokum en	1 Dokume n	112,000,000	1 Dokum en	175,000,000	1 Dokum en	175,000,000	1 Dokum en	462,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	1	0	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU = 100 – [50/0.9 x (I _{eu} – 0.1)])	80 %	80 %	193,991,750	80 %	247,722,487	80 %	254,236,749	80 %	695,950,986	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	1	0	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI)	Persentase Lahan Keanekaragam an Hayati yang terkelola	80%	80%	10,000,000,000	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	10,150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2	1	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang diawasi	80 %	80 %	85,849,000	80 %	96,633,900	80 %	100,000,000	80 %	282,482,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	30%	30%	89,892,000	30%	98,881,200	30%	100,000,000	30%	288,773,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	1 Lembaga	1 Lembaga	35,092,400	1 Lembaga	60,601,640	1 Lembaga	61,661,804	1 Lembaga	157,355,844	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Persentase masyarakat yang menjadi kader lingkungan hidup	100%	100%	5,010,564,400	100%	46,347,840	100%	46,982,624	100%	5,103,894,864	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
			Masyarakat											
2	1	0	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	10,054,000	Ada	11,059,400	Ada	12,165,340	Ada	33,278,740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan yang dilaporkan	100%	100%	25,075,600	100%	27,583,160	100%	30,341,476	100%	83,000,236	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	70%	50%	6,381,519,382	50%	6,475,226,912	50%	6,591,309,421	75%	19,448,055,715	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,400,000,000		7,097,088,000		7,422,930,000		20,920,018,000	
2	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran%	100 %	100 %	5,838,150,600	100 %	5,897,089,200	100 %	5,957,501,200	100 %	17,692,741,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	1	0	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	98.76%	98.76%	193,412,000	99.59%	393,924,000	99.60%	481,014,000	99.60%	1,068,350,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	52.53%	52.53%		53.34%		53.48%		53.48%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	1	0	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	96,12%	96,12%	117,320,000	96,74%	256,660,000	97,17%	313,460,000	97,17%	687,440,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Penerbitan Akta Perkawinan		100%		100%		100%		100%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Persentase Penerbitan Akta Perceraian		100%		100%		100%		100%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Penerbitan Akta Kematian		100%		100%		100%		100%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	1 2	0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	19,51%	19,51%	189,261,400	24,39%	414,082,800	29,27%	505,682,800	29,27%	1,109,027,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	1 2	0 5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	94.80%	94.80%	61,856,000	94.85%	135,332,000	94.90%	165,272,000	94.90%	362,460,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11,376,099,000		12,121,215,000		11,108,857,000		34,606,171,000	
2	1 3	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	5,976,099,000	90%	6,221,215,000	90%	6,208,857,000	90%	18,406,171,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1 3	0 2	Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang Memiliki tata Kelola Pemerintahan yang Baik	13.40%	13.40%	400,000,000	13.40%	400,000,000	13.40%	400,000,000	40.20%	1,200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1 3	0 3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa Yang Memiliki Lembaga Ekonomi Aktif	10%	10%	300,000,000	10%	300,000,000	10%	300,000,000	30%	900,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2 1 3 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggara kan pemerintahan desa sesuai Peraturan	90%	90%	2,400,000,000	90%	2,900,000,000	90%	2,000,000,000	90%	7,300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 1 3 5	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Desa Yang Memiliki Lembaga Aktif	14.56%	14.56%	2,300,000,000	17.48%	2,300,000,000	24.45%	2,200,000,000	71.05%	6,800,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 1 4	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,540,573,093		3,707,601,747		4,082,981,836		11,331,156,676	
2 1 4 2	Pogram Pengendalian Penduduk	Cakupan Kebijakan Daerah dan Pemetaan Perkiraan Profil/ Karakteristik	100%	100%	328,900,000	100%	428,900,000	100%	454,900,000	100%	1,212,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 1 4 3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB aktif untuk pasangan Usia subr (PUS)	100%	100%	1,374,152,000	100%	1,374,152,000	100%	1,570,560,743	100%	4,318,864,743	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 1 4 4	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	1,837,521,093	100%	1,904,549,747	100%	2,057,521,093	100%	5,799,591,933	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				(UPPKS) yang ber-KB mandiri										KELUARGA BERENCANA
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7,482,767,000		7,993,068,000		8,360,047,000		23,835,882,000	
2	1 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	6,373,965,498	100 %	6,474,003,000	100 %	6,554,003,000	100 %	19,401,971,498	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 2	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	3.662 orang	3.750 orang	586,913,502	3.795 orang	800,594,000	3.840 orang	847,573,000	3.840 orang	2,235,080,502	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi	100 %	100 %	521,888,000	100 %	718,471,000	100 %	958,471,000	100 %	2,198,830,000	DINAS PERHUBUNGAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,081,306,000		7,296,768,000		7,705,237,000		22,083,311,000	
2	1 6	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5,807,851,000	100 %	6,023,313,000	100 %	6,107,851,000	100 %	17,939,015,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	100 %	43 %	1,075,755,000	45 %	1,075,755,000	50 %	1,399,686,000	100 %	3,551,196,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	47 kelompok	53 kelompok				53 kelompok		53 kelompok		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	02	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100 %	60 %	197,700,000	60 %	197,700,000	60 %	197,700,000	60 %	593,100,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6,923,917,349		6,280,997,417		6,476,628,490		19,681,543,256	
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5,423,917,349	100 %	5,180,997,417	100 %	5,226,628,490	100 %	15,831,543,256	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	Program Pendidikan dan Latihan Pekoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Koperasi	100 %	100 %	200,000,000	100 %	125,000,000	100 %	125,000,000	100 %	450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	100 %	200,000,000	100 %	125,000,000	100 %	125,000,000	100 %	450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
														DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8	Program Pengembang an UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	100 %	1,000,000,000	100 %	750,000,000	100 %	900,000,000	100 %	2,650,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,199,193,000		6,554,514,000		6,832,489,000		19,586,196,000	
2	1 8	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5,311,693,000	100 %	5,552,014,000	100 %	5,757,489,000	100 %	16,621,196,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 2	Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	98 %	100 %	110,000,000	100 %	135,000,000	100 %	155,000,000	100 %	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 3	Program Promosi Penanaman Modal	Rasio potensi dan peluang investasi yang di promosikan	44 Dokum en	2 KK	77,500,000	2 KK	97,500,000	2 KK	100,000,000	2 KK	275,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan izin Sesuai SOP dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	99%	100 %	225,000,000	100 %	255,000,000	100 %	285,000,000	100 %	765,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2 1 0 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Pengendalian PMA dan PMDN Penanaman Modal	94 %	100 %	400,000,000	100 %	430,000,000	100 %	440,000,000	100 %	1,270,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 1 0 6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi Layanan Perizinan Secara Elektronik dan Non Elektronik yang disampaikan kepada pelaku usaha	93 %	100 %	75,000,000	100 %	85,000,000	100 %	95,000,000	100 %	255,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 1 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9,471,102,936		10,441,443,077		10,934,844,247		30,847,390,260	
2 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	93.76 %	100 %	5,651,950,099	100 %	6,011,651,890	100 %	6,240,173,983	100 %	17,903,775,972	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 1 0 2	Program Pengembang n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berprestasi	98.99 %	100 %	981,652,837	100 %	1,160,375,763	100 %	1,296,662,127	100 %	3,438,690,726	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 1 0 3	Program Pengembang n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan/Kegi atan/event yang dilaksanakan	100 %	100%	2,505,000,000	100%	2,903,665,425	100%	3,032,258,137	100%	8,440,923,562	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 1 0 4	Program Pengembang n Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100%	100%	332,500,000	100%	365,750,000	100%	365,750,000	100%	1,064,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	2 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	
2	2 0	0 2	Program Penyelenggara an Statistik Sektoral	Persentase pelaksanaan program penyelenggaraa n Statistik Sektoral	tidak ada	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada		ada		ada		ada		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,STATI STIK DAN PERSANDIAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	2 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	
2	2 1	0 2	Program Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	2 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,064,964,835		1,183,386,319		1,209,780,798		3,458,131,952	
2	2 2	0 2	Program Pengembanga n Kebudayaan	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budava daerah	99.89 %	100 %	911,464,835	100 %	1,004,636,319	100 %	1,012,853,298	100 %	2,928,954,452	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2	2	03	Program Pengembang an Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang ada di Kabupaten Seruyan	0 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	57,750,000	100 %	162,750,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Seruyan	0 %	100 %	70,500,000	100 %	77,550,000	100 %	81,427,500	100 %	229,477,500	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman di Kabupaten Seruyan	0 %	100 %	33,000,000	100 %	46,200,000	100 %	57,750,000	100 %	136,950,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4,446,357,800		4,776,065,360		5,001,317,195		14,223,740,355	
2	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	4,021,557,800	100 %	4,303,065,360	100 %	4,518,317,198	100 %	12,842,940,358	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	80 %	50 %	391,300,000	51 %	430,493,400	52 %	439,030,600	52 %	1,260,824,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	73000 Judul	73,500		74,000		74,500		74,500		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37.50	37.75		38.00		38.25		38.25		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6.21	6.30		6.40		6.50		25.41		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional yang dilestarikan		5 %	33,500,000	5 %	42,506,600	5 %	43,969,397	15 %	119,975,997	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				244,757,200		250,846,640		256,390,805		751,994,645	
2	2 4	0 2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100 %	100 %	186,765,200	100 %	188,765,200	100 %	191,565,200	100 %	567,095,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	62,50 %	80%		90%		100 %		100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase arsip yang dapat terlindungi dan terselamatkan	25 %	25 %	55,992,000	25 %	61,081,440	25 %	61,825,605	100 %	178,899,045	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	16 Arsip	2,000,000	16 Arsip	1,000,000	16 Arsip	3,000,000	48 Arsip	6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,487,978,000		8,698,642,000		9,098,015,000		26,284,635,000	
3	2 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	7,117,978,000	100 %	7,428,642,000	100 %	7,848,015,000	100 %	22,394,635,000	DINAS PERIKANAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.521, 66 Ton	10.750,9 4 Ton	470,000,000	10.912, 56 Ton	400,000,000	10.912, 56 Ton	400,000,000	10.912, 56 Ton	1,270,000,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.458, 41 Ton	8.571,54 Ton	670,000,000	10.371, 57 Ton	640,000,000	10.371, 57 Ton	620,000,000	10.371, 57 Ton	1,930,000,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	81.95%	85%	60,000,000	85%	60,000,000	85%	60,000,000	85%	180,000,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	4.564,8 9 Ton	2.772,76 Ton	170,000,000	2.940,8 8 Ton	170,000,000	2.990,3 4 Ton	170,000,000	2.990,3 4%	510,000,000	DINAS PERIKANAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,726,751,229		942,342,604		999,532,955		3,668,626,789	
3	2	0	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2 Destina si	2 Destinasi	1,151,614,729	2 Destina si	270,369,318	2 Destina si	281,445,475	2 Destina si	1,703,429,522	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	0	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan	59,13%	100%	475,136,500	100%	519,719,219	100%	519,719,219	100%	1,514,574,937	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	0	Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	NA	100%	100,000,000	100%	152,254,068	100%	198,368,262	100%	450,622,329	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3,766,354,717		4,681,945,571		5,134,116,959		13,582,417,247	
3	2 7	0 2	Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4 ton/he ktar	4 ton/hekt ar	799,516,000	4 ton/he ktar	1,486,504,000	4 ton/he ktar	1,731,504,000	4 ton/he ktar	4,017,524,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 3	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4 ton/he ktar	4 ton/hekt ar	1,580,674,800	4 ton/he ktar	1,691,107,200	4 ton/he ktar	2,096,571,029	4 ton/he ktar	5,368,353,029	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	25 %	25 %	482,400,000	25%	600,000,000	25%	505,000,000	25 %	1,587,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 5	Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Persentase penanganan wabah pertanian	100 %	100 %	204,400,000	100%	250,000,000	100%	200,000,000	100 %	654,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	91%	91%	307,500,000	92%	278,250,000	92%	278,250,000	92%	864,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 7	Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	91%	91%	391,863,917	92%	376,084,371	92%	322,791,930	92%	1,090,740,218	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				75,000,000		32,100,000		42,100,000		149,200,000	
3	2 8	0 4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rehabilitasi TAHURA (Rumus : Persentase luas TAHURA dan yang direhabilitasi dibagi luas total TAHURA x 100%)	80%	80%	75,000,000	80%	32,100,000	80%	42,100,000	80%	149,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	3 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				750,000,000		500,000,000		750,000,000		2,000,000,000	
3	3 0	0 3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan	Persentase Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	500,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	1,350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	100%	100%	250,000,000	100%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	650,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4,171,601,651		2,858,517,583		2,855,457,510		9,885,576,744	
3	3 1	0 1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	4,171,601,651	100%	2,858,517,583	100%	2,855,457,510	100%	9,885,576,744	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	3 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				216,949,000		238,643,900		272,000,000		727,592,900	
3	3 2	0 2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang direncanakan rumus: Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan dibagi kawasan transmigrasi yang diusulkanX 100%	80 %	80 %	105,000,000	80%	115,500,000	80%	127,050,000	80%	347,550,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	3 2	0 3	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun rumus: Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dibagi jumlah kawasan transmigrasi X 100%	65 %	65 %	101,949,000	65%	112,143,900	65%	132,850,000	65%	346,942,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	3 2	0 4	Program pengembang an kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan rumus: Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan dibagi jumlah	100 %	100 %	10,000,000	100%	11,000,000	100%	12,100,000	100%	33,100,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				kawasan transmigrasi X 100%										
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	0 1		SEKRETARIAT DAERAH				43,990,377,000		45,082,182,000		47,152,002,000		136,224,561,000	
4	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	60.18 %	100%	29,607,602,917	100%	29,138,611,262	100%	32,744,718,262	100%	91,490,932,441	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	100,000,000	90%	100,000,000	100%	100,000,000	90%	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	0	80%	87,500,000	90%	87,500,000	100%	87,500,000	90%	262,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase PD yang menyusun Standart pelayanan Publik serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat	80%	80%	87,500,000	90%	87,500,000	100%	87,500,000	90%	262,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase PD yang menjalankan dan memiliki kelompok budaya kerja	0	80%	100,000,000	90%	100,000,000	100%	100,000,000	90%	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	100%	80%	1,466,356,954	90%	3,027,153,609	100%	3,543,106,954	90%	8,036,617,517	SEKRETARIAT DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD | 38



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90%	90%	80,000,000	95%	80,000,000	100%	80,000,000	95%	240,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	0 1	0 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi pengembangan , pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian	100%	100%	278,047,200	100%	278,047,200	100%	278,047,200	100%	834,141,600	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah	100%	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	570,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	2,847,894,800	100%	2,847,894,800	100%	747,894,800	100%	6,443,684,400	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Paket yang terselesaikan	100%	95%	716,719,408	95%	716,719,408	100%	716,719,408	97%	2,150,158,224	SEKRETARIAT DAERAH
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	0 2		SEKRETARIAT DPRD				43,482,693,000		44,561,898,000		46,607,831,000		108,252,921,835	
4	0 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	30,265,129,264	100 %	31,379,961,571	100 %	32,590,018,136	100 %	94,235,108,971	SEKRETARIAT DPRD



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4	0	0	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	13,217,563,736	Ada	13,181,936,429	Ada	14,017,812,864	Ada	14,017,812,864	SEKRETARIAT DPRD
				Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		SEKRETARIAT DPRD
				Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Anggota DPRD	25 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		SEKRETARIAT DPRD



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Persentase Terlaksananya Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	95%	85%		85%		85%		85%		SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD	93%	80%		80%		80%		80%		SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01		PERENCANAAN				12,563,557,000		13,757,310,000		13,837,660,000		40,158,527,000	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	8,574,441,100	100 %	7,055,198,102	100 %	7,697,980,747	100 %	23,327,619,949	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	2,230,023,900	100%	2,369,111,898	100%	4,037,335,253	100%	8,636,471,051	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Proaram RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
					kedalam APBD										PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	0	1	0	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan	100%	100%	1,759,092,000	100%	4,333,000,000	100%	2,102,344,000	100%	8,194,436,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100%	100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100%	100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				733,600,000		600,000,000		520,000,000		1,853,600,000	
5	0 5	0 2	Program Penelitian dan Pengembanga n Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	80%	733,600,000	80%	600,000,000	80%	520,000,000	80%	1,853,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 2		KEUANGAN				243,745,704,000		254,276,051,000		263,858,590,000		761,880,345,000	
5	0 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98%	98%	23,996,115,020	98%	17,183,194,049	98%	20,573,552,038	98%	61,752,861,107	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5 0 2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98%	98%	219,099,588,980	98%	236,392,856,951	98%	242,535,037,962	98%	698,027,483,893	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 0 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dikelola	98%	98%	650,000,000	98%	700,000,000	98%	750,000,000	98%	2,100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 0 2	KEUANGAN				15,350,708,000		16,163,211,000		16,213,474,000		47,727,393,000	
5 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	12,503,751,100	100%	12,511,254,100	100%	12,581,517,100	100%	37,596,522,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 0 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	2,846,956,900	100%	3,651,956,900	100%	3,631,956,900	100%	10,130,870,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 0 3	KEPEGAWAIAN				8,668,866,000		9,120,602,000		9,572,377,000		27,361,845,000	
5 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	6,143,866,000	100%	6,275,602,000	100%	6,447,377,000	100%	18,866,845,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 0 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Karier (Jumlah ASN yang memperoleh Pembinaan dan	80%	80%	2,525,000,000	80%	2,845,000,000	80%	3,125,000,000	80%	8,495,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
				Pengembangan Karir dibagi Jumlah seluruh ASN Kab. Seruyan x 100%)										
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				845,000,000		1,155,000,000		1,175,000,000		3,175,000,000	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Rumus : Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah Seluruh ASN x 100%)	30%	30%	845,000,000	35%	1,155,000,000	40%	1,175,000,000	40%	3,175,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				9,768,571,000		10,011,019,000		10,470,646,000		30,250,236,000	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	7,003,571,000	100%	7,231,019,000	100%	7,665,646,000	100%	21,900,236,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	85 %	85 %	2,325,000,000	87 %	2,375,000,000	90 %	2,400,000,000	90 %	7,100,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah	90 %	90 %	440,000,000	90 %	405,000,000	90 %	405,000,000	90 %	1,250,000,000	INSPEKTORAT DAERAH



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				7,837,726,000		8,032,252,000		8,401,030,000		24,271,008,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85%	85%	5,211,156,610	85%	5,282,707,916	85%	5,459,379,116	85%	15,953,243,642	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	85%	85%	755,200,000	85%	755,200,000	85%	756,925,670	85%	2,267,325,670	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	85%	85%	1,588,404,890	85%	1,710,379,584	85%	1,901,735,214	85%	5,200,519,688	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tertangani	85%	85%	53,179,500	85%	53,179,500	85%	54,000,000	85%	160,359,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	85%	109,000,000	85%	109,000,000	85%	109,000,000	85%	327,000,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	85%	85%	120,785,000	85%	121,785,000	85%	119,990,000	85%	362,560,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				3,404,933,000		3,489,440,000		3,649,647,000		10,544,020,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,907,022,266	100%	2,940,545,516	100%	3,099,329,516	100%	8,946,897,298	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	100%	71,200,000	100%	113,200,000	100%	114,000,000	100%	298,400,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	90%	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	150,000,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	95%	95%	15,000,000	100%	13,000,000	100%	15,000,000	98%	43,000,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	95%	95%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	900,000,000	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	61,710,734	100%	72,694,484	100%	71,317,484	100%	205,722,702	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				2,980,477,000		3,061,310,000		3,201,861,000		9,243,648,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,803,721,072	100%	2,867,585,000	100%	2,974,361,000	100%	8,645,667,072	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85%	86%	5,000,000	86%	5,000,000	87%	5,000,000	87%	15,000,000	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	42%	43%	22,450,928	43%	24,500,000	43%	45,000,000	45%	91,950,928	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase masalah ketentraman dan keterlibatan umum dan Tertangani	75%	90%	15,000,000	90%	17,000,000	90%	21,000,000	95%	53,000,000	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	80%	85%	90,000,000	85%	97,000,000	90%	105,000,000	90%	292,000,000	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50%	85%	44,305,000	56%	50,225,000	60%	51,500,000	60%	146,030,000	KECAMATAN DANAU SEMBULUH



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				3,186,089,000		3,267,444,000		3,417,459,000		9,870,992,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85%	85%	2,936,089,699	85%	2,967,444,517	85%	2,999,583,206	85%	8,903,117,421	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	87%	87%	10,000,000	87%	12,499,742	87%	20,000,000	87%	42,499,742	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	85%	85%	60,000,000	85%	80,000,000	85%	115,000,000	85%	255,000,000	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	85%	85%	5,000,000	85%	5,000,000	85%	10,000,000	85%	20,000,000	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	85%	159,999,301	85%	185,000,000	85%	235,875,794	85%	580,875,096	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	85%	15,000,000	85%	17,499,741	85%	37,000,000	85%	69,499,741	KECAMATAN SERUYAN RAYA



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				2,939,474,000		3,013,057,000		3,151,392,000		9,103,923,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,756,394,000	100%	2,814,057,000	100%	2,902,392,000	100%	8,472,843,000	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87%	87%	5,000,000	87%	5,000,000	87%	5,000,000	88%	15,000,000	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	90%	90%	33,775,000	90%	33,775,000	90%	33,775,000	90%	101,325,000	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase masalah ketentraman dan keterlibatan umum dan Tertangani	95%	95%	20,000,000	95%	20,000,000	95%	40,000,000	95%	80,000,000	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	85%	80,000,000	85%	90,000,000	85%	120,000,000	90%	290,000,000	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	44,305,000	100%	50,225,000	100%	50,225,000	100%	144,755,000	KECAMATAN DANAU SELULUK



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				4,331,439,000		4,442,709,000		4,646,683,000		13,420,831,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,111,439,000	100%	4,206,709,000	100%	4,274,683,000	100%	12,592,831,000	KECAMATAN HANAU
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	-	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	4,000,000	KECAMATAN HANAU
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100%	100%	45,000,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	165,000,000	KECAMATAN HANAU
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan keterttiban umum	100%	100%	-	100%	-	100%	5,000,000	100%	5,000,000	KECAMATAN HANAU
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	255,000,000	100%	555,000,000	KECAMATAN HANAU
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	25,000,000	100%	29,000,000	100%	45,000,000	100%	99,000,000	KECAMATAN HANAU



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				2,678,585,000		3,006,339,000		3,144,366,000		8,829,290,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,587,585,000	100%	2,748,032,922	100%	2,821,931,000	100%	8,157,548,922	KECAMATAN BATU AMPAR
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	1,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	11,000,000	KECAMATAN BATU AMPAR
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	85%	85%	18,000,000	85%	37,500,000	85%	37,435,000	85%	92,935,000	KECAMATAN BATU AMPAR
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Masalah Ketentraman dan Keterlibatan Umum dan Tertangani	85%	85%	1,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	21,000,000	KECAMATAN BATU AMPAR
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	85%	61,000,000	75%	150,806,078	75%	205,000,000	75%	416,806,078	KECAMATAN BATU AMPAR
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	10,000,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	130,000,000	KECAMATAN BATU AMPAR



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				5,166,063,000		5,308,897,000		5,552,639,000		16,027,599,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,425,424,330	100%	4,597,424,000	100%	4,865,353,683	100%	13,888,202,013	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	100	75,500,670	100	56,497,000	100	29,309,000	100%	161,306,670	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/ kelurahan mandiri	100	100	420,138,000	100	419,138,000	100	420,138,000	100%	1,259,414,000	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100	100	20,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100%	50,000,000	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	100	120,000,000	100	115,500,000	100	115,000,000	100%	350,500,000	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	105,000,000	100	105,338,000	100	107,838,317	100%	318,176,317	KECAMATAN SERUYAN TENGAH



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				3,804,378,000		3,939,484,000		4,120,354,000		11,864,216,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,579,373,000	100%	3,699,479,000	100%	3,780,349,000	100%	11,059,201,000	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	25,005,000	100%	25,005,000	100%	40,005,000	100%	90,015,000	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	90,000,000	100%	210,000,000	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan keterttiban umum	100%	100%	15,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	75,000,000	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	180,000,000	100%	430,000,000	KECAMATAN SERUYAN HULU



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1		KECAMATAN				3,431,444,000		3,556,758,000		3,720,056,000		10,708,258,000	
7	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,255,899,000	100%	3,381,213,000	100%	3,539,511,000	100%	10,176,623,000	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	0 1	0 2	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	20,045,000	100%	20,045,000	100%	20,045,000	100%	60,135,000	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	0 1	0 3	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100%	100%	40,500,000	100%	40,500,000	100%	40,500,000	100%	121,500,000	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	0 1	0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan keterttiban umum	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	45,000,000	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	0 1	0 5	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	245,000,000	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	0 1	0 6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	60,000,000	KECAMATAN SULING TAMBUN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	0 1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				39,260,445,000		7,066,144,000		7,390,565,000		53,717,154,000	
8	0 1	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	38.75%	3,858,674,835	100%	5,066,144,000	100%	5,215,565,000	100.00 %	14,140,383,835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan selama 3 Tahun	5,00 %	0,14 %	1,000,000,000	0,31 %	1,250,000,000	0,50 %	1,300,000,000	0,50 %	3,550,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik selama 3 Tahun	5,00 %	0%	34,401,770,165	0,38 %	250,000,000	0,60 %	300,000,000	0,60 %	34,951,770,165	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 4	Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	76.91%	0%	-	49.50	100,000,000	52.48	100,000,000	52.48	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 5	Program Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di	5,00	0%	-	0,34 %	175,000,000	0,53 %	200,000,000	0,53 %	375,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
			Ekonomi, Sosial, dan Budaya	bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya selama 3 Tahun										
8	0 1	0 6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	0%	-	60%	225,000,000	70%	275,000,000	70%	500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							1,302,476,189,478		1,334,802,592,829		1,396,086,269,804		4,033,365,052,111	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target RKPD 2023	Target RPD		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	68,24	70,94	68,92	69,25	69,58
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,43	6,03	6,72	6,36	6,00
3	Indeks Gini (Nilai)	0,292	0,281	0,286	0,283	0,280



No	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target RKPD 2023	Target RPD		
				2024	2025	2026
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96	3,66	3,86	3,81	3,75
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,01	5,36	4,50	4,75	5,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	65,08	55,69	74,24	79,59	85,00

8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target RKPD 2023	Target RPD		
				2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68,24	70,94	68,92	69,25	69,58
Tingkat Kemiskinan	%	7,43	6,03	6,72	6,36	6,00
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,46	71,03	69,51	69,55	69,60
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,99	9,26	8,12	8,17	8,22



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target RKPD 2023	Target RPD		
				2024	2025	2026
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,74	12,20	12,26	12,32
Indeks Gini	Nilai	0,292	0,281	0,286	0,283	0,280
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	3,66	3,86	3,81	3,75
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	5,36	4,50	4,75	5,00
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,13	n.a	4,57	4,78	5,00
LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,99	n.a	4,50	4,75	5,00
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62,25)	BB (77,95)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
Nilai SAKIP	Nilai	B (63,81)	B (67,00)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,97*	83,69	86,29	87,49	88,69
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,86	81,40	71,07	71,3	71,54
Indeks Kualitas Air	Nilai	48	50,40	59,7	59,8	59,9
Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,8	84,86	81,30	81,40	81,50
Indeks Risiko Bencana	Nilai	144,4*	n.a	140	138	135

*Data Capaian Tahun 2021

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	68,92	69,25	69,58
2	Tingkat Kemiskinan	7,43	6,72	6,36	6,00
3	Angka Harapan Hidup	69,46	69,51	69,55	69,60
4	Rata-rata Lama Sekolah	7,99	8,12	8,17	8,22
5	Harapan Lama Sekolah	12,02	12,20	12,26	12,32
6	Indeks Gini	0,292	0,286	0,283	0,28
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,96	3,86	3,81	3,75
8	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	85,74	86,5	87	87,5
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,50	4,75	5,00
10	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,13	4,57	4,78	5,00
11	LPE Kategori Industri Pengolahan	3,99	4,50	4,75	5,00
12	Indeks Reformasi Birokrasi	B (62,25)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
13	Nilai SAKIP	B (63,81)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,85	86,29	87,49	88,69
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,86	71,07	71,3	71,54
16	Indeks Kualitas Air	48	59,7	59,8	59,9
17	Indeks Kualitas Udara	87,8	88,30	88,40	88,50
18	Indeks Risiko Bencana	144,4	140	138	135
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,16	90,05	90,95	91,86
20	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,2	64,78	65,43	66,08
21	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	7,41	7,58	7,78	8,01
22	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
23	Skor pola pangan harapan	80,10	86,25	87,12	87,99
24	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	80	81,14	81,95	82,77
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menurut PDRB	4.007.390*	4.470.335	4.624.650	4.778.965
2	Pengeluaran Per Kapita	9.821	10.623	11.024	11.425
3	Angka Kriminalitas	5,33*	5,12	5,02	4,92
4	Rasio ketergantungan	43,43	43,00	42,50	42,00
5	Persentase ASN yang berkompeten	70	75	77,5	80
6	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa	5,15	6	8	10
7	Nilai Tukar Petani	79,42	87,21	91,11	95,00
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,72%*	100%	100%	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%*	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,75%*	100%	100%	100%
b) Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,105*	0,105	0,105	0,105
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%*	100%	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	79%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	37%	100%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	69%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	56%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12%	100%	100%	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	39,4%	100%	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	18,5%	100%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17,4%	100%	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,9%	100%	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	51,5%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	39,74%	100%	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	44,54%	100%	100%	100%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0%*	0%	0%	0%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a	-	-	-



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,41%*	65,05%	66,68%	68,35%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	27,01%*	35,95%	39,54%	43,50%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,24%*	73,49%	75,32%	77,21%
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100%*	100%	100%	100%
7	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	36,94%*	49,16%	54,08%	59,49%
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	27%*	35,94%	39,53%	43,48%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%*	100%	100%	100%
10	Persentase Pengolahan akses air minum	6,53%*	38%	39,50%	41,05%
11	Persentase Pengolahan akses air limbah	57,40%*	73,49%	75%	77%
d) Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	100%*	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	n.a	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	70,96%*	76,42%	78,33%	80,29%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,038%*	9,00%	9,50%	10,00%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	n.a	2	4	6
6	Persentase Rumah Layak Huni	53,90*	57,50	60,00	62,50
7	Rasio permukiman layak huni	57,1	58,68	59,68	60,68



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
8	Persentase pemukiman yang tertata	85	86,18	87,56	88,48
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	10	19,58	19,45	19,17
10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	12,4	10,45	9,89
11	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100	81,97	83,34	85,55
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan selama 3 Tahun	n.a	0,14 %	0,31 %	0,50 %
2	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik selama 3 Tahun	n.a	0,18 %	0,38 %	0,60 %
3	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	79,12%*	80 %	82 %	84 %
4	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya selama 3 Tahun	n.a	0,30 %	0,34 %	0,53 %
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%*	100%	100%	100%
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%*	100%	100%	100%
7	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%*	100%	100%	100%
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	95,24%*	95,50%	97,50%	100%
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	81,32%*	82,50%%	85,00%	87,50%
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%*	100%	100%	100%
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%*	100%	100%	100%
12	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11,58 menit*	10 menit	10 menit	10 menit



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
f) Sosial					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	35,45%*	97%	98%	98%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	98%*	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50,55%*	54,44%	55,80%	57,19%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	0,23%	0,50%	0,75%	1,00%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,05%*	0,10%	0,15%	0,20%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	20,27%*	20,88%	21,09%	21,30%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	12,56%	14,56%	15,56%	16,56%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,071%*	1,00%	1,50%	2,00%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,020%*	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,355*	1,200	1,150	1,100



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
c) Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	94,95%*	97,84%	98,81%	99,80%
d) Pertanian					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	1 kasus*	1 kasus	1 kasus	1 kasus
4	Persentase luas lahan bersertifikat	5%*	5%	5,20%	5,50%
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	4 Kasus*	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus
e) Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,71	71,07	71,3	71,54
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	70%*	75,38%	77,27%	79,20%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	70%*	71%	71,25%	71,50%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase perekaman KTP elektronik	98,33%*	98,76%	98,97%	99,96%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50,02%*	52,53%	55,99%	57,39%
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	95,64%*	96,12%	96,92%	97,87%
4	Persentase kepemilikan akta Perkawinan	100%*	100%	100%	100%
5	Persentase kepemilikan akta perceraian	100%*	100%	100%	100%
6	Persentase kepemilikan akta kematian	100%*	100%	100%	100%
7	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14,63%*	19,51%	24,39%	29,27%
8	Persentase indeks kepuasam masyarakat	94,77%*	94,80%	94,85%	94,90%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%*	10,30%	13,40%	16,49%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,54*	2,2	2,15	2,1
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,97%*	79,67%	81,66%	83,70%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,05%*	12,00%	11,00%	10,00%
i) Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	95,9*	97,35	97,83	98,32
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,21*	0,24	0,26	0,27
j) Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%*	20%	30%	40%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%*	60%	60%	65%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	86,81%*	89,45%	90,34%	91,24%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5,24%*	7,50%	7,75%	8,00%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0%*	1,00%	1,00%	1,00%
l) Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	88,13%*	90%	91%	92%
m) Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,17%*	0,20%	0,25%	0,30%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,30%*	1,50%	1,50%	1,50%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
3	Peningkatan prestasi olahraga	n.a	1	2	2
n) Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%*	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	73,17%*	78,80%	80,77%	82,79%
o) Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,58%*	69,55%	71,29%	73,07%
p) Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	23 objek*	28 objek	33 objek	38 objek
q) Perpustakaan					
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	56,16*	58,11	60,29	62,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n.a	40,00	41,00	42,50
r) Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	71,89%*	77,43%	79,36%	81,35%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n.a	50,00%	52,50%	55,00%
Urusan Pilihan					
a) Kelautan dan Perikanan					
1	LPE Subkategori Perikanan (%)	-	1%	1%	1,5%
2	Persentase Produksi Perikanan (%)	96,22%*	97%	97%	97%
3	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	43.544,96*	44.095,24	45.196,29	46.274,47
4	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	81,95%*	85%	85%	85%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
b) Pariwisata					
1	LPE ekonomi kreatif	n.a	26,32%	34,21%	39,47%
2	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	n.a	26,32%	34,21%	39,47%
c) Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	n.a	25%	25%	25%
d) Kehutanan					
e) Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1%*	1%	1%	1%
f) Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	6,85%*	7,50%	8,75%	10,00%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	100%*	100%	100%	100%
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	12,65%*	13,00%	14,00%	15,00%
g) Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	n.a	5,00%	5,00%	5,00%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	n.a	0%	0%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%*	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n.a	10%	15%	20%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	n.a	0%	0%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	n.a	60%	65%	70%
h) Transmigrasi					
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
a) Perencanaan dan Keuangan					
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	89,04	100%	100%	100%
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	92,12	100%	100%	100%
3	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	60	80%	80%	80%
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,55%*	9,55%	9,55%	9,55%
5	Rasio PAD	62,39*	96%	96%	96%
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3*	3	3	3
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3*	3	3	3
8	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	58,47%*	58,47%	58,47%	58,47%
9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%*	0%	0%	0%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	11,03%*	12,50%	13,50%	15,00%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	23,33%*	24,00%	24,50%	25,00%



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2022	2024	2025	2026
c) Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	435,315%*	435,315%	435,315%	435,315%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,4%*	10,00%	20,00%	30,00%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38,66%*	41,64%	42,68%	43,75%
d) Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	89,051%*	91,75%	92,67%	93,59%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	37,61%*	1%	4%	4%
3	Manajemen Aset				
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Tidak	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	17,63%*	15,00%	14,25%	12,50%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%*	100%	100%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%*	100%	100%	100%

Sumber : Permendagri 18 Tahun 2020

*Data Capaian Tahun 2021



BAB IX

PENUTUP

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala daerah berakhir di tahun 2023. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Seruyan yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan pada



periode 2024-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;
3. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
4. Penyusunan RKPD Tahun 2026 masih mempedomani RPD 2024 – 2026 apabila belum tersedianya Perda RPJMD hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, atau belum ditetapkan RPJMD hasil Pilkada Serentak.



5. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra dilakukan dengan ketentuan Kepala Bappedalitbang bertanggung jawab terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
6. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas; dan
7. Pemerintah Kabupaten Seruyan wajib menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Indikator Kinerja Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan dengan baik bagi keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang.

 **BUPATI SERUYAN,**

YULHAIDER